



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 4 Desember 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan, dijalankan dan diselenggarakan oleh 2 Sekretariat, 1 Inspektorat Daerah, 18 Dinas, 4 Badan dan 11 Kecamatan, yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelola. disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai sarana informasi keuangan. Laporan Keuangan dapat memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Oleh karena itu, Laporan Keuangan tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka Laporan Keuangan yang disajikan mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Selain merupakan salah satu bentuk upaya nyata untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*, juga merupakan pemenuhan kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu periode yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya² yang dikelola, dengan:



- a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, Kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan umum laporan keuangan diharuskan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal sebagai berikut:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan LRA;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Saldo Anggaran Lebih;
- i. Pendapatan LO;
- j. Beban; dan
- k. Arus Kas.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set Laporan Keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial sehingga seluruh komponen menjadi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan tujuan memberikan kemudahan pada publik untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022, sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan APBD tahun berikutnya.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 beserta perubahannya terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- n. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 beserta perubahannya terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 112 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
- q. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 64 Tahun 2021.



1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penyajian informasi tentang pelaksanaan suatu program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran yang berkenaan, yang nantinya akan menjadi acuan dan target bagi penentu kebijakan untuk tahun berikutnya. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Transfer, Program Prioritas, Mandatory Spending dan Penurunan Stunting.
- 3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada PPKD

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan pos-pos Neraca
- 5.4 Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada indikator sosial ekonomi Tahun 2022 menurut data Selayar Dalam Angka Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 12,24%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,49%;
- c. Gini Ratio sebesar 0,30%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,35%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,02%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 4,12%;
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) sebesar 49,54 juta rupiah.

Sektor pertanian termasuk perkebunan dan peternakan sangat berperan dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar karena struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar masih bertumpu pada sektor Pertanian. Hal ini dibuktikan melalui kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan data Kepulauan Selayar dalam angka Tahun 2022 hasil perhitungan PDRB Tahun 2022. angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 6,8 triliun rupiah dengan kontribusi dari Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) masih menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 42,62%. Hal ini menjadi relevan dan sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021-2026 yang mengembangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara terpadu.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.



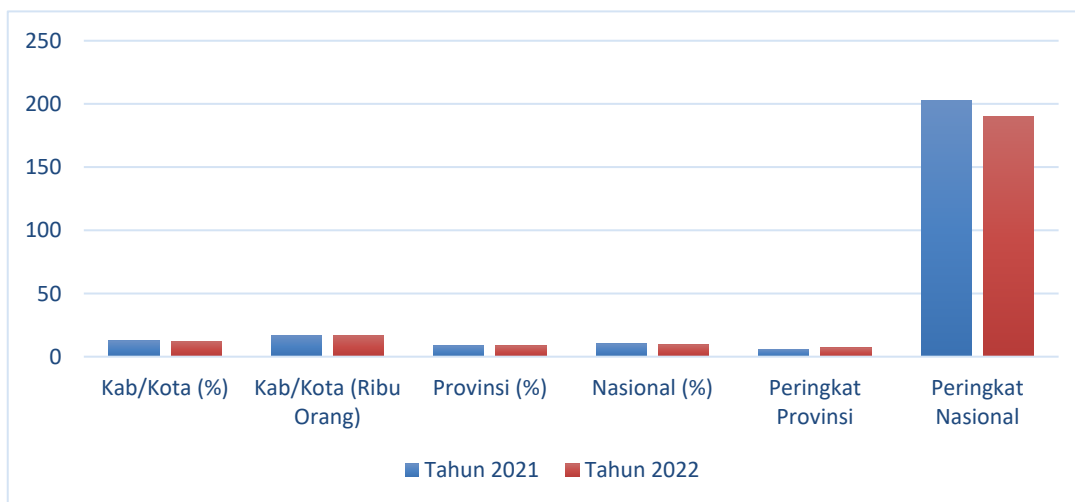
Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	12,45	12,24	(0,21)
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	16,93	16,74	(0,19)
3	Provinsi (%)	8,78	8,63	(0,15)
4	Nasional (%)	10,14	9,54	2,26
5	Peringkat Provinsi	6	7	1
6	Peringkat Nasional	203	190	13

<https://sulsel.bps.go.id/indicator/23/1893/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-dan-daerah-maret.html>

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2021 sebesar 12,45% masih berada pada angka yang sama dengan Tahun 2022 dimana persentase penduduk miskin berhasil ditekan sebanyak 0,21% hingga berada pada kisaran 12,24% dan diharapkan pada tahun berikutnya dapat kembali ditekan. Persentase penduduk miskin tersebut terangkum dalam diagram berikut:

Gambar 2.1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar



Persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	2,09	2,15	0,06
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,49	1,36	(0,13)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	1,56	(0,11)
4	Peringkat Provinsi	2	3	1
5	Peringkat Nasional	169	114	(55)

Sumber Dokumen: <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>

Gambar 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar



Tabel 2.3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,46	0,57	0,11
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,37	0,32	(0,05)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,38	0,04
4	Peringkat Provinsi	4	2	2
5	Peringkat Nasional	194	134	60

SumberDokumen:<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>

Gambar 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar



2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, Penganggur terbuka, terdiri dari:(i) mereka yang tak punya pekerjaan

dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

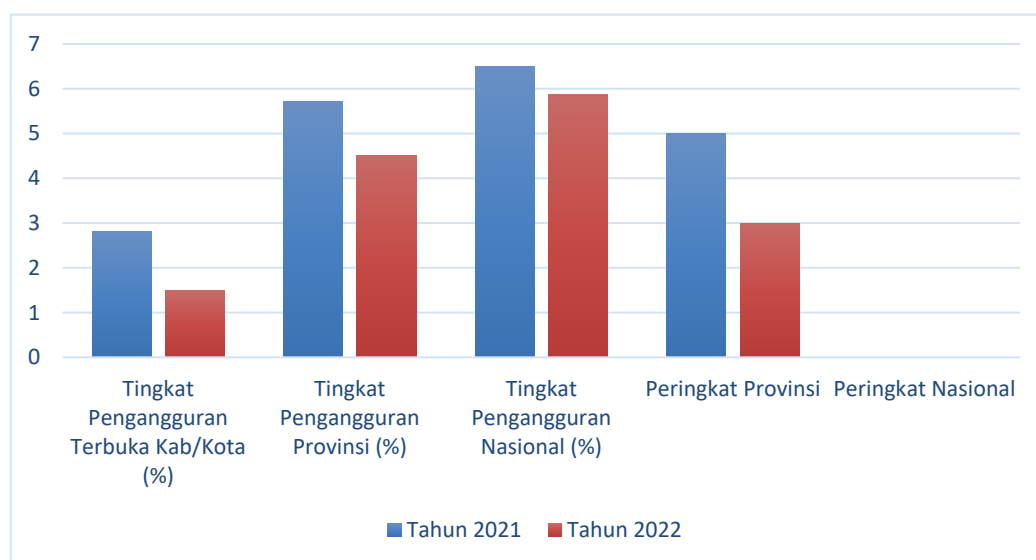
Sesuai dengan data Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah sebesar 1,49%. sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	2,81	1,49	1,32
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,72	4,51	(1,21)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	(0,63)
4	Peringkat Provinsi	5	3	2
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber <https://sulsel.bps.go.id/indicator/6/466/1/tingkat-pengangguran-terbuka.html>

Gambar 2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,81%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 1,49% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. Dengan demikian TPT Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi dan TPT Nasional sebesar 4,51% dan sebesar 5,86%.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi



uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

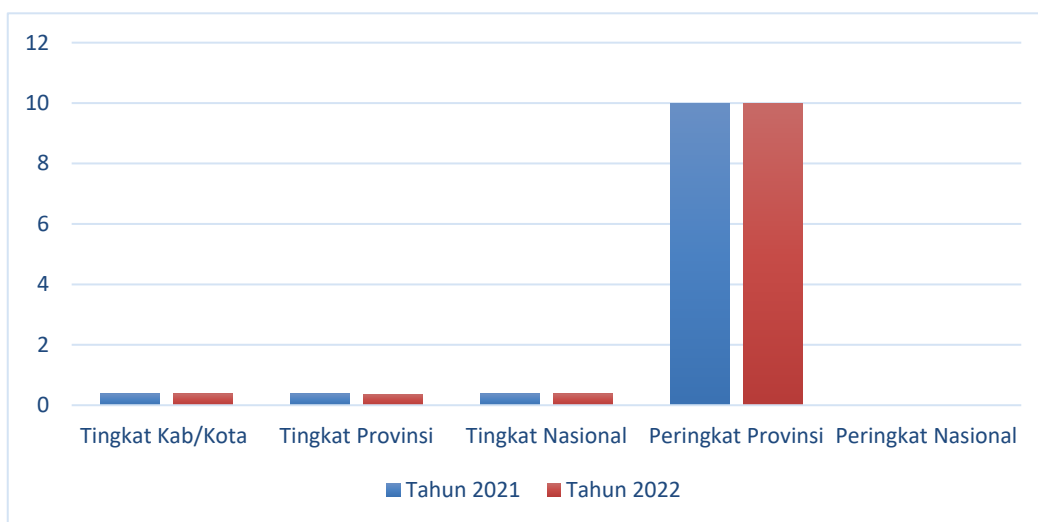
Sesuai dengan data Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah sebesar 0,301 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5. Gini Ratio Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,38	0,38	(0,25)
2	Tingkat Provinsi	0,38	0,37	(0,01)
3	Tingkat Nasional	0,38	0,38	0,00
3	Peringkat Provinsi	10	10	(0,00)
4	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: <https://sulsel.bps.go.id/indicator/23/1887/1/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah-maret.html>

Gambar 2.5. Gini Ratio Kabupaten Kepulauan Selayar



Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0.382. Angka ini naik 0.25 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2021 sebesar 0.382 dan masih tinggi jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:



- a. Rendah (<60);
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$);
- d. Sangat Tinggi (>80).

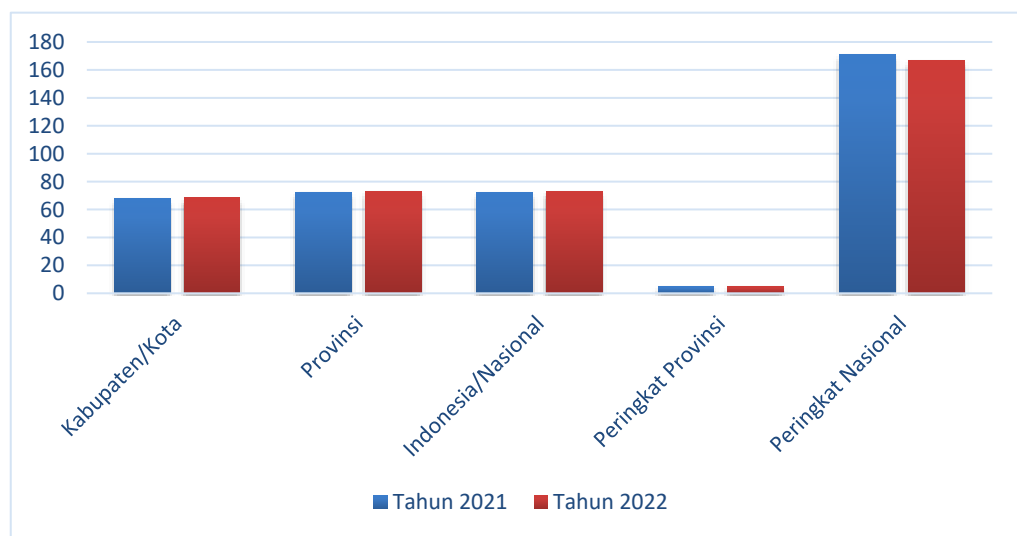
Sesuai dengan data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2021-2022 adalah sebesar 68,35 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	67,76	68,35	0,59
2	Provinsi	72,24	72,82	0,58
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	0,62
4	Peringkat Provinsi	5	5	0
5	Peringkat Nasional	171	167	4

Sumber Dokumen: <https://www.bps.go.id/indicator/26/413/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>

Gambar 2.6. Indeks Pembangunan Manusia



Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 68,35 poin. Dibandingkan Tahun 2021 sebesar 67,76 poin mengalami peningkatan sebesar 0,59 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 68,81 tahun pada Tahun 2022, lebih lama 0,29 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8.09 tahun dengan harapan lama sekolah 12,67 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp9.446.000,00 atau meningkat Rp386.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Kepulauan Selayar pada saat ini berada pada urutan 5 terendah dari 24 Kab/Kota



yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada urutan 167 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 515 Kab/Kota yang ada di Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (miliar rupiah)	3.620,20	3.765,56	3.765,56	605.144.676,81	19.146.749.714,44
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,68	-1,78	4,02	4,65	3,70
3	Peringkat Provinsi	4,00	23,00	23,00	11,00	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	-	-

Sumber Dokumen: sulsel.bps.go.id/indicator/52/1668/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-kabupaten-kota-menurut-lapangan-usaha.html

Gambar 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar



Selama kurun waktu Tahun 2022 s.d. Tahun 2019 perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan rata-rata 4,02%. Pada periode Tahun 2019 s.d. Tahun 2022 rata-rata pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 3,31% dan pada kurun waktu Tahun 2021 s.d. Tahun 2022 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan sebesar 2,24%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Kepulauan Selayar menempati urutan 23 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan skala nasional laju



pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar masih melaju di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi. (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun. (iii) inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

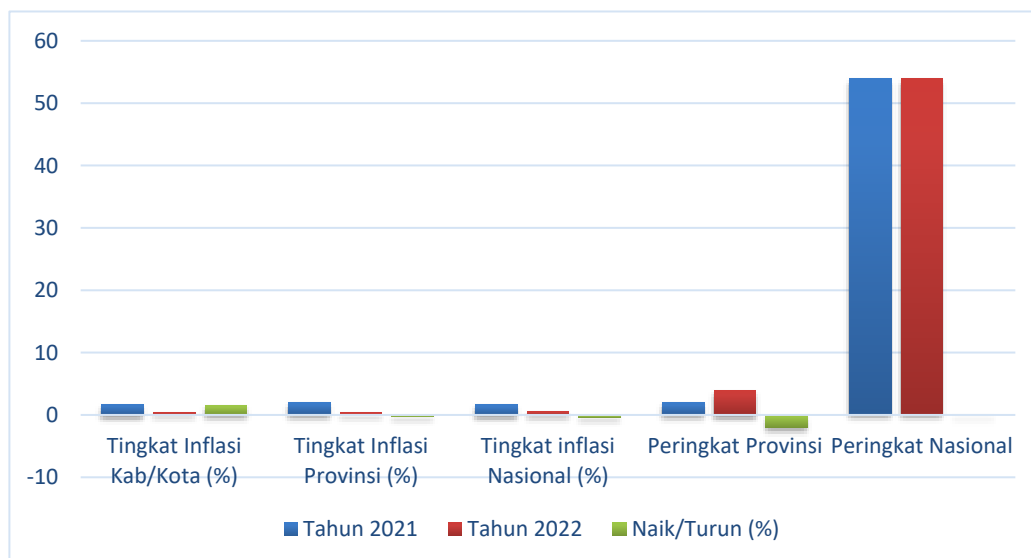
Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Prov. Sulawesi Selatan Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan Januari s.d. Juni 2022, diketahui Tingkat Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah sebesar 0,45% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.7.2.8. Tingkat Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	1,75	0,45	1,57
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,04	0,37	(0,31)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	0,57	(0,41)
4	Peringkat Provinsi	2	4	(2)
5	Peringkat Nasional	54	54	-

Sumber Dokumen: Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 2022 (www.bps.go.id)

Gambar 2.8. Tingkat Inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar





Tingkat inflasi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,45%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 1,75% lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021. Namun demikian inflasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,37% dan lebih rendah dari tingkat Nasional sebesar 0,57%.

2.1.7 Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

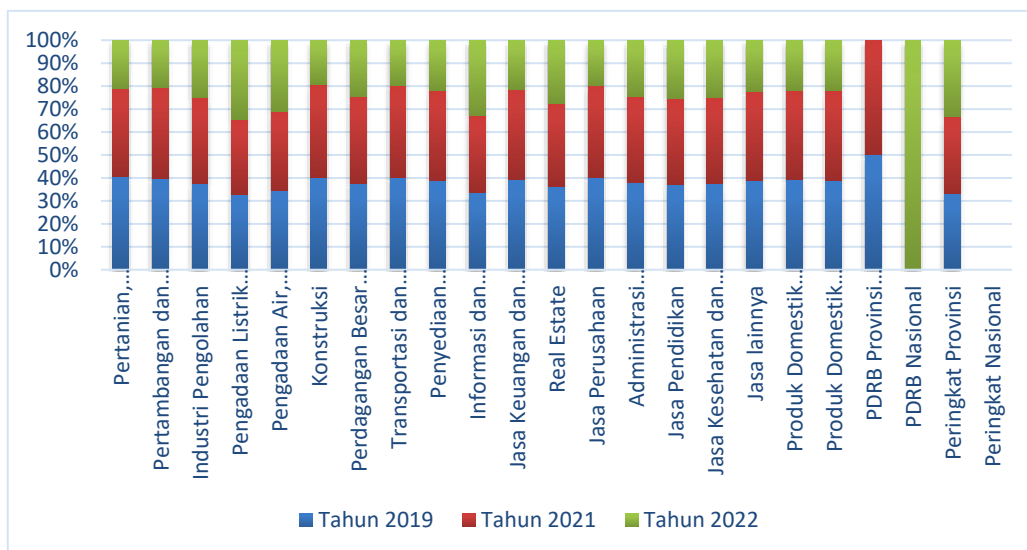
(dalam jutaan Rupiah)

Sumber Dokumen: <https://selSelayarkab.bps.go.id/indicator/52/157/1/pdrb-kabupaten-kepulauan-selayar-atas->

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.879.614,99	2.712.877,07	1.501.471,80
2	Pertambangan dan Penggalian	56.671,18	56.671,18	29.554,39
3	Industri Pengolahan	177.481,71	177.481,71	118.437,33
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.200,28	5.200,28	5.479,41
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6.120,10	6.120,10	5.506,45
6	Konstruksi	1.370.809,27	1.370.809,27	661.279,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	495.758,94	495.758,94	322.961,64
8	Transportasi dan Pergudangan	156.453,76	156.453,76	77.054,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15.733,98	15.733,98	8.876,22
10	Informasi dan Komunikasi	143.423,61	143.423,61	139.495,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	81.802,75	81.802,75	44.679,96
12	Real Estate	83.997,67	83.997,67	64.465,45
13	Jasa Perusahaan	1.156,67	1.156,67	570,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	475.381,62	475.381,62	306.419,84
15	Jasa Pendidikan	340.755,08	340.755,08	233.886,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119.452,85	119.452,85	80.213,42
17	Jasa lainnya	34.386,78	34.386,78	19.842,95
18	Produk Domestik Regional Bruto	6.444.224,78	6.392.741,36	3.620.195,04
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	6.386.006,14	6.387.200,01	3.620.195,04
20	PDRB Provinsi (miliar rupiah)	504.746,87	504.478,54	545.230.000,03
21	PDRB Nasional	15.833.943,40	15.434.200,00	16.954.170.073,02
22	Peringkat Provinsi	24	24	24
23	Peringkat Nasional	-	-	-

[dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha.html](#)

Gambar 2.9. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha



2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan umum APBD Tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang berisi kebijakan sebagai berikut:

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, Rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimanya dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan. Beberapa kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah melalui proses optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini telah dikelola oleh pemerintah daerah, seperti peningkatan kualitas pelayanan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pajak daerah dan sistem pelaporan pajak daerah, melakukan koordinasi yang intensif dan efektif, yaitu dengan meningkatkan kerjasama dengan seluruh OPD pengelola pendapatan dan meningkatkan ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak melalui sosialisasi. Sedangkan ekstensifikasi adalah merupakan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan/atau penambahan obyek dan subyek sumber-sumber pendapatan daerah.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan Belanja Daerah memiliki ciri hemat, tepat guna dan tepat sasaran, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah menyangkut kewajiban daerah dalam rangka membayar kebutuhan belanja yang telah direncanakan. Program dan kegiatan



penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik atau kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran APBD yang dilanjutkan pada penyusunan prioritas plafon anggaran sementara sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan yang dituangkan pada rancangan APBD. Secara umum kebijakan Belanja Daerah tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksud adalah menjamin kelancaran pendanaan program/kegiatan dan biaya operasional pemerintah daerah yang telah direncanakan dalam APBD dalam upaya mendorong peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. yang diharapkan akan meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Belanja Daerah menganut kebijakan pengalokasian dana dengan susunan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk menutup kebutuhan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan OPD sebagaimana dimaksud ketentuan huruf B Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diterapkan secara konsisten dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan APBD meliputi:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang;
- 3) Belanja Subsidi;
- 4) Belanja Hibah;
- 5) Belanja Bantuan Sosial; dan
- 6) Belanja Bantuan Keuangan.

Adapun komponen belanja operasi berdasarkan kebijakan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan. serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Belanja Pegawai ditujukan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a) Menyediakan anggaran *acress* 2,5% untuk mengantisipasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB). tunjangan keluarga. mutasi jumlah jiwa. dan mutasi jabatan;
- b) Menyediakan pembayaran gaji ke-13;
- c) Menyediakan kenaikan tambahan penghasilan PNS;
- d) Menyediakan Biaya Operasional DPRD dan Bupati/Wakil Bupati;
- e) Menyediakan Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD; dan
- f) Menyediakan biaya pajak daerah bagi aparat pemungut.

2) Belanja Barang

Belanja Barang digunakan untuk pembiayaan alat tulis kantor/penggunaan, perjalanan dinas, dan belanja jasa. termasuk belanja jasa boga.

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan. dapat terjangkau oleh masyarakat luas.



4) Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya, pemerintah atau perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Belanja Hibah yang digolongkan dalam Belanja Tidak Langsung adalah pemberian hibah dalam bentuk uang, kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

5) Belanja Bantuan Sosial

Kebijakan Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan untuk bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dilihat berdasarkan:

- a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
- b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

6) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa/kelurahan, transfer bagi hasil ke Desa dan bantuan partai politik dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Adapun komponen Belanja Modal berdasarkan kebijakan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Tanah;
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin;
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan;
- 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Belanja Aset Lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bantuan sosial serta kebutuhan mendesak lainnya. Sementara itu, Belanja Langsung disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomi baik menurut klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, urusan wajib dan urusan pilihan daerah maupun klasifikasi menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah, Belanja Langsung diarahkan untuk:



- 1) Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- 2) Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas OPD dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan pencapaian visi dan misi daerah;
- 3) Mendanai kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah meningkatkan manajemen dalam rangka efisiensi dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan Daerah dibagi atas dua bagian, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/defisit anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama segenap masyarakatnya berupaya melaksanakan prioritas pembangunan daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah merumuskan indikator pencapaian sasaran yang tertuang dalam RPJMD untuk Tahun 2022, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan;
- b. Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan;
- c. Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan;
- d. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat;
- e. Maningkatnya Daya Beli Masyarakat;
- f. Meningkatnya Usaha Perikanan;
- g. Meningkatnya Usaha pariwisata;
- h. Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi, dan Perdagangan;
- i. Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial;
- j. Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan;
- k. Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta
- l. meningkatnya mitigasi lingkungan.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar menurut urusan pemerintahan daerah disajikan sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada TA 2022 sebesar Rp1.076.341.645.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.021.771.445.235,53 atau 94,93%. Dalam tahun anggaran 2022 diketahui adanya dua kali pergeseran anggaran yang mendahului perubahan APBD masing-masing sebesar Rp1.122.961.922.893 dan sebesar Rp1.134.099.419.893 berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 15 tanggal 25 Maret 2022 dan nomor 18 tanggal 20 Mei 2022, hal ini dilakukan karena adanya keadaan yang mendesak untuk mengalokasikan anggaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	OPD	Anggaran	Realisasi	Persen (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	26.685.548.325,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	30.584.166.000,00	11.978.722.450,00	39,17
3	Rumah Sakit Umum Daerah	27.663.069.000,00	21.004.303.207,0	75,93
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	375.000.000,00	258.578.100,00	68,95
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	341.775.000,00	394.415.000,00	115,40
6	Dinas Perhubungan	906.582.600,00	803.669.420,000	88,65
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	200.800.000,00	208.000.000,00	103,59
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	313.650.000,00	119.962.500,00	38,25
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	205.852.400,00	99.200.000,00	48,19
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	35.000.000,00	13.529.000,00	38,65
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	50.000.000,00	23.840.000,00	47,68
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	518.000.000,00	183.497.750,00	35,42
14	BPKPPD	1.015.461.400.000,00	960.118.141.983,53	94,55
	Jumlah	1.076.341.645.000,00	1.021.771.445.235,53	94,93

3.1.2 Belanja

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada TA 2022 sebesar Rp1.006.951.205.926,00 dan terealisasi sebesar Rp863.006.799.406,52 atau 85,70%. Dalam tahun anggaran 2022 diketahui adanya dua kali pergeseran anggaran yang mendahului perubahan APBD masing-masing sebesar Rp1.122.961.922.893 dan sebesar Rp1.134.099.419.893 berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 15 dan nomor 18, hal ini dilakukan karena adanya keadaan mendesak.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

(dalam Rupiah)

No	OPD	Anggaran	Realisasi	Persen (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	244.406.740.366,00	233.260.568.096,00	95,44
2	Dinas Kesehatan	214.297.352.977,00	156.552.829.004,00	73,05
3	Rumah Sakit Umum Daerah	79.874.745.115,00	63.180.832.454,52	79,10
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	138.791.236.405,00	91.751.469.977,00	66,11
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.280.667.393,00	12.330.318.549,00	92,84
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.755.179.718,00	9.624.562.919,00	98,66



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	OPD	Anggaran	Realisasi	Persen (%)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.646.569.300,00	16.603.685.655,00	99,74
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.020.787.800,00	3.860.258.994,00	96,01
9	Dinas Sosial	8.619.571.237,00	8.366.507.374,00	97,06
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	8.588.889.881,00	7.448.702.029,00	86,72
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19.711.383.761,00	18.912.931.984,00	95,95
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.059.019.000,00	3.946.063.799,00	97,22
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.477.566.485,00	4.338.496.463,00	96,89
14	Dinas Perhubungan	9.691.946.221,00	9.221.086.491,00	95,14
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	8.289.328.878,00	8.152.424.485,00	98,35
17	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	7.545.448.669,00	7.387.262.856,00	97,90
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.509.524.830,00	3.337.926.999,00	95,11
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.628.129.359,00	10.266.231.535,00	96,59
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.860.983.100,00	8.415.183.702,00	94,97
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	22.502.498.057,00	22.220.949.322,00	98,75
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.048.534.875,00	19.680.974.270,00	98,17
23	Sekretariat Daerah	36.845.213.452,00	36.522.419.245,00	99,12
24	Sekretariat DPRD	35.790.369.720,00	35.289.519.173,00	98,60
25	Kecamatan Bontomatene	3.438.074.911,00	3.419.082.081,00	99,45
26	Kelurahan Batangmata	1.568.339.420,00	1.559.565.505,00	99,44
27	Kelurahan Batangmata Sapo	1.458.156.765,00	1.441.936.794,00	98,89
27	Kecamatan Buki	1.706.883.700,00	1.666.873.919,00	97,66
28	Kecamatan Bontomanai	1.987.363.000,00	1.981.671.559,00	99,71
29	Kecamatan Benteng	3.554.350.114,00	3.530.366.397,00	99,33
30	Kelurahan Benteng	1.651.657.713,00	1.640.677.213,00	99,34
31	Kelurahan Benteng Selatan	1.703.111.293,00	1.665.344.548,00	97,78
32	Kelurahan Benteng Utara	1.566.100.965,00	1.552.763.709,00	99,15
33	Kecamatan Bontoharu	2.907.278.615,00	2.882.349.415,00	99,14
34	Kelurahan Bontobangun	1.847.392.350,00	1.797.429.724,00	97,30
35	Kelurahan Putabangun	1.696.777.050,00	1.695.512.589,00	99,93
36	Kecamatan Bontosikuyu	1.877.908.136,00	1.816.047.555,00	96,71
37	Kecamatan Taka Bonerate	1.685.722.304,00	1.573.327.489,00	93,33
38	Kecamatan Pasimasunggu	1.936.090.900,00	1.895.428.632,00	97,90
39	Kecamatan Pasimasunggu Timur	1.627.676.089,00	1.512.542.806,00	92,93
40	Kecamatan Pasimarannu	1.814.678.400,00	1.776.186.684,00	97,88
41	Kecamatan Pasilambena	1.385.241.933,00	1.353.194.067,00	97,69
42	Inspektorat Daerah	10.064.083.400,00	9.430.852.616,00	93,71
43	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.133.941.600,00	4.988.167.834,00	97,16
44	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	19.289.663.469,00	16.647.038.293,00	86,30
45	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	6.809.027.200,00	6.509.234.602,00	95,60
	Jumlah	1.006.951.205.926,00	863.006.799.406,52	85,70



3.1.3 Transfer

Anggaran Transfer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada TA 2022 sebesar Rp135.839.666.582,00 dan terealisasi sebesar Rp135.707.988.653,00 atau 99,90%.

3.2 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Transfer, Program Prioritas, Mandatory Spending dan Penurunan Stunting.

Penerimaan dan pengeluaran dana transfer, program prioritas, mandatory spending dan penurunan stunting dalam APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2022 disajikan sebagai berikut:

3.2.1 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Transfer

Dalam TA 2022 penerimaan daerah yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat masih merupakan sumber utama pendanaan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mendanai pengeluaran daerah tersaji dalam tabel 3.3

Tabel 3.3 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Transfer 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	904.260.024.395,00	861.816.461.865,74
Dana Perimbangan	830.264.598.395,00	788.508.171.120,74
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	24.223.459.668,00	24.223.459.668,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	559.925.703.281,00	546.988.931.089,66
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	143.430.633.938,00	114.676.169.541,08
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	102.684.801.508,00	102.619.610.822,00
Dana Insentif Daerah (DID)	2.950.221.000,00	2.263.085.745,00
DID	2.950.221.000,00	2.263.085.745,00
Dana Desa	71.045.205.000,00	71.045.205.000,00
Dana Desa	71.045.205.000,00	71.045.205.000,00

3.2.2 Program Prioritas

Dalam TA 2022 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menargetkan pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah yang wajib diperhatikan dalam pengalokasian belanja daerah yang terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas keluarga;
2. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang didukung oleh kajian lingkungan;
3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan untuk penurunan angka kemiskinan, dan pemulihan ekonomi;
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan Memanfaatkan Potensi Kemaritiman, diarahkan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata terhadap perekonomian daerah;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, diarahkan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat dan reformasi birokrasi.

Rincian anggaran dan realisasi program prioritas tersaji dalam tabel 3.4



Tabel 3.4 Program Prioritas TA 2022

No	Prioritas Pemanfaatan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	2022			OPD Penanggung jawab
				Target	Kebutuhan Dana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				189.498.630.650,00	169.357.128.869,00	
	1	Program pengelolaan pendidikan (SPM)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-15 tahun (Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni)	100%	48.738.124,415	39.082.698.928,00	Disdikpora
	2	Program pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah	100%	67.424.500,00	67.424.500,00	Disdikpora
	3	Program pengembangan kurikulum	Cakupan Persentase Muatan Lokal dalam Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar	100%	54.000.000,00	48.500.000,00	Disdikpora
	4	Program pendidikan dan tenaga kependidikan	Persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan berdasarkan rombongan standar kurikulum	100%	116.721.000,00	116.721.000,00	Disdikpora
	5	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	4,20%	167.500.000,00	167.430.000,00	Disdikpora



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

6	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	0,39%	4.236.571.000,00	4.035.649.000,00	Disdikpora
7	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (SPM)	Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas per satuan penduduk		178.565.303.800,00	120.822.880.108,00	Dinkes
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	0,00	0,00	RSUD
8	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan (dokter, tenaga medis dan bidan) per satuan penduduk	0,6	40.000.000,00	39.240.000,00	Dinkes
9	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,30%	27.200.000,00	22.899.200,00	DP3A P2KB
10	Program pengendalian penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,03	101.200.000,00	95.678.201,00	DP3A P2KB
11	Program perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,003	38.949.500,00	35.620.500,00	DP3A P2KB
12	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak	100%	120.640.200,00	107.111.200,00	DP3A P2KB
13	Program pembinaan	Persentase	82,25 %	3.135.979.681,00	2.538.770.433,00	DP3A P2KB



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

		n keluarga berencana (KB)	pemakaian kontrasepsi Modern				
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	16,59 %			
	14	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera	100%	897.829.900,00	466.009.000,00	DP3A P2KB
	15	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,59%	152.756.069,00	152.612.069,00	Dinas PMPT SPTK
	16	Program pembinaan perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	60,70 %	179.994.000,00	174.589.000,00	DPK
	17	Program pengembangan sumber daya manusia	Cakupan ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Sosio-kultural dan Diklat Teknis	16,50 %	1.443.180.000,00	1.231.922.832,00	BKPS DM
	18	Program pengembangan kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	1 Obyek	153.381.000,00	151.372.898,00	Dispar bud
2	Pembangunan Infrastruktur Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup				159.579.651.197,00	123.048.366.915,00	



			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan	0,81			
		1	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	1	16.254.719.949,00	14.266.064.107,00	Dinas PUTR
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamatan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota				
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,5			
		2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPM)	55,30 %	4,487,000,326	4.108.105.084,00	Dinas PUTR
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan				



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

			perpipaan terlindungi					
		3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (SPM)	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6,51%	545,729,000	528.179.000,00	Dinas PUTR
		4	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	92%	6.506.901.090,00	6.168.127.774,00	Dinas PUTR
		5	Program penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB	1	569.363.200,00	501.844.898,00	Dinas PUTR
		6	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	71,43 %	80.517.228.538,00	41.059.083.821,00	Dinas PUTR
		7	Program kawasan permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	0,50%	359.544.000,00	188.441.200,00	DPKP
		8	Program pengembangan perumahan (SPM)	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	100%	3,058,058,000	2.756.255.061,00	DPKP
		9	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Cakupan pembinaan penaganan permukiman kumuh	15,19 %	2.213.871.000,00	2.142.851.920,00	DPKP
		10	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Cakupan Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	15%	4.574.349.370,00	4.208.742.940,00	DPKP



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

		11	Program pengelolaan pelayaran	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	55,73 %	2.580.191.500,00	2.311.820.532,00	Dishub
		12	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kabupaten	30,69 %	990.081.600,00	979.610.007,00	Dishub
		13	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	12,50 %	338.639.000,00	337.465.200,00	DLH
		14	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan	64%	132.995.800,00	129.897.364,00	DLH
		15	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	2,59	3.229.421.500,00	3.155.847.443,00	DLH
		16	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1,38%	2.361.109.000,00	2.284.267.446,00	DLH
3	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat					19.475.617.825,00	18.960.881.559,00	



1	Program pemberdayaan sosial	Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat terpencil (KAT) yang mendapatkan pengembangan kemampuan dan potensi	50 Orang	219.600.000,00	213.621.800,00	Dinas Sosial
2	Program rehabilitasi sosial (SPM)	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	26%	4.425.600.000,00	4.337.708.335,00	Dinas Sosial
3	Program penanganan bencana (SPM)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	325.000.000,00	141.867.300,00	Dinas Sosial
4	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	-	0,00	Dinas PMPT SPTK
5	Program pengelolaan sumber	Cakupan ketersediaan infrastruktur	20%	-	0,00	Distan KP



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

		daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	tur cadangan pangan				
6	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	100%	194.415.700,00	194.385.700,00	Distan KP	
7	Program perencanaan dan pembangunan industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	0,67%	776.331.000,00	744.002.200,00	Disper indag KUKM	
8	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	8.129.742.125,00	8.030.867.684,00	Disper indag KUKM	
9	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	32%	553.147.000,00	550.074.000,00	Disper indag KUKM	
10	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Peningkatan Penyediaan Sarana Pendistribusian Perdagangan	100%	123.327.000,00	121.852.250,00	Disper indag KUKM	
11	Program pengembangan umkm	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui	100%	4.170.915.000,00	4.074.012.500,00	Disper indag KUKM	



				Lembaga pendampingan				
		12	Program pemasaran pariwisata	Jumlah Promosi Pariwisata yang dikembangkan	5 Keg	557.540.000,00	552.489.790,00	Disparbud
4	Pengelolaan Sumber Daya Alam Dengan Memanfaatkan Potensi Kemaritiman					19.322.341.652,00	18.686.241.236,00	
		1	Program promosi penanaman modal	Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan	5 Keg	154.662.000,00	149.042.366,00	Dinas PMPT SPTK
		2	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		4.453.673.405,00	4.289.775.624,00	Dinas Perikanan
		3	Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		848.163.690,00	845.915.740,00	Dinas Perikanan
		4	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas		2.055.803.400,00	1.933.912.280,00	Disparbud
		5	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		679.085.000,00	508.186.960,00	Disparbud
		6	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Cakupan Sarana pertanian	0,21%	3.288.202.000,00	3.199.498.700,00	Distan KP
		7	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian		7.842.752.157,00	7.759.909.566,00	Distan KP
5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik					664.838.007.695,00	583.946.804.745,70	
		1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	493.497.061.087,00	486.094.605.170,70	Semua OPD



2	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	532.368.100,00	527.938.550,00	Satpol PP Damkar & Penyelamatan
3	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non kebakaran	91,41	166.230.000,00	164.190.000,00	Satpol PP Damkar & Penyelamatan
4	Program penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	14.165.793.000,00	14.151.766.858,00	BPBD
5	Program pengelolaan persampahan	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah	1,3	6.125.111.076,00	5.663.513.636,00	DLH
6	Program pendaftaran penduduk	Perekaman KTP Elektronik	94%	442.440.000,00		Disdukcapil
7	Program pencatatan sipil	Kepemilikan akta kelahiran	80,15 %	247.000.000,00	246.381.400,00	Disdukcapil
8	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	77,46	1.263.291.000,00	1.263.170.200,00	Diskominfos



9	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	209.843.000,00	197.703.494,00	Diskominformasi
10	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	17,49 %	624.420.600,00	624.258.199,00	Diskominformasi
11	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedia	-	0,00	Disperindag KUKM
12	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Capaian Kinerja Program RPJMD	100%	656.629.000,00	623.292.292,00	Bapelitbangda
13	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD	100%	572.653.000,00	538.677.743,00	Bapelitbangda
14	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan untuk inovasi	100%	555.236.000,00	516.311.305,00	Bapelitbangda
15	Program pengelolaan keuangan daerah	Rasio Belanja Daerah terhadap Pendapatan Daerah	1,17	140.164.506.732,00	68.165.427.617,00	BPKPD



	16	Program pengelolaan barang milik daerah	Assets Management	ada	853.159.700,00	788.423.020,00	BPKPD
	17	Program kepegawaian daerah	Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	99,21	1.180.868.000,00	1.147.434.761,00	BKPSDM
	18	Program penyelenggaraan pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	3.581.397.400,00	3.233.710.500,00	Inspektorat

3.2.3 Mandatory Spending

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk membiayai program/ kegiatan terkait pemenuhan pelayanan dasar yang terdiri dari Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Bidang Sosial. Dalam TA 2022 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menganggarkan belanja wajib dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal disajikan dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5 Belanja Wajib TA 2022

(dalam rupiah)

No	Bidang Urusan	Pagu Anggaran	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	244.406.740.366,00	233.260.568.096,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	Kesehatan	294.172.098.092	219.733.661.458,52	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	138.791.236.405,00	91.751.469.977,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah	6.809.027.200	6.509.234.602,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	26.401.749.018	26.228.248.574	Satuan Polisi Pamong Praja
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Alokasi anggaran untuk pengawasan	10.064.083.400	9.430.852.616,00	Inspektorat Daerah
Jumlah		720.644.934.481,00	586.914.035.323,52	



3.2.4 Penurunan Stunting

Dalam rangka menunjang pencapaian target program prioritas pembangunan Nasional dan daerah khususnya dalam upaya penurunan angka stunting yang telah ditetapkan dalam TA 2022, perlu dukungan pembiayaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tiga perangkat daerah tersaji dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6 Rincian Belanja Penurunan Stunting TA 2022

NO	PROG/KEG/SUBKEG	PAGU	(dalam rupiah)	
			REALISASI	OPD
1	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.145.000.000,00	1.136.462.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	34.098.000,00	28.630.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
3	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	125.400.000,00	125.400.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana
4	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	352.880.000,00	49.060.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana
5	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000,00	4.360.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana
6	Pengendalian Program KKBPK	445.500.000,00	392.650.500,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana
7	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	171.600.000,00	21.896.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana
8	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat/penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota/Operasioanal pelayanan PKM	221.977.000,00	294.750.000,00	Dinas Kesehatan
	Jumlah	2.500.830.000,00	2.053.209.300,00	



3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah dan solusi yang mungkin dilakukan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kesadaran dari subjek pajak/retribusi untuk menyelesaikan kewajibannya. Diperlukan untuk sering mengadakan sosialisasi, memberikan pemahaman;
- b. Kurangnya aparatur yang profesional di Bidang Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan, dan Pendapatan Daerah sehingga penerimaan pendapatan belum maksimal. Hal ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kinerja profesional;
- c. Kurangnya pengkajian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru sehingga diperlukan pengkajian dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Tata kelola pendapatan asli daerah belum memperhatikan kondisi kekinian, misalnya kelemahan sumber daya manusia, kepatuhan subjek pajak/retribusi yang dapat diminimalkan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut dapat berupa pengawasan secara *online* terhadap subjek pajak/retribusi.

Permasalahan tidak tercapainya target kinerja belanja, sebagai berikut:

- a. Masih banyaknya OPD yang penyerapan anggaran belanja masih rendah, disebabkan karena perencanaan program/kegiatan pada sebagian OPD belum terencana dengan baik;
- b. Belum optimalnya perencanaan anggaran, yang disebabkan masih terdapat OPD yang salah menempatkan anggaran belanja. Hal ini dapat diminimalkan dengan merancang instrumen pengendalian yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi;
- c. Proses perencanaan dan penganggaran yang belum dilakukan secara terintegrasi dan terdigitalisasi, memungkinkan masih adanya program/kegiatan yang tidak sinkron antara dokumen.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar termuat di dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 yang secara umum diuraikan sebagai berikut:

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan entitas pelaporan atau Satuan Kerja Penatausahaan Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar atau Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disajikan berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran, yaitu basis kas.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penerapan basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pengukuran Persediaan

Kebijakan Akuntansi Nomor 08 tentang Akuntansi Persediaan pada Par. 20 s.d. 27, menjelaskan pengukuran persediaan sebagai berikut:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);
- d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar;
- e. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar;
- f. Persediaan obat-obatan di RSUD dan Dinas Kesehatan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi OPD dan BLUD selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar;



- g. Persediaan obat-obatan di RSUD dan Dinas Kesehatan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (*First In First Out - FIFO*);
- h. Metode Periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode/bulan/tahun. Pada akhir periode/bulan/tahun inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD. Metode ini digunakan untuk persediaan seperti Alat Tulis Kantor. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan dengan cara perhitungan sebagai berikut:

(1) Saldo Awal	xxx
(2) Pembelian Persediaan	xxx
(3) Persediaan yang Tersedia (1+2)	xxx
(4) Saldo Akhir Persediaan	xxx
(5) Persediaan Terpakai yang Diakui sebagai Beban	xxx
Persediaan (3-4)	

4.3.2 Pengukuran Investasi

Kebijakan Akuntansi Nomor 09 tentang Akuntansi Investasi pada Par. 22 s.d. 27 dan 30 s.d. 34, menjelaskan pengukuran investasi sebagai berikut:

- a. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya;
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
- c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
- d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- e. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;
- f. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
- g. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;



- h. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
- i. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi;
- j. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut;
- k. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

4.3.3 Pengukuran Dana Bergulir

Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Akuntansi Dana Bergulir pada Par. 17 menjelaskan pengukuran dana bergulir adalah dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Nonpermanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.

Pada Par. 18 s.d. 21 menjelaskan pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal, yaitu:

- a. Pengukuran dana bergulir setelah saat perolehan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika pemerintah daerah pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang tidak dapat ditagih.
- b. Penentuan kualitas dana bergulir dilakukan dengan pengklasifikasian:
 - 1) Kualitas lancar;
 - 2) Kualitas kurang lancar;
 - 3) Kualitas diragukan;
 - 4) Kualitas macet.
- c. Dana bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang belum dilunasi tersebut dikurangi dana bergulir diragukan (dana bergulir yang tidak dapat ditagih ditambah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih). Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih diikuti dengan pencatatan untuk mengurangi ekuitas dana investasi-diinvestasikan dalam investasi jangka panjang.
- d. Harga perolehan dana bergulir dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada Par. 22 s.d. 24 menjelaskan pengukuran dana bergulir diragukan tertagih, yaitu:

- a. Dana bergulir di Neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangi dana bergulir dengan dana bergulir diragukan tertagih. Dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian, nilai dana bergulir diragukan tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama dana bergulir masih tercantum atau belum dihapuskan;



- b. Dana bergulir diragukan tertagih diperhitungkan dan dibukukan pada periode yang sama dengan dana bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat direalisasi. Dana bergulir diragukan tertagih terdiri dari dana bergulir yang tidak dapat tertagih ditambah perkiraan dana bergulir yang tidak tertagih (diragukan dapat tertagih). Dana bergulir yang tidak dapat tertagih harus didukung dengan bukti-bukti bahwa dana bergulir tersebut tidak dapat ditagih dan tetap harus dibukukan sampai dana bergulir tersebut dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan dana bergulir diragukan tertagih ditentukan dengan melakukan analisis terhadap saldo dana bergulir yang masih *outstanding* berdasarkan pengalaman masa lalu pada setiap akhir periode;
- c. Untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:
 - 1) 0 bulan sampai dengan 12 bulan disisihkan sebesar 0.5% dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - 2) 1 tahun sampai 2 tahun disisihkan sebesar 10% dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - 3) 3 tahun sampai dengan 4 tahun disisihkan sebesar 50% dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 4) di atas 5 tahun disisihkan sebesar 100% dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Par. 20 s.d. 22, menjelaskan pengukuran aset tetap sebagai berikut:

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- b. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;
- c. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

4.3.5 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Par. 12. menjelaskan pengukuran konstruksi dalam pengerjaan adalah konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

4.3.6 Pengukuran Piutang

Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang Akuntansi Piutang pada Par. 31 s.d. 36. menjelaskan pengukuran piutang sebagai berikut:



- a. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan;
- b. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi;
 - 4) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah.
- c. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, sebagai berikut:
 - 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran maka nilai piutang harus sebesar nilai bersihnya.
 - 3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - 4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka telah diterima.
- d. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;



- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke kabupaten;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat.
- e. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 bulan berikutnya.
- f. Terhadap piutang dalam valuta asing disajikan sebagai piutang di Neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

Kebijakan Akuntansi Nomor 07 tentang Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang pada Par. 9 dan 20, menjelaskan pengukuran piutang sebagai berikut:

- 1) Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut.

Tabel 4.1 Kebijakan Perhitungan Kualitas Piutang

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

- 2) Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan piutang berdasarkan umur piutang (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:
 - a) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- 3) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.
- 4) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Dinas Pendapatan (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun;
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.
- 5) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
 - c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; dan/atau



- d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- 6) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan/atau
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- 7) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Dana Bergulir, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

4.3.7 Pengukuran Aset Tak Berwujud

Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud pada Par. 23. menjelaskan pengukuran aset tak berwujud adalah aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.

Pada Par. 31 menjelaskan pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal, yaitu setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi.

Pada Par. 32 s.d. 35 menjelaskan periode amortisasi sebagai berikut:

- a. Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan;
- b. Manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang terkandung dalam suatu aset tak berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. Untuk mencerminkan konsumsi tersebut, nilai tercatat aset tersebut harus diturunkan. Hal tersebut dilakukan melalui alokasi yang sistematis atas biaya perolehan dikurangi nilai sisa. Alokasi yang sistematis tersebut diperhitungkan sebagai amortisasi sepanjang masa manfaat aset tersebut. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat suatu aset tak berwujud, termasuk:
 - 1) Perkiraan pemakaian aset oleh entitas dan efisiensi pengelolanya oleh tim manajemen yang lain;
 - 2) Siklus hidup yang lazim bagi aset tersebut dan informasi yang beredar mengenai estimasi masa manfaat aset sejenis yang digunakan dengan cara yang sama;
 - 3) Keunggulan teknis, teknologi;



- 4) Tingkat/jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan serta maksud entitas untuk mencapai tingkat tersebut;
 - 5) Periode pengendalian aset dan pembatasan hukum dan pembatasan lainnya yang dikenakan atas penggunaan aset tersebut; dan
 - 6) Ketergantungan masa manfaat aset tersebut atas masa manfaat aset lainnya dari entitas;
- c. Menilik sejarah pesatnya perkembangan teknologi, piranti lunak (*software*) komputer dan banyak aset tak berwujud lainnya rentan terhadap keusangan teknologi. Oleh karena itu, masa manfaat aset tak berwujud cenderung pendek;
 - d. Jika pengendalian atas manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dari suatu aset tak berwujud diperoleh melalui hak hukum yang diberikan selama satu periode tertentu, maka masa manfaat aset tak berwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum tersebut, kecuali:
 - 1) Hak hukum tersebut dapat diperbaharui; dan
 - 2) Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh.

4.3.8 Pengukuran Kewajiban

Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang Akuntansi Kewajiban pada Par. 31 s.d 33, menjelaskan pengukuran kewajiban sebagai berikut:

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca;
- b. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut;
- c. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

4.3.9 Pengukuran Ekuitas

Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Akuntansi Ekuitas pada Par. 4 s.d 6, menjelaskan pengakuan dan pengukuran ekuitas sebagai berikut:

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan;
- b. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas;
- c. Pengakuan dan pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun Investasi Jangka Pendek. Investasi Jangka Panjang. Aset Tetap. Aset Lainnya. Dana Cadangan. Penerimaan Pembiayaan. Pengeluaran Pembiayaan dan Pengakuan Kewajiban.

4.3.10 Pengukuran Pendapatan

Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang Akuntansi Pendapatan pada Par. 53 s.d 57, menjelaskan pengukuran pendapatan sebagai berikut:

- a. Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan;



- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan;
- e. Pendapatan Hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.11 Pengukuran Beban

Kebijakan Akuntansi Nomor 18 tentang Akuntansi Beban pada Par. 19 s.d 20. menjelaskan pengukuran beban sebagai berikut:

- a. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan;
- b. Untuk perhitungan beban yang berkaitan dengan utang yang telah jatuh tempo diukur berdasarkan tanggal jatuh tempo tanggal 1 sampai dengan 15 bulan berkenaan menjadi beban bulan berkenaan dan bila jatuh tempo di atas tanggal 15 diperhitungkan menjadi beban bulan berikutnya, misalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan dinas operasional.

4.3.12 Pengukuran Belanja

Kebijakan Akuntansi Nomor 19 tentang Akuntansi Belanja pada Par. 25. menjelaskan pengukuran belanja adalah belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

4.3.13 Pengukuran Pembiayaan

Kebijakan Akuntansi Nomor 20 tentang Akuntansi Pembiayaan pada Par. 16 s.d. 17, menjelaskan pengukuran pembiayaan sebagai berikut:

- a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.14 Pengukuran Penyusutan

Kebijakan Akuntansi Nomor 22 tentang Akuntansi Penyusutan dan Amortisasi pada Par. 9. menjelaskan metode penyusutan aset tetap yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Pada Par. 22 dan 23, menjelaskan pengukuran penyusutan aset tetap setelah rehabilitasi/renovasi/*overhaul* dan atau terjadi kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Beban penyusutan terhadap aktiva tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau *overhaul* dan/atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap tersebut maka nilai penyusutan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan yang baru} = \frac{\text{Nilai Buku} + \text{Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi}}{\text{Sisa Masa Manfaat}}$$

- b. Beban penyusutan terhadap aktiva tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau *overhaul* dan/atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap dan menambah sisa masa manfaat aktiva tetap tersebut maka nilai penyusutan sebagai berikut:



$$\text{Penyusutan yang baru} = \frac{\text{Nilai Buku} + \text{Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi}}{\text{Sisa Masa Manfaat} + \text{Penambahan Masa Manfaat}}$$

4.3.15 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kebijakan Akuntansi Nomor 25 tentang Akuntansi Kas dan Setara Kas pada Par. 18, menjelaskan pengukuran kas dan setara kas adalah kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah, apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca berdasarkan nilai translasi (penjabaran) mata uang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs bank sentral pada tanggal Neraca.

4.3.16 Pengukuran Belanja/Beban Hibah

Kebijakan Akuntansi Nomor 26 tentang Akuntansi Belanja/Beban Hibah pada Par. 18, menjelaskan pengukuran belanja/beban hibah adalah belanja dan beban hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

4.3.17 Pengukuran Transfer

Kebijakan Akuntansi Nomor 27 tentang Akuntansi Transfer pada Par. 13 s.d. 16, menjelaskan pengukuran transfer sebagai berikut:

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Transfer keluar dan beban transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;
- b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4.3.18 Pengukuran Dana Cadangan

Kebijakan Akuntansi Nomor 30 tentang Akuntansi Dana Cadangan pada Par. 17 s.d. 18, menjelaskan pengukuran dana cadangan sebagai berikut:

- a. Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan;
- b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada PPKD

Secara keseluruhan, Kebijakan Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

	TA 2022	TA 2021
5.1.1 Pendapatan	1.021.771.355.235,53	1.024.368.383.734,84

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2022 dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 144 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2022 dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2022, anggaran pendapatan ditargetkan sebesar Rp1.076.341.645.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.021.771.355.235,53 atau mencapai 94,93%. Realisasi Pendapatan berasal dari Penerimaan Asli Daerah sebesar Rp54.417.747.197,53, Pendapatan Transfer sebesar Rp953.675.230.094,00, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp13.678.377.944,00 Jika dibandingkan dengan TA 2021 dan realisasi turun sebesar Rp2.597.028.499,31 atau lebih rendah 0,25%. Dalam tahun anggaran 2022 terjadi penurunan realisasi pendapatan yang signifikan pada 1 jenis serta beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp538.453.954,31 atau lebih rendah 0,98%. Hal ini, khususnya disebabkan menurunnya realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp6.444.452.815,31 atau sekitar 18,52%, penurunan ini disebabkan penurunan realisasi pada Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain serta Pendapatan BLUD.
- Dalam tahun anggaran 2022 telah dilakukan upaya intensifikasi dengan menyiapkan alat MPos pada hotel dan restoran yang memiliki omset relatif besar, melakukan penagihan secara berkala, melakukan kerjasama dengan DJP dalam hal berbagi data wajib pajak, serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, permintaan data pelanggan listrik pada PT PLN Wilayah Sulselbar;
- Dalam tahun anggaran 2022 telah dilakukan upaya ekstensifikasi dengan menyusun peta blok PBBP2, menetapkan hasil evaluasi tarif PBBP2, serta pendataan dan inventarisasi objek pajak baru PBBP2 berdasarkan peta blok terbaru;
- Pendapatan dari pelunasan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2021 sebesar Rp7.744.422.467,00;
- Untuk pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa DAK non fisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pendapatan BLUD, pendapatan transfer Dana BOS pada 139 SDN dan 28 SMP, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah yang bersumber dari penerimaan dana Kapitasi JKN pada 14 FKTP seluruhnya telah dilakukan pengesahan oleh Kuasa BUD;
- Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 romawi I, huruf C Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus



menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

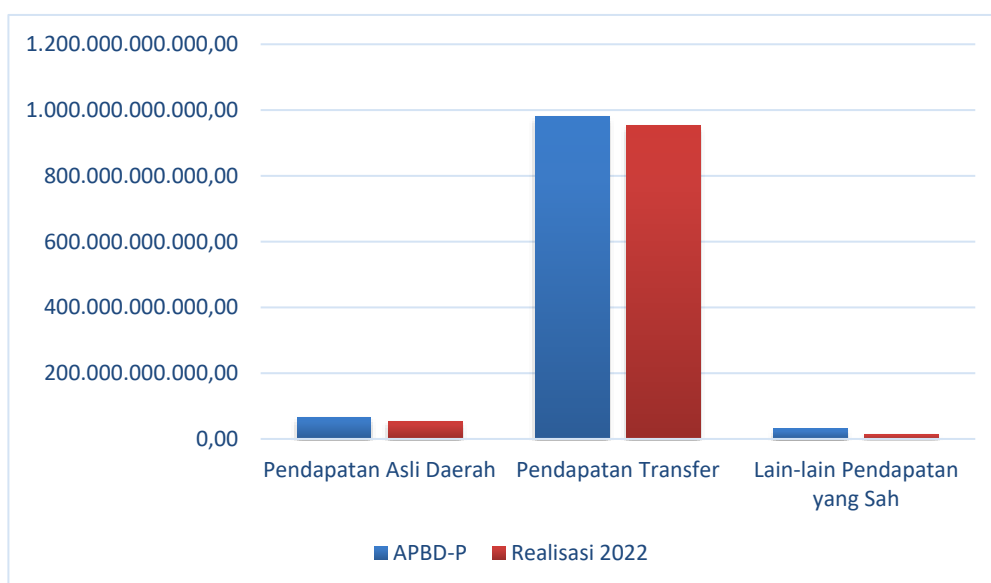
Adapun anggaran dan realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.1:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Asli Daerah	65.338.779.000,00	54.417.747.197,53	83,29	54.956.201.151,84
2	Pendapatan Transfer	980.430.700.000,00	953.675.230.094,00	97,27	924.244.895.283,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	30.572.166.000,00	13.678.377.944,00	44,74	45.167.287.300,00
Jumlah		1.076.341.645.000,00	1.021.771.355.235,53	94,93	1.024.368.383.734,84

Gambar 5.1 Komposisi Anggaran dan Realiasi TA 2022



Secara umum Pendapatan Daerah dapat digambarkan dan dilihat berdasarkan kelompok Pendapatan terhadap Total Pendapatan sebagai berikut:

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	54.417.747.197,53	54.956.201.151,84

Pada TA 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp65.338.779.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp54.417.747.197,53 atau mencapai 83,42%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp538.453.954,31 atau lebih rendah 0,98%, dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp54.956.201.151,84. Kelompok PAD ini dapat memberikan kontribusi sebesar 5,33% dari total penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53. Rincian realisasi PAD



berdasarkan kelompok penerimaan TA 2022 dan 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.2

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Pajak Daerah	10.655.430.000,00	11.726.555.924,72	110,32	9.627.712.505,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.000.028.000,00	2.163.203.270,00	72,11	1.916.197.000,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.204.038.000,00	12.171.072.548,76	99,73	8.610.923.377,48
4	Lain-lain PAD Yang Sah	39.479.283.000,00	28.356.915.454,05	71,75	34.801.368.269,36
Jumlah		65.338.779.000,00	54.417.747.197,53	83,29	54.956.201.151,84

Rincian realisasi sebagaimana tersebut di atas. secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	11.726.555.924,72	9.627.712.505,00

Dalam TA 2022 sektor penerimaan dari Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp10.655.430.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.726.555.924,72 atau mencapai 110,05%, Realisasi Pajak Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.098.843.419,72 atau lebih tinggi 21,80% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp9.627.712.505,00. Realisasi Pajak secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.3

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pajak Hotel	150.000.000,00	177.338.361,00	118,23	90.948.749,00
2	Pajak Restoran	2.820.000.000,00	2.565.945.461,24	90,99	2.248.686.041,00
3	Pajak Hiburan	25.000.000,00	30.351.900,00	121,41	36.552.000,00
4	Pajak Reklame	200.000.000,00	237.831.536,00	118,92	236.646.528,00
5	Pajak Penerangan Jalan	3.267.000.000,00	3.572.017.850,00	109,34	3.267.234.569,00
6	Pajak Air Tanah	10.930.000,00	12.370.000,00	113,17	9.237.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	1.000.000.000,00	1.872.863.453,48	187,29	704.546.790,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.055.000.000,00	2.079.358.658,00	101,19	2.030.617.701,00
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.127.500.000,00	1.178.478.705,00	104,52	1.003.243.127,00
Jumlah		10.655.430.000,00	11.726.555.924,72	110,05	9.627.712.505,00

Jenis Pendapatan Pajak Daerah ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 1,15% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.



5.1.1.1.1 Pajak Hotel

Dalam TA 2022 sektor penerimaan dari Pajak Hotel dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp177.338.361,00 atau mencapai 118,23%. Realisasi Pajak Hotel TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp86.389.612,00 atau lebih tinggi 94,99% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp90.948.749,00. Dalam realisasi Pajak Hotel secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.4

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	APBD-P	Realiasi 2022	%	Realiasi 2021
1	Cottage	48.884.500,00	48.884.500,00	100,00	21.190.500,00
2	Hotel melati satu	18.124.500,00	45.462.861,00	250,84	62.808.249,00
3	Penginapan	58.241.700,00	58.241.700,00	100,00	5.450.000,00
4	Wisma pariwisata	24.749.300,00	24.749.300,00	100,00	1.500.000,00
Jumlah		150.000.000,00	177.338.361,00	118,23	90.948.749,00

Jenis Pendapatan Pajak Daerah ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0,02% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.

5.1.1.1.2 Pajak Restoran

Dalam TA 2022 sektor penerimaan dari Pajak Restoran dianggarkan sebesar Rp2.820.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.565.945.461,24 atau mencapai 90,99%. Realisasi Pajak Restoran TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp317.259.420,24 atau lebih tinggi 14,11% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp2.248.686.041,00. Dalam realisasi Pajak Restoran secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.5

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	APBD-P	Realiasi 2022	%	Realiasi 2021
1	Catering	2.452.289.447,00	2.198.234.908,24	89,64	1.500.874.460,00
2	Restoran	72.255.244,00	72.255.244,00	100,00	46.081.827,00
3	Rumah makan	42.942.100,00	42.942.100,00	100,00	323.839.427,00
4	Warung	252.513.209,00	252.513.209,00	100,00	377.890.327,00
Jumlah		2.820.000.000,00	2.565.945.461,24	90,99	2.248.686.041,00

Jenis Pendapatan Pajak Daerah ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0,25% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.

5.1.1.1.3 Pajak Hiburan

Dalam TA 2022 sektor penerimaan dari Pajak Hiburan dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp30.351.900,00 atau mencapai 121,41%. Realisasi Pajak Hiburan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.200.100,00 atau lebih



rendah 20,43% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp36.552.000,00. Dalam realisasi Pajak Hiburan secara rinci dapat dilihat pada tabel 7.5.6

Tabel 7.5.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2022
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	APBD-P	Realiasi 2022	%	Realiasi 2021
1	Fitnes	1.800.000,00	1.800.000,00	100	1.800.000,00
2	Pameran	2.580.000,00	2.580.000,00	100	0,00
3	Permainan ketangkasan	17.020.000,00	22.371.900,00	131	31.152.000,00
4	Pertandingan olah raga	3.600.000,00	3.600.000,00	100	3.600.000,00
Jumlah		25.000.000,00	30.351.900,00	121,41	36.552.000,00

Jenis Pendapatan Pajak Daerah ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0,003% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.

5.1.1.1.4 Pajak Reklame

Dalam TA 2022 sektor penerimaan dari Pajak Reklame dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp237.831.536,00 atau mencapai 118,92%. Realisasi Pajak Reklame TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.185.008,00 atau lebih tinggi 0,50% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp236.646.528,00. Dalam realisasi Pajak Reklame secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.7

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2022
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	APBD-P	Realiasi 2022	%	Realiasi 2021
1	Kain spanduk/umbul-umbul, banner dan sejenisnya	37.011.216,00	37.011.216,00	100,00	39.674.400,00
2	Reklame berdasarkan golongan usaha	54.164.000,00	54.164.000,00	100,00	
3	Reklame billboard dan sejenisnya	3.840.000,00	3.840.000,00	100,00	
4	Reklame billboard/megatron dan sejenisnya	960.000,00	960.000,00	100,00	196.972.128,00
5	Reklame papan dan sejenisnya	104.024.784,00	141.856.320,00	136,37	
Jumlah		200.000.000,00	237.831.536,00	118,92	236.646.528,00

Jenis Pendapatan Pajak Daerah ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0,02% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.

5.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan

Dalam TA 2022 sektor penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan dianggarkan sebesar Rp3.267.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.572.017.850,00 atau mencapai 109,34%. Realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp304.783.281,00 atau lebih tinggi 9,33% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp3.267.234.569,00 Dalam realisasi Pajak Penerangan Jalan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.8:



Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri				
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3.267.000.000,00	3.572.017.850,00	109,34	3.267.234.569,00
	Jumlah	3.267.000.000,00	3.572.017.850,00	109,34	3.267.234.569,00

Jenis Pendapatan Pajak Daerah ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0,02% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.

5.1.1.1.1.6 Pajak Air Tanah

Dalam TA 2022 sektor penerimaan dari Pajak Air Tanah dianggarkan sebesar Rp10.930.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.370.000,00 atau mencapai 113,17%. Realisasi Pajak Air Tanah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.133.000,00 atau lebih tinggi 33,92% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp9.237.000,00, Realisasi Pajak Air Tanah secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.9

Tabel 7.5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Pajak Air Tanah				
	Pajak Air Tanah	10.930.000,00	12.370.000,00	113,17	9.237.000,00
	Jumlah	10.930.000,00	12.370.000,00	113,17	9.237.000,00

Jenis Pendapatan Pajak Daerah ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0,001% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.

5.1.1.1.1.7 Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan

Dalam TA 2022 sektor penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.872.863.453,48 atau mencapai 187,29%. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.168.316.663,48 atau lebih tinggi 165,83% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp704.546.790,00. Dalam realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.10

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya				
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.000.000.000,00	1.872.863.453,48	187,29	704.546.790,00
	Jumlah	1.000.000.000,00	1.872.863.453,48	187,29	704.546.790,00



Jenis Pendapatan Pajak Daerah ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0,18% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.

5.1.1.1.1.8 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Dalam TA 2022 sektor penerimaan dari Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dianggarkan sebesar Rp2.055.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.079.358.658,00 atau mencapai 101,19%, Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp48.740.957,00 atau lebih tinggi 2,40% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp2.030.617.701,00, Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan secara rinci dapat dilihat pada tabel 7.5.11

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	PBBP2				
	PBBP2	2.055.000.000,00	2.079.358.658,00	101,19	2.030.617.701,00
	Jumlah	2.055.000.000,00	2.079.358.658,00	101,19	2.030.617.701,00

Jenis Pendapatan Pajak Daerah ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0,20% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.

5.1.1.1.1.9 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dalam TA 2022 sektor penerimaan dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp1.127.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.178.478.705,00 atau mencapai 104,52%, Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp175.235.578,00 atau lebih tinggi 17,47% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp1.003.243.127,00. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.12:

Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	BPHTB-Pemberian Hak Baru				
	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.127.500.000,00	1.178.478.705,00	104,52	1.003.243.127,00
	Jumlah	1.127.500.000,00	1.178.478.705,00	104,52	1.003.243.127,00

Jenis Pendapatan Pajak Daerah ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0,12% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.



5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah **TA 2022** **2.163.203.270,00** **TA 2021** **1.916.197.000,00**

Dalam TA 2022 dianggarkan penerimaan dari sektor Retribusi Daerah sebesar Rp3.000.028.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.163.203.270,00 atau mencapai 72,11%, Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp247.006.270,00 atau lebih tinggi 12,89% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp1.916.197.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.13

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Jasa Umum	788.544.000,00	801.482.000,00	101,64	712.187.500,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.936.484.000,00	1.169.203.170,00	60,38%	1.061.493.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	275.000.000,00	192.518.100,00	70,01	119.962.500,00
Jumlah		3.000.028.000,00	2.163.203.270,00	72,11	1.916.197.000,00

Jenis Pendapatan Retribusi Daerah ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0.21% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Dalam tahun 2022 dianggarkan penerimaan dari sektor Retribusi Jasa Umum sebesar Rp788.544.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp801.482.000,00, atau mencapai 101,64%, Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp89.294.500,00 atau lebih tinggi 10,67% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp724.187.500,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.14

Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	23.840.000,00	47,68	27.931.500,00
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	330.500.000,00	382.865.000,00	115,84	310.240.000,00
c.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	177.969.000,00	175.227.000,00	98,46	188.900.000,00
d.	Retribusi Penyedotan Kakus	11.275.000,00	11.550.000,00	102,44	13.900.000,00
e.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	18.000.000,00	0	0	9.416.000,00



No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
f.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.800.000,00	208.000.000,00	103,59	173.800.000,00
jumlah		788.544.000,00	801.482.000,00	101,64	724.187.500,00

Jenis Pendapatan Retribusi jasa umum ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0.08% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Dalam tahun 2022 dianggarkan penerimaan dari sektor Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1.936.484.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.169.203.170,00 atau mencapai 60,38. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp107.710.170,00 atau lebih tinggi 9,06% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp1.072.047.000,00 secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.15

Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	1)Retribusi Penyewaan Tanah Bangunan	94.924.000,00	135.169.000,00	142,40	95.966.000,00
	- Pemakaian Alat Transportasi Laut	2.500.000,00	800.000,00	32,00	0,00
	2)Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor				
	- Retribusi Bus Angkutan Sekolah	6.200.000,00	11.600.000,00	187,1	3.600.000,00
	-Retribusi Sewa Alat Berat	92.500.000,00	62.800.000,00	67,89	82.997.000,00
	-Retribusi Lab dan Pengujian Bahan	19.500.000,00	15.930.000,00	81,69	8.400.000,00
	-Retribusi Alat Selam	30.000.000,00	12.100.000,00	40,33	12.500.000,00
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	500.000.000,00	183.407.750,00	36,7	121.899.500,00
3.	Retribusi Tempat Pelelangan				
	- Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	205.852.400,00	99.200.000,00	48,19	89.950.000,00
4.	Retribusi Terminal	93.344.000,00	13.698.000,00	14,67	20.925.000,00
5.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	11,81	10.554.000,00
6.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	260.094.000,00	30.725.000,00	11,81	54.405.000,00
7.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	629.069.600,00	603.144.420,00	95,88	570.850.500,00
8.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.500.000,00	629.000,00	25,16	0,00
Jumlah		1.936.484.000,00	1.169.203.170,00	60,38	1.072.047.000,00

Jenis Pendapatan Retribusi jasa umum ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0.08% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.



5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Dalam tahun 2022 dianggarkan penerimaan dari sektor Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp275.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp192.518.100,00 atau mencapai 70,01%. Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp72.555.600,00 atau lebih tinggi 60,48% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp119.962.500,00 secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.16

Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	275.000.000,00	192.518.100,00	70,01	119.962.500,00

Jenis Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0.02% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.

	TA 2022	TA 2021
5.1.1.1.3 Pendapatan HPKD yang Dipisahkan	12.171.072.548,76	8.610.923.377,48

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang Dipisahkan pada TA 2022 ditargetkan sebesar Rp12.204.038.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.171.072.548,76 atau mencapai 99,73%. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang Dipisahkan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.560.149.171,28 atau lebih tinggi 41,34% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp8.610.923.377,48 secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.17

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan HPKD yang Dipisahkan TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	APBD-P	Realisasi2022	%	Realisasi 2021
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD				
a. PT Bank Sulselbar	12.100.000.000,00	11.503.295.855,00	79,43	8.191.820.516,00
b. PDAM Selayar	104.038.000,00	0,00	0,00	0,00
c. PD Berdikari	0,00	0,00	0,00	0,00
d. PT. BPRPesisir Tanadoang	0,00	667.776.693,76	83,82	419.102.861,48
Jumlah	12.204.038.000,0	12.171.072.548,76	99,73	8.610.923.377,48

Jenis penerimaan ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 1,19% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.

	TA 2022	TA 2021
5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah	28.356.915.454,05	34.801.368.269,36

Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2022 ditargetkan sebesar Rp39.479.283.000,00 dan terealisasi sebesar Rp28.356.915.454,05 atau mencapai 71,83%. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang Dipisahkan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.444.452.815,31 atau lebih rendah



18,52% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp34.801.368.269,36 secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.18

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Penerimaan Jasa Giro	1.293.000.000,00	1.593.611.412,18	123,25	1.476.375.103,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.119.658.000,00	2.825.100.881,87	90,56	2.604.200.953,63
3	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	7.403.556.000,00	2.949.955.953,00	38,84	7.506.856.290,73
4	Pendapatan BLUD	27.663.069.000,00	21.004.303.207,00	75,93	23.213.935.922,00
Jumlah		39.479.283.000,00	28.356.915.454,05	71,83	34.801.368.269,36

Jenis Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 2,77% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, merupakan pendapatan atas hasil penjualan/lelang aset berupa kendaraan bermotor roda empat sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Selatar nomor 392/X/Tahun 2022;
- 2) Penerimaan Jasa Giro, merupakan pendapatan atas jasa giro pada rekening kas daerah;
- 3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan penerimaan atas temuan pemeriksaan pada LHP BPK RI maupun APIP;
- 4) Pendapatan BLUD, merupakan pendapatan BLUD pada RSUD K.H. Hayyung;
- 5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, yang terdiri dari Pendapatan Bunga, merupakan pendapatan atas bunga deposito Pemkab Kepulauan Selayar pada PT Bank Sulsebar dan Lain-lain PAD yang lainnya merupakan pendapatan yang tersaji secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.19.

Tabel 5.19 Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022
1	Penerimaan Deposito	2.256.767.119,00
2	Lebih Setor Sisa UP	17.400,00
3	Sewa Kapal Rujukan	8.229.455,00
4	Potongan Kasda	15.454.000,00
5	Pengembalian Gaji dan Honorarium	213.300.126,00
6	Bagi Hasil Pengelolaan Bank Sampah	25.000.000,00
7	Pengembalian BPJS Desa	759.816,00
8	Sisa Dana Belanja Tidak Terduga	137.504.006,00
9	Lebih Setor PBB	198.729,42
10	Denda Setoran PBB	27.733.973,58
11	Hasil Penjualan Aset Daerah	245.652.498,00



12	Pengembalian Lainnya	9.809.898,00
Jumlah		2.949.955.953,00

	TA 2022	TA 2021
5.1.1.2 Pendapatan Transfer	953.675.230.094,00	924.244.895.283,00

Pada TA 2022 dianggarkan penerimaan Pendapatan Transfer yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp980.430.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp953.675.230.094,00 atau mencapai 97,27%. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp29.430.334.811,00 atau lebih tinggi 3,18% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp924.244.895.283,00. Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 93,34% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53. Realisasi Pendapatan Transfer secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.20

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	854.797.236.000,00	830.264.598.395,00	97.13	774.854.869.641,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	73.995.426.000,00	73.995.426.000,00	100.00	106.607.680.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	51.638.038.000,00	49.415.205.699,00	95.70	42.782.345.642,00
Jumlah		980.430.700.000,00	953.675.230.094,00	97,27	924.244.895.283,00

Dari tabel realisasi sebagaimana tersebut di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

	TA 2022	TA 2021
5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	830.264.598.395,00	774.854.869.641,00

Pada TA 2022 penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yaitu Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dianggarkan sebesar Rp854.797.236.000,00 dan terealisasi sebesar Rp830.264.598.395,00 atau mencapai 97,13%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp55.409.728.754,00 atau lebih tinggi 7,15% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp774.854.869.641,00. Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 81,26% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.21:



Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Bagi Hasil Pajak	9.695.042.000,00	10.625.436.698,00	111,64	13.781.162.857,00
2	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	8.540.590.000,00	13.598.022.970,00	156,90	7.524.029.859,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	560.595.329.000,00	559.925.703.281,00	99,88	560.147.323.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	163.036.695.000,00	143.430.633.938,00	99,49	109.619.282.288,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik	112.929.580.000,00	102.684.801.508,00	100,87	83.783.071.637,00
Jumlah		854.797.236.000,00	830.264.598.395,00	97,13	774.854.869.641,00

5.1.1.1.2.3 Dana Bagi Hasil Pajak

Dalam TA 2022 dianggarkan penerimaan ini sebesar Rp9.512.421.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.625.436.698,00 atau mencapai 111,70%. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.155.726.159,00 atau lebih rendah 22,90% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp13.781.162.857,00. Jenis penerimaan ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 1,06% dari total penerimaan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.22

Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	4.808.312.000,00	5.080.785.641,00	105,67	7.698.756.019,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 21	4.704.109.000,00	5.544.651.057,00	117,87	5.884.132.789,00
3	Bagi Hasil Cukai HasilTembakau	0,00	0,00	0,00	198.274.049,00
Jumlah		9.512.421.000,00	10.625.436.698,00	111,70	13.781.162.857,00

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dalam TA 2022 penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp8.540.590.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.399.844.473,00 atau mencapai 155,88%. Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp6.073.993.111,00 atau lebih tinggi 80,73% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp7.524.029.859,00. Jenis penerimaan ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 1,31% dari total penerimaan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53. Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.23



**Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam TA 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Bagi Hasil Cukai HasilTembakau	182.621.000,00	198.178.497,00	108,52	0,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	702.666.000,00	1.613.884.287,00	229,68	1.195.798.568,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (<i>Land-Rent</i>)	5.844.371.000,00	9.769.505.740,00	167,16	4.794.055.406,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	35.242.000,00	58.143.446,00	164,98	37.515.547,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.496.660.338,00
Jumlah		8.723.211.000,00	13.598.022.970,00	155,88	7.524.029.859,00

5.1.1.2.1.1 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dari Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah. Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menganggarkan penerimaan DAU sejumlah Rp560.595.329.000,00 dan terealisasi sebesar Rp559.925.703.281,00 atau mencapai 99,88%. Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2022 mengalami penurunan sebesar -221.619.719,00 atau lebih rendah 0,04% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp560.147.323.000,00. Jenis penerimaan ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 54,80% dari total penerimaan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.

5.1.1.2.1.1 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membiayai kebutuhan khusus (*specific grant*) secara fisik dan non fisik. Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menganggarkan penerimaan DAK sebesar Rp275.966.275.000,00 dan terealisasi sebesar Rp246.115.435.446,00 atau mencapai 89,18%. Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp52.713.081.521,00 atau lebih tinggi 27,26% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp193.402.353.925,00. Jenis penerimaan DAK ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 24,09% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53. Realisasi Dana Alokasi Khusus secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.24

Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
DAK Fisik					
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.629.430.000,00	2.627.952.000,00	99,94	550.065.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.968.165.000,00	2.967.342.100,00	99,97	14.971.508.329,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.753.345.000,00	4.252.803.530,00	89,47	3.175.284.850,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	231.794.000,00	224.897.500,00	97,02	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	196.476.000,00	189.000.000,00	96,19	304.781.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.808.354.000,00	3.530.614.571,00	92,71	1.787.918.644,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	24.447.170.000,00	21.994.694.238,00	89,97	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	66.871.000,00	66.871.000,00	100,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	531.387.000,00	475.888.592,00	89,56	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00%	24.861.807.700,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	21.731.288.512,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	72.221.544.000,00	57.037.525.584,00	78,98	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	23.739.948.000,00	23.506.918.154,00		11.751.124.400,00
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	3.600.694.000,00	3.599.340.820,00		
16	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	7.194.784.420,00
17	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	3.039.739.000,00	2.971.625.095,00	97,76	2.131.042.650,00
18	DAK Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.865.724.000,00	2.859.131.157,00	99,77	2.549.483.750,00
19	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	6.435.612.000,00	6.409.581.125,00	99,6	0,00
20	DAK-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.891.103.000,00	1.313.509.400,00	69,46	1.069.850.000,00
21	DAK Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	1.048.601.000,00	1.048.570.000,00	100,00	1.621.036.000,00
22	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	7.466.485.000,00	7.357.841.276,00	98,54	2.719.500.000,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
23	DAK Bidang Keluarga Berencana	1.094.253.000,00	996.527.796,00	91,07	13.199.807.033,00
	Sub Jumlah	163.036.695.000,00	143.430.633.938,00		109.619.282.288,00
DAK Non Fisik					
1	Bantuan Operasional Sekolah Regular	23.694.350.000,00	21.184.204.325,00	89,41	511.287.000,00
2	Bantuan Operasional Sekolah Kinerja	1.040.000.000,00	680.000.000,00	65,38	0,00
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	50.176.135.000,00	50.176.135.000,00	100,00	52.794.063.000,00
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.719.000.000,00	994.999.500,00	57,88	900.000.000,00
5	Tunjangan Khusus Guru	5.695.800.000,00	5.695.800.000,00	100,00	6.500.462.700,00
6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	4.139.770.000,00	3.173.244.000,00	76,65	3.232.800.000,00
7	BOP Pendidikan Kesetaraan	1.612.400.000,00	1.648.100.000,00	102,21	2.039.500.000,00
8	BOP Museum dan Taman Budaya	700.000.000,00	694.773.810,00	99,25	591.037.756,00
9	Bantuan Operasional Kesehatan	17.057.063.000,00	13.035.213.210,00	76,42	10.325.753.554,00
10	Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	847.635.000,00
11	Jaminan Persalinan	115.272.000,00	0,00	0,00	507.805.000,00
12	Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	0,00	485.334.000,00
13	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.716.350.000,00	1.640.730.463,00	60,4	3.085.603.437,00
14	PK2UKM	2.341.961.000,00	2.341.961.000,00	100,00	0,00
15	Bantuan Operasional Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	938.186.190,00
16	Pelayanan Kepariwisata	1.121.209.000,00	1.067.650.100,00	95,22	862.318.000,00
17	Dana Bantuan BLPS	393.394.000,00	351.990.100,00	89,48	161.286.000,00
	Sub Jumlah	112.929.580.000,00	102.684.801.508,00		83.783.071.637,00
	Jumlah	275.966.275.000,00	246.115.435.446,00	89,18	193.402.353.925,00

	TA 2022	TA 2021
5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	73.995.426.000,00	106.607.680.000,00

Pada TA 2022 terdapat penerimaan dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Insentif Daerah (DID) yang dianggarkan sebesar Rp73.995.426.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp73.995.426.000,00 atau mencapai 100 %. Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp18.134.944.000,00 atau lebih rendah 86,01% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp21.085.165.000,00. Selain itu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya juga bersumber dari Dana Desa yang dianggarkan sebesar Rp71.045.205.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp71.045.205.000,00 atau mencapai 100% dari target penerimaan. Realisasi Dana Desa TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp14.477.310.000,00 atau lebih rendah 16,93% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp85.522.515.000,00. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa tanpa melalui RKUD. Pencatatan penerimaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Tahun Anggaran 2022. Jenis penerimaan ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 7,24% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.25

Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Dana Insentif Daerah	2.950.221.000,00	2.950.221.000,00	100,00	21.085.165.000,00
2	Dana Desa	71.045.205.000,00	71.045.205.000,00	100,00	85.522.515.000,00
Jumlah		73.995.426.000,00	73.995.426.000,00	100,00	106.607.680.000,00

5.1.1.2.3

Pendapatan Transfer Antar Daerah

	TA 2022	TA 2021
	49.415.205.699,00	42.782.345.642,00

Pada TA 2022 penerimaan dari Transfer Antar Daerah, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.965.699.296,00 atau mencapai 99,90%. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.273.353.654,00 atau lebih tinggi 10,33% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp31.692.345.642,00, serta pendapatan dari Bantuan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp16.638.038.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.449.506.403,00 atau mencapai 86,85%. Realisasi Bantuan Keuangan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.359.506.403,00 atau lebih tinggi 30,29% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp11.090.000.000,00. Sehingga memberikan kontribusi sebesar 4,84% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53. Realisasi Pendapatan dari Bantuan Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.26

Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35.000.000.000,00	34.965.699.296,00	99,90	31.692.345.642,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/Bantuan Keuangan	16.638.038.000,00	14.449.506.403,00	86,85	11.090.000.000,00
Jumlah		51.638.038.000,00	49.415.205.699,00	95,70	42.782.345.642,00

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 34.965.699.296,00 31.692.345.642,00

Pada TA 2022, penerimaan dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp35.000.000.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 direalisasikan sebesar Rp34.965.699.296,00 atau mencapai 99,90%. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.273.353.654,00 atau lebih tinggi 10,33% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp31.692.345.642,00 sehingga memberikan kontribusi sebesar 3,42% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.27



Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000.000,00	7.074.211.236,00	70,74	9.567.904.872,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan bermotor	4.500.000.000,00	5.901.142.494,00	131,14	4.448.142.689,00
3	Bagi Hasil dari pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.700.000.000,00	11.677.085.178,00	151,65	7.610.595.615,00
4	Bagi Hasil dari Pemanfaatan Air Permukaan tanah	1.226.392.465,00	60.109.366,00	4,90	41.087.168,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	11.573.607.535,00	10.253.151.022,00	88,59	10.024.615.298,00
Jumlah		35.000.000.000,00	34.965.699.296,00	99,90	31.692.345.642,00

5.1.1.2.3.2

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/Bantuan Keuangan

TA 2022	TA 2021
14.449.506.403,00	11.090.000.000,00

Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menganggarkan penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/Bantuan Keuangan sejumlah Rp16.638.038.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.449.506.403,00 atau mencapai 86,85%. Realisasi Bantuan Keuangan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.359.506.403,00 atau lebih tinggi 30,29% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp11.090.000.000,00 dari target penerimaan. Jenis penerimaan ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 1,41% dari total penerimaan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53. Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.26.

5.1.1.3

Lain-lain Pendapatan yang Sah

TA 2022	TA 2021
13.678.377.944,00	45.167.287.300,00

Pada TA 2022, penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah, yaitu Pendapatan Lainnya dianggarkan sebesar Rp30.572.166.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2022 direalisasikan sebesar Rp13.678.377.944,00 atau mencapai 44,74%. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp31.488.909.356,00 atau lebih rendah 69,72% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp45.167.287.300,00 dari target penerimaan. Jenis penerimaan ini memberikan kontribusi sebesar 1,34% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.

Penurunan Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada TA 2022 disebabkan reklasifikasi Pendapatan Transfer Dana Desa dari Lain-lain Pendapatan Daerah Lainnya pada TA 2021 menjadi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya di TA 2022. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.28

Tabel 5.28 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Hibah	0	0	00,00	7.340.400.000,00
2	Pendapatan Lainnya	30.572.166.000,00	13.678.377.944,00	0	37.826.887.300,00



Jumlah	30.572.166.000,00	13.678.377.944,00	44,74%	45.167.287.300,00
--------	-------------------	-------------------	--------	-------------------

TA 2022

TA 2021

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	7.340.400.000,00
--	------	------------------

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menganggarkan penerimaan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan realisasi sebesar Rp0,00 Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp7.340.400.000,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp7.340.400.000,00 dari target penerimaan. Jenis penerimaan ini memberikan kontribusi sebesar 0,00% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53.

TA 2022

TA 2021

5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya	13.678.377.944,00	37.826.887.300,00
------------------------------	-------------------	-------------------

Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menganggarkan penerimaan Pendapatan Lainnya sejumlah Rp30.572.166.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.678.377.944,00 atau mencapai 44,74% dari target penerimaan. Realisasi Pendapatan Lainnya TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp24.148.509.356,00 atau lebih rendah 63,84% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp37.826.887.300,00 dari target penerimaan. Jenis penerimaan ini memberikan kontribusi sebesar 1,34% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.021.771.355.235,53. Realisasi Pendapatan Lainnya secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.29.

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lainnya TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Lainnya (Dana BOS)	0	0	0	23.737.195.000,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP	30.572.166.000,00	13.678.377.944,00	44,74	14.089.692.300,00
Jumlah		30.572.166.000,00	13.678.377.944,00	44,74	37.826.887.300,00

Rincian Pendapatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional masing-masing sebesar Rp11.968.847.860,00 dan sebesar Rp1.686.097.700,00 yang diterima melalui 14 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.30.

Tabel 5.30 Rincian Realisasi Pendapatan JKN TA 2022

(dalam Rupiah)

No	FKTP	Realisasi sampai dengan 31/12/2021		Realisasi sampai dengan 31/12/2022	
		Kapitasi	Non Kapitasi	Kapitasi	Non Kapitasi
1	Puskesmas Parangia	661.314.000,00	71.292.542,86	648.922.317,00	52.721.000,00
2	Puskesmas Bontomatene	400.023.450,00	114.692.542,86	437.145.050,00	92.816.000,00
3	Puskesmas Buki	740.680.000,00	124.662.542,86	736.630.000,00	125.061.000,00
4	Puskesmas Polebunging	636.790.000,00	66.582.542,86	601.740.000,00	44.645.000,00



(dalam Rupiah)

No	FKTP	Realisasi sampai dengan 31/12/2021		Realisasi sampai dengan 31/12/2022	
		Kapitasi	Non Kapitasi	Kapitasi	Non Kapitasi
5	Puskesmas Barugaia	471.839.650,00	98.647.542,86	478.855.200,00	90.607.500,00
6	Puskesmas Benteng	1.338.007.500,00	185.547.542,86	1.338.130.373,00	249.830.500,00
7	Puskesmas Bontosunggu	1.218.140.000,00	136.927.542,86	1.163.280.000,00	165.811.000,00
8	Puskesmas Bontosikuyu	877.680.000,00	144.702.542,86	911.050.000,00	97.400.000,00
9	Puskesmas Lowa	819.920.000,00	85.244.642,86	808.450.000,00	68.840.000,00
10	Puskesmas Benteng Jampea	906.410.000,00	162.362.542,86	826.210.109,00	225.275.000,00
11	Puskesmas Ujung Jampea	879.090.000,00	68.882.542,86	787.000.000,00	71.070.000,00
12	Rumah Sakit Pratama	0,00	0,00	132.448.000,00	31366700
13	Puskesmas Pasimarannu	1.142.450.000,00	259.577.542,86	1.106.352.206,00	216.637.500,00
14	Puskesmas Pasitallu	1.420.302.000,00	120.267.542,86	1.227.988.041,00	51.330.000,00
15	Puskesmas Pasilambena	890.948.000,00	46.707.542,86	764.646.564,00	45.204.000,00
	Jumlah	12.403.594.600,00	1.686.097.700,00	11.968.847.860,00	1.628.615.200

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.1.2 Belanja	863.006.799.406,52	868.542.340.261,50

Pada TA 2022, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.006.951.205.926,00 sampai dengan pelaksanaan akhir Tahun 2022 dapat direalisasi sebesar Rp863.006.799.406,52 atau mencapai 85,70%. Realisasi Belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.535.540.854,98 atau lebih rendah 0,64% dibandingkan TA 2021 sebesar Rp868.542.340.261,50 dalam realisasi belanja.

Berdasarkan realisasi belanja menurut Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan OPD dengan realisasi belanja tertinggi, yaitu sebesar Rp233.260.568.096,00 atau 27,03% dari total realisasi Belanja. Sedangkan Kecamatan Pasilambena merupakan OPD dengan realisasi terendah yaitu sebesar Rp1.353.194.067,00 atau 0,16% dari total realisasi Belanja TA 2022. Dalam tahun anggaran 2022 tidak terjadi pergeseran anggaran setelah pengesahan APBD perubahan. Dalam tahun anggaran 2022 terjadi beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut:

- a. Adanya penurunan realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.354.856.374,50, hal ini dikarenakan semakin menurunnya jumlah kasus COVID 19 dan penanganan dampak bencana gempa bumi pada dua kecamatan kepulauan yang penganggarnya telah dialokasikan pada program/kegiatan pada OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan wajib terkait pelayanan dasar dibidang kesehatan, penanggulangan bencana dan perumahan;
- b. Adanya kesalahan penganggaran kelompok belanja modal yang sebelumnya dianggarkan pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang jasa atau sebaliknya pada 4 OPD, dengan uraian: Pengadaan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin,



Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, RSUD, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan nilai total sebesar Rp3.913.372.283,00.

- c. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dana Desa dianggarkan pada kelompok belanja transfer jenis belanja bantuan keuangan sebesar Rp71.045.205.000,00, belanja Dana desa tersebut bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

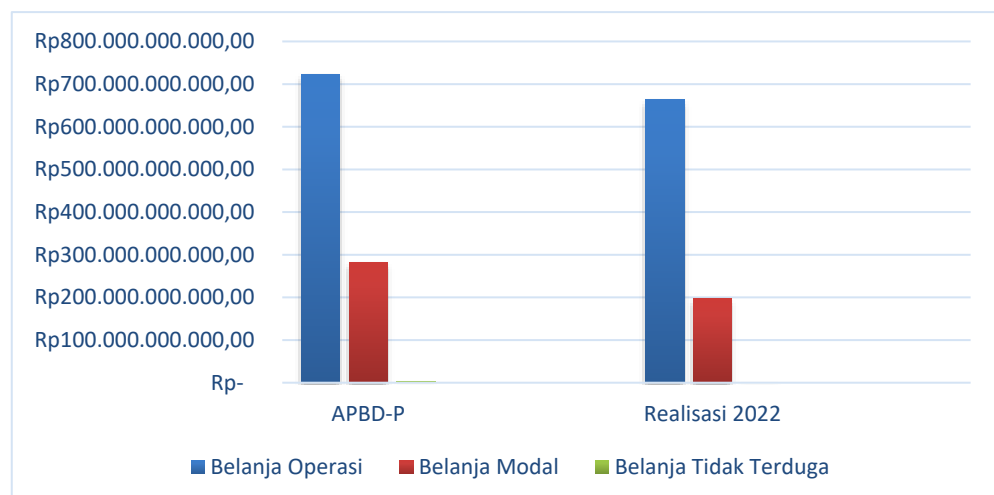
Uraian di bawah ini belanja akan dijelaskan berdasarkan struktur belanja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Realisasi Belanja secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.31

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Operasi	722.556.709.386,00	664.869.638.253,52	92,02	696.515.962.801,00
2	Belanja Modal	282.144.496.540,00	196.692.630.353,00	69,71	169.226.990.286,00
3	Belanja Tidak Terduga	2.250.000.000,00	1.444.530.800,00	64,20	2.799.387.174,50
Jumlah		1.006.951.205.926,00	863.006.799.406,52	85,70	868.542.340.261,50

Gambar 5.1.2 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022



Secara sistematis anggaran Belanja TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:



5.1.2.1	Belanja Operasi	TA 2022	TA 2021
		664.869.638.253,52	696.515.962.801,00

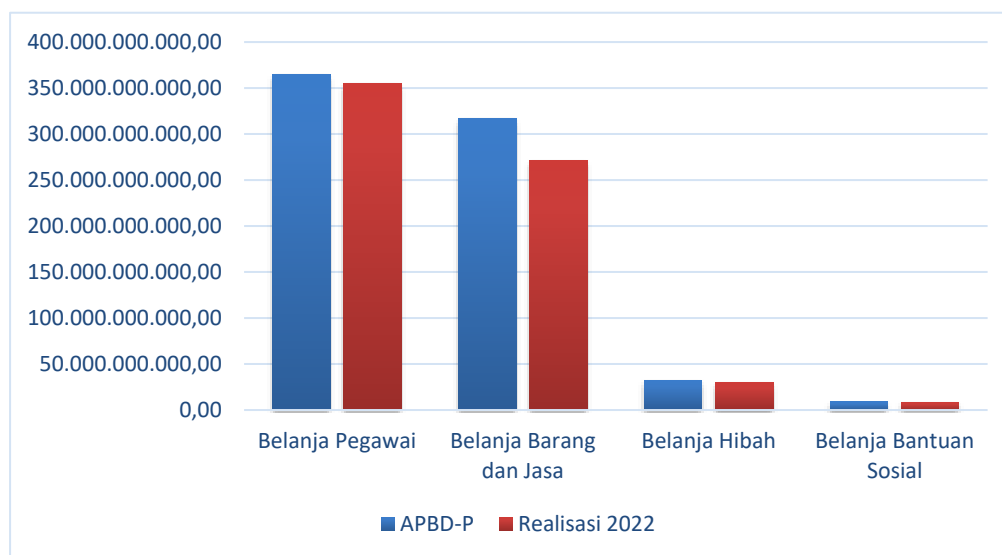
Pada TA 2022, Belanja Operasi merupakan belanja yang terkait dengan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp722.556.709.386,00 dan terealisasi sebesar Rp664.869.638.253,52 atau mencapai 92,02%. Realisasi Belanja Operasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp31.646.324.547,48 atau lebih rendah 4,54% dibandingkan dengan belanja Operasi Tahun 2021 sebesar Rp696.515.962.801,00. Jenis Belanja ini dapat menyerap dana sebesar 77,04% dari total belanja secara keseluruhan sebesar Rp863.006.799.406,52. Secara sistematis anggaran Belanja Operasi TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.32.

Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Pegawai	364.901.803.234,00	354.916.349.730,52	97,26	388.642.494.866,00
2	Belanja Barang dan Jasa	316.962.013.858,00	271.167.735.291,00	85,55	265.189.139.446,00
3	Belanja Hibah	31.903.258.994,00	30.327.841.932,00	95,06	35.351.199.489,00
4	Belanja Bantuan Sosial	8.789.633.300,00	8.457.711.300,00	96,22	7.333.129.000,00
Jumlah		722.556.709.386,00	664.869.638.253,52	92,02	696.515.962.801,00

Gambar 5.1.2.1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi





	TA 2022	TA 2021
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	354.916.349.730,52	388.642.494.866,00

Pada TA 2022, Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp364.901.803.234,00 dan terealisasi sebesar Rp354.916.349.730,52 atau mencapai 97,26%. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp33.726.145.135,48 atau lebih rendah 8,68% dibandingkan dengan belanja Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp388.642.494.866,00 Jenis Belanja Pegawai memberikan kontribusi sebesar 41,13% atas total belanja secara keseluruhan sebesar Rp863.006.799.406,52. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.33.

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	252.137.606.624,00	247.897.749.386,00	98,32	243.852.459.656,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	82.953.883.054,00	78.741.054.999,00	94,92	114.482.815.383,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.679.222.483,00	5.451.199.229,00	95,98	4.573.209.461,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.153.364.815,00	10.898.024.904,00	97,71	11.537.501.953,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	295.095.898,00	271.578.101,00	92,03	222.241.809,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.880.000,00	100,00	580.599.994,00
7	Belanja Pegawai Dana BOS	0,00	0,00	00,00	3.275.848.000,00
8	Belanja Pegawai BLUD	12.171.750.360,00	11.145.863.111,52	91,57	10.117.818.610,00
	Jumlah	364.901.803.234,00	354.916.349.730,52	97,26	388.642.494.866,00

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan

Pada TA 2022, Belanja gaji dan tunjangan dianggarkan sebesar Rp252.137.606.624,00 dan terealisasi sebesar Rp247.897.749.386,00 atau mencapai 98,32%. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp4.045.289.730,00 atau lebih tinggi 1,66% dibandingkan dengan belanja Tahun 2021 sebesar Rp243.852.459.656,00. Jenis Belanja Gaji dan Tunjangan memberikan kontribusi sebesar 28,72% atas total belanja secara keseluruhan sebesar Rp863.006.799.406,52. Anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.34.

Tabel 5.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Gaji Pokok ASN	185.042.667.514,00	183.135.579.701,00	98,97	182.271.549.383,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	177.460.686.514,00	176.292.489.901,00	99,34	179.219.646.583,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	7.581.981.000,00	6.843.089.800,00	90,25	3.051.902.800,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.885.254.276,00	15.523.237.251,00	97,72	15.400.799.130,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.187.752.376,00	14.997.702.957,00	98,75	15.365.897.688,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	697.501.900,00	525.534.294,00	75,35	34.901.442,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.469.980.000,00	5.356.955.904,00	97,93	6.497.821.948,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.394.779.000,00	13.210.640.272,00	98,63	11.849.487.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.394.779.000,00	13.210.640.272,00	98,63	11.849.487.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.791.036.034,00	2.616.079.548,00	93,73	2.560.270.720,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.352.530.000,00	2.184.989.548,00	92,88	2.532.620.720,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	438.506.034,00	431.090.000,00	98,31	27.650.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.111.442.360,00	9.927.993.102,00	98,19	9.846.092.303,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.679.339.000,00	9.503.829.162,00	98,19	9.817.486.403,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	432.103.360,00	424.163.940,00	98,16	28.605.900,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	230.518.624,00	211.784.882,00	91,87	184.865.895,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.400.000,00	2.573.244,00	58,48	2.597.161,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.140.000,00	2.478.564,00	59,87	2.590.843,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	260.000,00	94.680,00	36,42	6.318,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.485.745.465,00	11.084.547.237,00	96,51	12.078.139.394,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.124.022.465,00	10.766.367.599,00	96,78	11.996.367.720,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	361.723.000,00	318.179.638,00	87,96	81.771.674,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	529.200.000,00	409.266.995,00	77,34	742.320.127,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	508.038.640,00	393.883.067,00	77,53	736.460.675,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	21.161.360,00	15.383.928,00	72,70	5.859.452,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.296.783.351,00	1.135.870.350,00	87,59	751.754.495,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.234.300.000,00	1.089.720.510,00	88,29	734.176.768,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	62.483.351,00	46.149.840,00	73,86	17.577.727,00
12	Belanja Tunjangan Khusus	5.895.800.000,00	5.283.220.900,00	89,61	1.666.762.100,00
	Jumlah	252.137.606.624,00	247.897.749.386,00	98,32	243.852.459.656,00



5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Tambahan Penghasilan PNS dianggarkan sebesar Rp82.953.883.054,00 dan terealisasi sebesar Rp78.741.054.999,00 atau mencapai 94,92%. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp9.157.842.227,00 atau lebih tinggi sebesar 13,16% dibandingkan dengan belanja Tahun 2021 sebesar Rp69.583.212.772,00. Belanja Tambahan Penghasilan PNS memberikan kontribusi sebesar 9,12% atas total belanja secara keseluruhan sebesar Rp863.006.799.406,52. Anggaran dan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.35.

Tabel 5.35 Anggaran dan Ralisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	28.719.846.434,00	26.960.859.805,00	93,88	0,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	319.884.000,00	315.026.253,00	98,48	0,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	684.673.860,00	666.803.455,00	97,39	4.855.136.615,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	53.187.477.760,00	50.759.738.536,00	95,44	59.959.555.721,00
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	42.001.000,00	38.626.950,00	91,97	4.768.520.436,00
Jumlah		82.953.883.054,00	78.741.054.999,00	94,92	69.583.212.772,00

5.1.2.1.1.3 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp5.679.222.483,00 dan terealisasi sebesar Rp5.451.199.229,00 atau mencapai 95,98%. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp877.989.768,00 atau lebih tinggi sebesar 19,20% dibandingkan dengan belanja Tahun 2021 sebesar Rp4.573.209.461,00. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN memberikan kontribusi sebesar 0,63% atas total belanja secara keseluruhan sebesar Rp863.006.799.406,52. Anggaran dan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.36

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	342.396.705,00	287.052.102,00	83,84	195.547.228,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	6.525.000,00	4.893.750,00	75,00	1.270.774,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	122.670.000,00	92.002.500,00	75,00	57.224.240,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.087.500,00	1.087.500,00	100,00	978.750,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00	5.220.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	475.455,00	475.455,00	100,00	338.517,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	57.500.000,00	57.389.006,00	99,81	15.873.150,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	96.392.500,00	73.457.641,00	76,21	77.857.109,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	49.046.250,00	49.046.250,00	100,00	36.784.688,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	109.861.322,00	55.150.787,00	50,20	47.193.233,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.380.000,00	14.376.750,00	99,98	9.809.250,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.750.000,00	5.806.239,00	74,92	2.574.661,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	2.006.438,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	500.000,00	367.847,00	73,57	490.462,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	783.000,00	0,00	0,00	668.812,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	8.800.000,00	8.734.800,00	99,26	5.016.094,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	9.046.799,00	4.341.255,00	47,99	4.180.076,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.000.500,00	1.000.500,00	100,00	1.025.512,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	2.507.092,00	0,00	0,00	0,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.697.792,00	0,00	0,00	523.344,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	27.365.000,00	20.523.396,00	75,00	18.892.146,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	11.962.500,00	0,00	0,00	2.006.438,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	268.639,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Honorarium	5.226.964.456,00	5.108.996.340,00	97,74	3.896.079.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.090.284.456,00	4.988.886.340,00	98,01	3.746.774.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	45.680.000,00	29.360.000,00	64,27	57.055.000,00
	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	91.000.000,00	90.750.000,00	99,73	92.250.000,00
4	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	434.390.000,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	228.830.000,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	205.560.000,00
	Jumlah	5.679.222.483,00	5.451.199.229,00	95,98	4.573.209.461,00

5.1.2.1.1.4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dianggarkan sebesar Rp11.153.364.815,00 dan terealisasi sebesar Rp10.898.024.904,00 atau mencapai 97,71%. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD mengalami penurunan sebesar Rp639.477.049,00 atau lebih rendah 5,54% dari realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2021 sebesar Rp11.537.501.953,00. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD memberikan kontribusi sebesar 1,26% atas total belanja secara keseluruhan sebesar Rp863.006.799.406,52. Anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.37.

Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Uang Representasi DPRD	661.558.000,00	561.540.000,00	84,88	554.505.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	79.000.000,00	38.526.600,00	48,77	35.532.000,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	50.000.000,00	49.824.960,00	99,65	47.435.100,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
4	Belanja Uang Paket DPRD	50.000.000,00	48.132.000,00	96,26	47.596.500,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.300.000,00	814.233.000,00	99,99	804.032.250,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	78.000.000,00	77.830.200,00	99,78	76.003.200,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.100.000,00	12.606.300,00	96,23	12.606.300,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.100.000,00	1.890.000.000,00	99,99	3.118.500.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	100,00	787.500.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	36.967.769,00
11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	999.815,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.503.600.000,00	3.500.831.844,00	99,92	2.542.463.834,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	62.000.000,00	60.611.172,00	97,76	61.547.594,00
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.000.000,00	1.155.168,00	57,76	1.141.560,00
	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.000.000,00	3.465.504,00	86,64	3.424.680,00
	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.435.600.000,00	3.435.600.000,00	100,00	2.476.350.000,00
13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.432.000.000,00	3.432.000.000,00	100,00	3.471.000.000,00
14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	108.207.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00
	Jumlah	11.153.364.815,00	10.898.024.904,00	97,71	11.537.501.953,00

5.1.2.1.1.5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp295.095.898,00 dan terealisasi sebesar Rp271.578.101,00 atau mencapai 92,03%. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH mengalami peningkatan sebesar Rp49.336.292,00 atau lebih tinggi 22,20% dari realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2021 sebesar Rp222.241.809,00. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH memberikan kontribusi sebesar 0,03% atas total belanja secara keseluruhan sebesar Rp863.006.799.406,52. Anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.38.

Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.716.025,00	55.586.400,00	94,67	54.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.700.000,00	6.636.000,00	99,04	6.636.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.000.000,00	98.280.000,00	98,28	98.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.100.000,00	5.214.240,00	85,48	6.083.280,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	53.400.000,00	53.153.988,00	99,54	15.465.226,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.000,00	1.680,00	33,60	1.840,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.700.000,00	4.557.600,00	79,96	3.646.080,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	150.000,00	93.600,00	62,40	74.880,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	350.000,00	280.800,00	80,23	224.640,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	48.024.795,00	39.859.169,00	83,00	30.178.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	975.000,00	731.250,00	75,00	189.881,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	18.330.000,00	13.747.500,00	75,00	8.550.748,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	162.500,00	162.500,00	100,00	146.250,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	780.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	71.045,00	71.044,00	100,00	50.583,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	2.371.850,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	13.357.500,00	10.018.125,00	75,00	12.592.125,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7.328.750,00	7.328.750,00	100,00	5.496.563,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	15.950.078,00	7.914.624,00	49,62	7.051.863,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.148.250,00	2.148.250,00	100,00	1.465.750,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.157.000,00	867.599,00	74,99	384.719,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	299.813,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	98.605,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	89.176,00	54.966,00	61,64	73.288,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang	99.938,00	0,00	0,00	99.938,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.065.175,00	978.900,00	91,90	749.531,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	1.351.820,00	648.695,00	47,99	624.609,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan				
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	1.452.944,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	153.238,00	149.500,00	97,56	153.237,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	457.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	104.268,00	0,00	0,00	78.201,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	3.763.952,00	3.066.714,00	81,48	2.822.964,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	19.987,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	1.998.750,00	0,00	0,00	299.813,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	39.975,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	295.095.898,00	271.578.101,00	92,03	222.241.809,00

5.1.2.1.1.6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp510.880.000,00 dan terealisasi sebesar Rp510.880.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH mengalami penurunan sebesar Rp69.719.994,00 atau lebih rendah 12,01% dari realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2021 sebesar Rp580.599.994,00. Anggaran dan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.39.

Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	180.600.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	399.999.994,00



Jumlah	510.880.000,00	510.880.000,00	100,00	580.599.994,00
---------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------

5.1.2.1.1.7 Belanja Pegawai Dana BOS

Dalam TA 2022, Belanja Pegawai Dana BOS tidak dianggarkan karena seluruhnya telah dianggarkan dalam belanja barang jasa Dana BOS. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Dana BOS secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.40.

Tabel 5.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dana BOS TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	3.275.848.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	3.275.848.000,00

5.1.2.1.1.8 Belanja Pegawai BLUD

Dalam TA 2022, Belanja Pegawai BLUD dianggarkan sebesar Rp12.171.750.360,00 dan terealisasi sebesar Rp11.145.863.111,52 atau mencapai 91,57%. Realisasi Belanja Pegawai BLUD mengalami peningkatan sebesar Rp1.028.044.501,52 atau lebih tinggi 10,16% dari realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2021 sebesar Rp10.117.818.610,00. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai BLUD secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.41.

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Belanja Pegawai BLUD	12.171.750.360,00	11.145.863.111,52	91,57	10.117.818.610,00
	Jumlah	12.171.750.360,00	11.145.863.111,52	91,57	10.117.818.610,00

5.1.2.1.2

Belanja Barang dan Jasa

	TA 2022	TA 2021
	271.167.735.291,00	265.189.139.446,00

Dalam TA 2022, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp316.962.013.858,00 dan terealisasi sebesar Rp271.167.735.291,00 atau mencapai 85,55%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan sebesar Rp5.978.595.845,00 atau lebih tinggi 2,25% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp265.189.139.446,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.42.

Tabel 5.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Barang	43.144.589.242,00	36.686.367.247,00	85,03%	38.123.158.527,00
2	Belanja Jasa	130.973.974.323,00	115.049.715.236,00	87,84%	133.319.394.056,00
3	Belanja Pemeliharaan	15.354.505.374,00	14.148.710.581,00	92,15%	10.762.018.973,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
4	Belanja Perjalanan Dinas	63.692.507.012,00	58.689.435.523,00	92,13%	50.782.865.567,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.490.020.000,00	11.372.920.000,00	98,98%	3.901.114.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	26.004.427.830,00	22.699.288.703,00	87,29%	16.380.225.323,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	26.301.990.077,00	12.521.298.001,00	47,61%	11.920.363.000,00
Jumlah		316.962.013.858,00	271.167.735.291,00	85,54%	265.189.139.446,00

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.1.2.1.2.1 Belanja Barang	36.686.367.247,00	38.123.158.527,00

Dalam TA. 2022, Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp43.144.589.242,00 dan terealisasi sebesar Rp36.686.367.247,00 atau mencapai 85,03%. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp1.436.791.280,00 atau lebih rendah 3,77% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp38.123.158.527,00. Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis TA 2022 sebesar Rp36.686.367.247,00 dan Belanja Barang Pakai Habis TA 2021 sebesar Rp38.123.158.527,00. Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2022 sebesar Rp0,00 dan Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2021 sebesar Rp402.063.900,00.

5.1.2.1.2.1.1 Belanja Barang Pakai Habis

Dalam TA.2022, Belanja Barang Pakai Habis dianggarkan sebesar Rp43.144.589.242,00 dan terealisasi sebesar Rp36.686.367.247,00 atau mencapai 85,03%. Realisasi Belanja Barang Pakai Habis mengalami penurunan sebesar Rp1.034.727.380,00 atau lebih rendah 2,74% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp37.721.094.627,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Pakai Habis secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.43.

Tabel 5.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	169.375.500,00	169.160.498,00	99,87	131.541.700,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	663.723.098,00	159.834.609,00	24,08	238.199.250,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.532.990.828,00	1.365.180.265,00	89,05	1.604.597.198,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	7.651.000,00	7.566.500,00	98,90	0,00
5	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	0,00	0,00	0,00	112.399.200,00
6	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	73.515.000,00	69.660.000,00	94,76	1.870.130.000,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.000.000,00	7.000.000,00	87,50	22.100.000,00
8	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	21.000.000,00	20.973.000,00	99,87	0,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
9	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	20.750.000,00	20.750.000,00	100,00	12.000.000,00
10	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.048.024.692,00	801.742.148,00	76,50	572.180.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.615.789.943,00	7.229.472.818,00	83,91	7.231.224.988,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	157.185.000,00	138.369.000,00	88,03	0,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.224.036.384,00	3.870.493.346,00	91,63	4.073.696.233,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	91.040.000,00	75.304.000,00	82,72	33.554.000,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	429.468.000,00	425.081.000,00	98,98	32.555.000,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	880.569.940,00	615.017.594,00	69,84	802.128.109,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	301.741.000,00	277.107.500,00	91,84	131.646.000,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	45.600.000,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	46.500.000,00	46.500.000,00	100,00	20.450.000,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	874.781.000,00	533.990.560,00	61,04	1.488.485.015,00
22	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.643.886.418,00	3.977.527.146,00	70,47	3.609.269.493,00
23	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.779.016.049,00	1.506.975.866,00	84,71	2.282.269.741,00
24	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.157.978.190,00	1.155.574.240,00	99,79	0,00
26	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	133.100.000,00	133.100.000,00	100,00	0,00
27	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.079.294.000,00	1.070.167.736,00	99,15	545.367.400,00
28	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	43.427.200,00	43.427.200,00	100,00	20.710.000,00
29	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.947.267.000,00	7.201.692.000,00	90,62	6.921.851.000,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.619.075.000,00	3.545.410.000,00	97,96	2.883.482.800,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
31	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	87.696.000,00	87.696.000,00	100,00	213.207.000,00
32	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	704.281.000,00	368.798.000,00	52,37	927.635.000,00
33	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00	24.550.000,00
34	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	764.597.000,00	746.508.000,00	97,63	802.633.000,00
35	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	240.000.000,00	239.958.221,00	99,98	40.000.000,00
36	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	20.250.000,00
37	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	154.850.000,00	154.600.000,00	99,84	238.100.000,00
38	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	112.500.000,00	112.250.000,00	99,78	0,00
39	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	86.750.000,00	86.500.000,00	99,71	266.510.000,00
40	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	78.080.000,00
41	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	159.612.500,00
42	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	82.500.000,00	82.250.000,00	99,70	62.000.000,00
43	Belanja Pakaian Penyelamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
44	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	56.330.000,00	56.330.000,00	100,00	0,00
45	Belanja Pakaian Adat Daerah	206.100.000,00	204.600.000,00	99,27	89.500.000,00
46	Belanja Pakaian Batik Tradisional	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00	16.600.000,00
47	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	95.900.000,00
Jumlah		43.144.589.242,00	36.686.367.247,00	85,03	37.721.094.627,00

5.1.2.1.2.1.2 Belanja Barang Tak Habis Pakai

Dalam TA 2022 tidak terdapat anggaran dan realiasi Belanja Barang Tak Habis Pakai. Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai mengalami penurunan sebesar Rp402.063.900,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp402.063.900,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.44.

Tabel 5.44 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai Habis TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00%	400.593.900,00
2	Belanja Pipa-Pipa Fiber Glass	0,00	0,00	0,00%	1.470.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00%	402.063.900,00



	TA 2022	TA 2021
5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa	115.049.715.236,00	133.319.394.056,00

Dalam TA 2022, Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp130.973.974.323,00 dan terealisasi sebesar Rp115.049.715.236,00 atau mencapai 87,84%. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp18.269.678.820,00 atau lebih rendah 13,70% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp133.319.394.056,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.45.

Tabel 5.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Jasa Kantor	88.235.419.851,00	74.364.312.149,00	84,28%	85.536.694.048,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	25.987.902.512,00	25.803.859.354,00	99,29%	29.711.693.292,00
3	Belanja Sewa Tanah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.091.295.960,00	3.807.982.266,00	93,08%	2.706.354.386,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	596.072.000,00	552.072.000,00	92,62%	381.100.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00%	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.085.486.000,00	1.958.263.250,00	93,90%	650.343.500,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.279.297.000,00	783.230.712,00	61,22%	633.194.000,00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	115.000.000,00	111.500.000,00	96,96%	35.530.000,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.522.501.000,00	7.619.295.505,00	89,40%	5.451.843.300,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	30.000.000,00	18.200.000,00	60,67%	8.212.641.530,00
Jumlah		130.973.974.323,00	115.049.715.236,00	87,84%	133.319.394.056,00

5.1.2.1.2.2.1 Belanja Jasa Kantor

Dalam TA 2022, Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp88.235.419.851,00 dan terealisasi sebesar Rp74.364.312.149,00 atau mencapai 84,28%. Realisasi Belanja Jasa Kantor mengalami penurunan sebesar Rp11.172.381.899,00 atau lebih rendah 13,06% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp85.536.694.048,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa kantor secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.46.

Tabel 5.46 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.729.950.000,00	3.440.042.000,00	92,23	2.325.104.200,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	309.650.000,00	282.150.000,00	91,12	466.690.000,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	77.600.000,00	33.200.000,00	42,78	81.000.000,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.849.800.000,00	1.787.800.000,00	96,65	1.168.950.000,00
5	Honorarium Rohaniwan	16.000.000,00	12.400.000,00	77,50	956.000.000,00
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.475.840.000,00	1.331.300.000,00	90,21	1.186.870.000,00
7	Honorarium Penyelenggara Ujian	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	0,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	29.600.000,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	540.300.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.667.500.000,00	5.647.000.000,00	99,64	6.833.400.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	33.232.908.350,00	22.247.481.590,00	66,94	27.337.056.820,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	102.250.000,00	82.540.600,00	80,72	2.500.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.468.150.000,00	2.438.300.000,00	98,79	2.554.825.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.161.480.000,00	1.145.490.000,00	98,62	6.046.790.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	1.652.000.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	161.000.000,00	133.000.000,00	82,61	0,00
17	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
18	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	29.200.000,00	29.200.000,00	100,00	156.261.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.858.880.000,00	16.446.550.000,00	97,55	13.892.741.600,00
20	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	922.350.000,00	865.750.000,00	93,86	3.185.700.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.985.320.000,00	2.985.320.000,00	100,00	4.100.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Ahli	433.234.000,00	432.419.400,00	99,81	27.750.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.604.100.000,00	1.596.400.000,00	99,52	1.352.800.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	24.000.000,00
25	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.399.050.000,00	1.318.800.000,00	94,26	1.217.462.500,00
26	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	56.000.000,00	47.000.000,00	83,93	0,00
27	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	44.800.000,00
28	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	263.600.000,00
29	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	40.800.000,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
30	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	76.000.000,00	75.950.000,00	99,93	20.900.000,00
31	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	0,00	0,00	867.737.900,00
32	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	24.700.000,00	19.060.000,00	77,17	88.048.000,00
33	Belanja Jasa Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	324.542.500,00
34	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	199.100.000,00
35	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.424.200.000,00	1.408.200.000,00	98,88	1.417.752.000,00
36	Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00	26.080.000,00
37	Belanja Tagihan Air	338.924.835,00	229.315.500,00	67,66	261.001.770,00
38	Belanja Tagihan Listrik	8.055.610.466,00	7.090.417.254,00	88,02	6.881.359.912,00
39	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	456.135.000,00	429.200.000,00	94,09	197.690.000,00
40	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.308.634.000,00	1.955.079.524,00	84,69	2.068.065.772,00
41	Belanja Paket/Pengiriman	20.475.000,00	20.175.000,00	98,53	13.291.000,00
42	Belanja Registrasi/Keanggotaan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
43	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	427.699.000,00	279.547.881,00	65,36	128.366.922,00
44	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
45	Belanja Pengolahan Air Limbah	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	0,00
46	Belanja Medical Check Up	197.679.200,00	190.133.400,00	96,18	57.700.000,00
47	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan COVID-19	80.000.000,00	79.990.000,00	99,99	1.493.957.152,00
Jumlah		88.235.419.851,00	74.364.312.149,00	84,28	85.536.694.048,00

5.1.2.1.2.2.2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Dalam TA 2022, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dianggarkan sebesar Rp25.987.902.512,00 dan terealisasi sebesar Rp25.803.859.354,00 atau mencapai 99,29%. Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi mengalami penurunan sebesar Rp3.907.833.938,00 atau lebih rendah 13,15% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp29.711.693.292,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Iuran Jaminan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.47.

Tabel 5.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.437.571.872,00	1.344.874.320,00	93,55	898.735.692,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.507.548.000,00	20.507.518.000,00	100,00	25.522.677.000,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
3	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.186.822.400,00	2.161.560.100,00	98,84	2.063.135.200,00
4	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.851.200,00	2.851.200,00	100,00	0,00
5	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.315.109.040,00	1.252.177.132,00	95,21	1.100.266.798,00
6	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	408.000.000,00	408.000.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	130.000.000,00	126.878.602,00	97,60	126.878.602,00
Jumlah		25.987.902.512,00	25.803.859.354,00	99,29	29.711.693.292,00

5.1.2.1.2.2.3 Belanja Sewa Tanah

Dalam TA 2022, Belanja Sewa Tanah dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 atau mencapai 100%. Realisasi Belanja Sewa Tanah mengalami peningkatan sebesar Rp3.000.000,00 atau lebih tinggi 100% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Tanah secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.48.

Tabel 5.48 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00

5.1.2.1.2.2.4 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Dalam TA 2022, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp4.091.295.960,00 dan terealisasi sebesar Rp3.807.982.266,00 atau mencapai 93,08%. Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan sebesar Rp1.101.627.880,00 atau lebih tinggi 40,71% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp2.706.354.386,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.49

Tabel 5.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Sewa Peralatan Selam	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00
3	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	522.035.960,00	513.508.666,00	98,37	210.993.500,00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.029.600.000,00	2.781.913.600,00	91,82	2.094.010.886,00
7	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	408.000.000,00	383.300.000,00	93,95	41.400.000,00
8	Belanja Sewa Mebel	0,00	0,00	0,00	63.700.000,00
9	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	58.660.000,00	56.360.000,00	96,08	9.300.000,00
10	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	118.500.000,00
11	Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	44.650.000,00
12	Belanja Sewa Komputer Jaringan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	15.000.000,00
13	Belanja Sewa Personal Computer	40.000.000,00	39.900.000,00	99,75	0,00
14	Belanja Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Jumlah		4.091.295.960,00	3.807.982.266,00	93,08	2.706.354.386,00

5.1.2.1.2.2.5 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Dalam TA 2022, Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp596.072.000,00 dan terealisasi sebesar Rp552.072.000,00 atau mencapai 92,62%. Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp170.972.000,00 atau lebih tinggi 44,86% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp381.100.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.50

Tabel 5.50 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	209.500.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	541.572.000,00	497.572.000,00	91,88	171.600.000,00
Jumlah		596.072.000,00	552.072.000,00	92,62	381.100.000,00

5.1.2.1.2.2.6 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Dalam TA 2022, Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp28.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp28.000.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp28.000.000,00 atau lebih tinggi 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Sewa Aset Tetap secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.51.



Tabel 5.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Belanja Sewa Alat Musik	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	0,00

5.1.2.1.2.2.7 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Dalam TA 2022, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan sebesar Rp2.085.486.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.958.263.250,00 atau mencapai 93,90%. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi mengalami peningkatan sebesar Rp1.307.919.750,00 atau lebih tinggi 201,11% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp650.343.500,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.52.

Tabel 5.52 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	46.557.500,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	185.720.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	673.361.000,00	553.021.000,00	82,13	186.890.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	99.550.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	480.000.000,00	480.000.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	557.125.000,00	557.125.000,00	100,00	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	21.000.000,00	15.000.000,00	71,43	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	200.000.000,00	199.272.750,00	99,64	131.626.000,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	100.000.000,00	99.844.500,00	99,84	0,00
	Jumlah	2.085.486.000,00	1.958.263.250,00	93,90	650.343.500,00



5.1.2.1.2.2.8 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Dalam TA 2022, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dianggarkan sebesar Rp1.279.297.000,00 dan terealisasi sebesar Rp783.230.712,00 atau mencapai 61,22%. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi mengalami peningkatan sebesar Rp150.036.712,00 atau lebih tinggi 23,70% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp633.194.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.53.

Tabel 5.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	75.000.000,00	74.980.500,00	99,97	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	83.000.000,00	31.884.260,00	38,41	17.150.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00	152.000.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	209.697.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	609.600.000,00	374.365.952,00	61,41	367.844.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	0,00	0,00	0,00	46.200.000,00
Jumlah		1.279.297.000,00	783.230.712,00	61,22	633.194.000,00

5.1.2.1.2.2.9 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Dalam TA 2022, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dianggarkan sebesar Rp115.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp111.500.000,00 atau mencapai 96,96%. Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS mengalami peningkatan sebesar Rp75.970.000,00 atau lebih tinggi 213,82% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp35.530.000,00. Rincian anggaran dan realisasi secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.54.

Tabel 5.54 Anggaran dan Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	7.200.000,00	5.500.000,00	76,39	8.530.000,00
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	107.800.000,00	106.000.000,00	98,33	27.000.000,00
Jumlah		115.000.000,00	111.500.000,00	96,96	35.530.000,00



5.1.2.1.2.2.10 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam TA 2022, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp8.522.501.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.619.295.505,00 atau mencapai 89,40%. Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan mengalami peningkatan sebesar Rp2.167.452.205,00 atau lebih tinggi 39,76% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp5.451.843.300,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.55.

Tabel 5.55 Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.069.746.000,00	1.815.596.184,00	87,72	1.244.165.000,00
2	Belanja Sosialisasi	4.296.125.000,00	3.723.799.917,00	86,68	1.759.206.500,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	876.400.000,00	835.659.000,00	95,35	490.535.000,00
4	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.280.230.000,00	1.244.240.404,00	97,19	1.957.936.800,00
Jumlah		8.522.501.000,00	7.619.295.505,00	89,40	5.451.843.300,00

5.1.2.1.2.2.11 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Dalam TA 2022, Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp18.200.000,00 atau mencapai 60,67 %. Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp8.194.441.530,00 atau lebih rendah 99,78% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp8.212.641.530,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.56.

Tabel 5.56 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	8.212.641.530,00
2	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	18.200.000,00	60,67	0,00
Jumlah		30.000.000,00	18.200.000,00	60,67	8.212.641.530,00



		TA 2022	TA 2021
5.1.2.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	14.148.710.581,00	10.762.018.973,00

Dalam TA 2022, Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp15.354.505.374,00 dan terealisasi sebesar Rp14.148.710.581,00 atau mencapai 92,15%. Realisasi Belanja Barang mengalami peningkatan sebesar Rp3.386.691.608,00 atau lebih tinggi 31,47% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp10.762.018.973,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.57

Tabel 5.57 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00%	137.755.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.906.532.952,00	8.323.919.735,00	93,46%	7.059.476.141,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.680.748.447,00	3.423.794.122,00	93,02%	3.379.114.477,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.767.223.975,00	2.400.996.724,00	86,77%	176.559.355,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%	9.114.000,00
Jumlah		15.354.505.374,00	14.148.710.581,00	92,15%	10.762.018.973,00

5.1.2.1.2.3.1 Belanja Pemeliharaan Tanah

Dalam TA 2022, Belanja Pemeliharaan Tanah dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 %. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah mengalami penurunan sebesar Rp137.755.000,00 atau lebih rendah 100% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp137.755.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.58.

Tabel 5.58 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	0,00	0,00	0,00	134.035.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	137.755.000,00

5.1.2.1.2.3.2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Dalam TA 2022, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp8.906.532.952,00 dan terealisasi sebesar Rp8.323.919.735,00 atau mencapai 93,46%. Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan sebesar Rp1.264.443.594,00 atau lebih tinggi 17,91% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp7.059.476.141,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tersaji secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.59.



Tabel 5.59 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	89.757.000,00	39.875.000,00	44,43	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	110.000.000,00	84.475.000,00	76,80	144.415.300,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	0,00	0,00	0,00	69.568.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	849.140.000,00	810.884.811,00	95,49	1.785.498.617,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.832.400.354,00	3.647.902.442,00	95,19	1.972.425.329,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	663.330.000,00	663.310.150,00	100,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.262.160.000,00	1.195.725.879,00	94,74	829.659.105,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	182.140.000,00	179.894.580,00	98,77	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	259.770.000,00	259.738.275,00	99,99	778.287.250,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	37.110.000,00	19.796.000,00	53,34	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	80.933.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	114.163.000,00	125.645.000,00	110,06	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	9.465.000,00	8.142.500,00	86,03	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.362.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	286.203.700,00	284.053.400,00	99,25	112.341.500,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	81.851.000,00	72.000.000,00	87,96	24.320.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	175.027.000,00	157.860.000,00	90,19	341.366.000,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	1.618.000,00	80,90	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	9.823.800,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	10.000.000,00	9.975.000,00	99,75	0,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	50.330.000,00	39.022.600,00	77,53	0,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	0,00	8.970.000,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	207.060.000,00	162.790.000,00	78,62	202.190.000,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	63.120.000,00	6.750.000,00	10,69	4.000.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	183.145.000,00	152.926.800,00	83,50	263.394.300,00
29	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	181.175.298,00	165.203.298,00	91,18	0,00
30	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	114.185.600,00	93.404.000,00	81,80	106.021.940,00
31	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	123.000.000,00	122.927.000,00	99,94	117.930.000,00
32	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
33	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.150.000,00
34	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-	0,00	0,00	0,00	159.500.000,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar				
35	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		8.906.532.952,00	8.323.919.735,00	93,46	7.059.476.141,00

5.1.2.1.2.3.3 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Dalam TA 2022, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp3.680.748.447,00 dan terealisasi sebesar Rp3.423.794.122,00 atau mencapai 93,02%. Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp44.679.645,00 atau lebih tinggi 1,32% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp3.379.114.477,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.60.

Tabel 5.60 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.550.783.447,00	3.295.269.122,00	92,80	3.244.286.327,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	0,00	0,00	6.270.000,00
3	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	117.025.000,00	117.025.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	12.940.000,00	11.500.000,00	88,87	29.558.150,00
Jumlah		3.680.748.447,00	3.423.794.122,00	93,02	3.379.114.477,00

5.1.2.1.2.3.4 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Dalam TA 2022, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp2.767.223.975,00 dan terealisasi sebesar Rp2.400.996.724,00 atau mencapai 86,77%. Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami peningkatan sebesar



Rp2.224.437.369,00 atau lebih tinggi 1259,88% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp176.559.355,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.61.

Tabel 5.61 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	12.893.785,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	132.688.050,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	624.570.000,00	483.755.517,00	77,45	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	648.200.000,00	473.492.500,00	73,05	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	30.977.520,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	998.121.975,00	947.500.550,00	94,93	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	148.087.000,00	148.006.800,00	99,95	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	162.000.000,00	161.996.558,00	100,00	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	154.000.000,00	153.999.799,00	100,00	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	32.245.000,00	32.245.000,00	100,00	0,00
Jumlah		2.767.223.975,00	2.400.996.724,00	86,77	176.559.355,00

5.1.2.1.2.3.5 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Dalam TA 2022, Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp9.114.000,00 atau lebih rendah 100% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp9.114.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.62.



Tabel 5.62 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan	0,00	0,00	0,00	9.114.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	9.114.000,00

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas	58.689.435.523,00	50.782.865.567,00

Dalam TA 2022, Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp63.692.507.012,00 dan terealisasi sebesar Rp58.689.435.523,00 atau mencapai 92,13%. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas mengalami peningkatan sebesar Rp7.906.569.956,00 atau lebih tinggi 15,57% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp50.782.865.567,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.63.

Tabel 5.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.441.797.012,00	58.447.636.723,00	92,13%	50.782.865.567,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	250.710.000,00	241.798.800,00	96,45%	0,00
Jumlah		63.692.507.012,00	58.689.435.523,00	92,13%	50.782.865.567,00

5.1.2.1.2.4.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Dalam TA 2022, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp63.441.797.012,00 dan terealisasi sebesar Rp58.447.636.723,00 atau mencapai 92,13%. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengalami peningkatan sebesar Rp7.664.771.156,00 atau lebih tinggi 15,09% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp50.782.865.567,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.64.

Tabel 5.64 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.778.596.600,00	48.167.802.775,00	93,03	34.798.990.986,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	51.943.000,00	43.615.675,00	83,97	2.959.948.500,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.372.065.812,00	9.061.167.500,00	87,36	11.819.205.884,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.235.091.600,00	1.170.950.773,00	94,81	1.204.720.197,00
Jumlah		63.441.797.012,00	58.447.636.723,00	92,13	50.782.865.567,00



5.1.2.1.2.4.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Dalam TA 2022, Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri dianggarkan sebesar Rp250.710.000,00 dan terealisasi sebesar Rp241.798.800,00 atau mencapai 96,45%. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri mengalami peningkatan sebesar Rp241.798.800,00 atau lebih tinggi 100% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.65.

Tabel 5.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri TA 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	250.710.000,00	241.798.800,00	96,45	0,00
Jumlah		250.710.000,00	241.798.800,00	96,45	0,00

5.1.2.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	TA 2022	TA 2021
		11.372.920.000,00	3.901.114.000,00

Dalam TA 2022, Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp11.490.020.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.372.920.000,00 atau mencapai 92,13%. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas mengalami peningkatan sebesar Rp7.471.806.000,00 atau lebih tinggi 191,53% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp3.901.114.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.66.

Tabel 5.66 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.321.020.000,00	11.216.920.000,00	99,08%	2.163.999.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	169.000.000,00	156.000.000,00	92,31%	1.737.115.000,00
Jumlah		11.490.020.000,00	11.372.920.000,00	98,98%	3.901.114.000,00

5.1.2.1.2.5.1 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Dalam TA 2022, Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan sebesar Rp11.321.020.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.216.920.000,00 atau mencapai 99,08%. Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami peningkatan sebesar Rp9.052.921.000,00 atau lebih tinggi 418,34% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp2.163.999.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.67.



Tabel 5.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	301.600.000,00	260.300.000,00	86,31	185.503.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	38.050.000,00	38.050.000,00	100,00	102.500.000,00
3	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	9.087.800.000,00	9.080.000.000,00	99,91	0,00
4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.893.570.000,00	1.838.570.000,00	97,10	1.875.996.000,00
Jumlah		11.321.020.000,00	11.216.920.000,00	99,08	2.163.999.000,00

5.1.2.1.2.5.2 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Dalam TA 2022, Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan sebesar Rp169.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp156.000.000,00 atau mencapai 92,31%. Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami penurunan sebesar Rp1.581.115.000,00 atau lebih rendah 91,02% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp1.737.115.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.68.

Tabel 5.68 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	169.000.000,00	156.000.000,00	92,31	1.737.115.000,00
Jumlah		169.000.000,00	156.000.000,00	92,31	1.737.115.000,00

5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

TA 2022	TA 2021
22.699.288.703,00	16.380.225.323,00

Dalam TA 2022, Belanja Barang dan Jasa Dana BOS dianggarkan sebesar Rp26.004.427.830,00 dan terealisasi sebesar Rp22.699.288.703,00 atau mencapai 87,29%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS mengalami peningkatan sebesar Rp6.319.063.380,00 atau lebih tinggi 38,58% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp16.380.225.323,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.69.

Tabel 5.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	26.004.427.830,00	22.699.288.703,00	87,29	16.380.225.323,00
Jumlah		26.004.427.830,00	22.699.288.703,00	87,29	16.380.225.323,00



5.1.2.1.2.7	Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD	TA 2022	TA 2021
		12.521.298.001,00	11.920.363.000,00

Dalam TA 2022, Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp26.301.990.077,00 dan terealisasi sebesar Rp12.521.298.001,00 atau mencapai 47,61%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD mengalami peningkatan sebesar Rp600.935.001,00 atau lebih tinggi 5,04% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp11.920.363.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.70.

Tabel 5.70 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	26.301.990.077,00	12.521.298.001,00	47,61	11.920.363.000,00
Jumlah		26.301.990.077,00	12.521.298.001,00	47,61	11.920.363.000,00

5.1.2.1.3	Belanja Hibah	TA 2022	TA 2021
		30.327.841.932,00	35.351.199.489,00

Dalam TA 2022, Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2022 berupa uang dan barang yang dianggarkan pada 15 OPD dan tujuh Kecamatan sebesar Rp31.903.258.994,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp30.327.841.932,00 atau mencapai 95,06%. Realisasi Belanja Hibah berupa uang dan barang tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.023.357.557,00 atau lebih rendah 14,21% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp35.351.199.489,00. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II huruf D Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada OPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.71.

Tabel 5.71 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.457.206.726,00	1.387.726.695,00	95,23	1.397.826.050,00
2	Belanja Hibah kepada Badan. Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29.792.640.464,00	28.286.704.708,00	94,95	33.299.962.910,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	653.411.804,00	653.410.529,00	100,00	653.410.529,00
Jumlah		31.903.258.994,00	30.327.841.932,00	95,06	35.351.199.489,00



5.1.2.1.3.1 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

Dalam TA 2022, Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp1.457.206.726,00 dan terealisasi sebesar Rp1.387.726.695,00 atau mencapai 95,23%. Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp10.099.355,00 atau lebih rendah 0,72% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp1.397.826.050,00.

5.1.2.1.3.2 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Dalam TA 2022, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp29.792.640.464,00 dan terealisasi sebesar Rp28.286.704.708,00 atau mencapai 94,95%. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia mengalami penurunan sebesar Rp5.013.258.202,00 atau lebih rendah 15,05% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp33.299.962.910,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.72.

Tabel 5.72 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.897.450.489,00	1.894.950.000,00	99,87	3.443.226.600,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	702.701.155,00	682.338.955,00	97,10	353.880.750,00
	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	61.368.000,00
		2.600.151.644,00	2.577.288.955,00	99,12	3.858.475.350,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.132.170.000,00	9.102.599.200,00	89,84	4.119.350.000,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.691.060.500,00	4.606.788.200,00	98,20	4.958.807.183,00
	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.823.230.500,00	13.709.387.400,00	92,49	9.078.157.183,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan				
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	598.518.625,00	583.518.625,00	97,49	357.330.000,00
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.762.965.695,00	11.408.905.728,00	96,99	19.856.811.534,00
	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.830.000,00	3.660.000,00	95,56	149.188.843,00
		12.365.314.320,00	11.996.084.353,00	97,01	20.363.330.377,00
4	Belanja Hibah kepada Koperasi				
	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	3.944.000,00	3.944.000,00	100,00	0,00
		3.944.000,00	3.944.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	29.792.640.464,00	28.286.704.708,00	94,95	33.299.962.910,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah berupa uang dapat dilihat pada **Lampiran 1.a**. Rincian anggaran dan realisasi **Belanja** Hibah berupa Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 1.b**.

5.1.2.1.3.3 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Dalam TA 2022, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp653.411.804,00 dan terealisasi sebesar Rp653.410.529,00 atau mencapai 100%. Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari realisasi TA 2021 sebesar Rp653.410.529,00. Realisasi hibah merupakan pembayaran bantuan keuangan kepada partai politik, secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.73.

Tabel 5.73 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Partai Politik	APBD-P	Realisasi
1	Partai Golongan Karya	214.725.073,00	214.725.000,00
2	Partai Nasional Demokrat	43.955.005,00	43.955.005,00
3	Partai Amanat Nasional	96.747.426,00	96.747.000,00



No	Partai Politik	APBD-P	Realisasi
4	Partai Hati Nurani Rakyat	17.906.907,00	17.906.907,00
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.865.620,00	19.865.000,00
6	Partai Keadilan Sejahtera	51.065.783,00	51.065.783,00
7	Partai Kebangkitan Bangsa	54.751.134,00	54.751.134,00
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	96.441.087,00	96.441.000,00
9	Partai Demokrat	57.953.769,00	57.953.700,00
Jumlah		653.411.804,00	653.410.529,00

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial **TA 2022** **TA 2021**
8.457.711.300,00 **7.333.129.000,00**

Dalam TA 2022, Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2022 dianggarkan pada empat OPD dan tiga Kecamatan sebesar Rp8.789.633.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.457.711.300,00 atau mencapai 96,22%. Realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.124.582.300,00 atau lebih tinggi 15,34% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp7.333.129.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.74.

Tabel 5.74 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.668.975.300,00	8.337.053.300,00	43,32	6.402.341.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	102.228.000,00	102.228.000,00	97,35	861.938.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	18.430.000,00	18.430.000,00	87,32	68.850.000,00
Jumlah		8.789.633.300,00	8.457.711.300,00	96,22	7.333.129.000,00

5.1.2.1.4.1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Dalam TA 2022, Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dianggarkan sebesar Rp8.668.975.300,00 dan terealisasi sebesar Rp8.337.053.300,00 atau mencapai 96,17%. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu mengalami peningkatan sebesar Rp1.934.712.300,00 atau lebih tinggi 30,22% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp6.402.341.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.62.

Tabel 5.75 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	6.983.000.000,00	6.671.100.000,00	95,53	3.568.800.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.685.975.300,00	1.665.953.300,00	98,81	2.833.541.000,00
Jumlah		8.668.975.300,00	8.337.053.300,00	96,17	6.402.341.000,00



Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial berupa uang dapat dilihat pada **Lampiran 2.a**

5.1.2.1.4.2 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Dalam TA 2022, Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga dianggarkan sebesar Rp102.228.000,00 dan terealisasi sebesar Rp102.228.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga mengalami penurunan sebesar Rp759.710.000,00 atau lebih rendah 88,14% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp861.938.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.76.

Tabel 5.76 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00%	46.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	102.228.000,00	102.228.000,00	100,00%	815.938.000,00
Jumlah		102.228.000,00	102.228.000,00	100,00%	861.938.000,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial berupa Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 2.b**.

5.1.2.1.4.3 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Dalam TA 2022, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dianggarkan sebesar Rp18.430.000 dan terealisasi sebesar Rp18.430.000 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat mengalami peningkatan sebesar Rp33.378.000,00 atau lebih tinggi 48,48% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp68.850.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.77.

Tabel 5.77 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	18.430.000,00	18.430.000,00	100,00%	68.850.000,00
Jumlah		102.228.000,00	102.228.000,00	100,00%	68.850.000,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial berupa Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 2.b**.



5.1.2.2 Belanja Modal

TA 2022	TA 2021
196.692.630.353,00	169.226.990.286,00

Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap dan atau Aset Tetap Lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dalam TA 2022, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp282.144.496.540,00 yang terealisasi sebesar Rp196.692.630.353,00 atau mencapai 69,71%. Realisasi Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar Rp27.465.640.067,00 atau lebih tinggi 16,23% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp169.226.990.286,00. Jenis Belanja ini menyerap dana sebesar 22,79% dari total belanja secara keseluruhan sebesar Rp863.006.799.406,52.

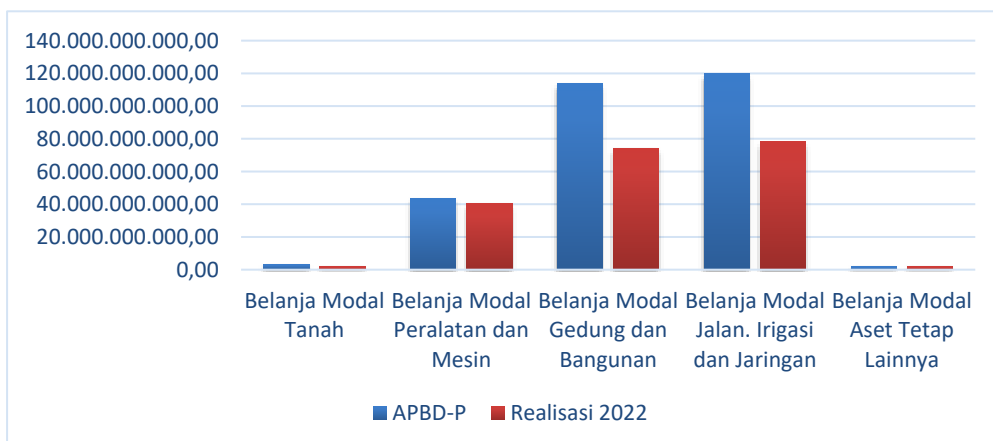
Belanja Modal ini secara umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dikelompokkan ke dalam beberapa jenis Belanja Aset Tetap, yaitu Belanja Modal Tanah. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, yang akan dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset TA 2022. Secara sistematis anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.78.

Tabel 5.78 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Tanah	3.366.607.000,00	1.886.851.800,00	56,05	1.778.655.299,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.454.908.978,00	40.530.407.319,00	93,27	59.718.471.630,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.702.908.287,00	74.323.315.084,00	65,37	33.830.974.656,00
4	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	119.721.092.275,00	78.055.523.650,00	65,20	73.778.890.701,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.898.980.000,00	1.896.532.500,00	100,00	119.998.000,00
Jumlah		282.144.496.540,00	196.692.630.353,00	69,71	169.226.990.286,00

Gambar 5.78 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal





Dalam TA 2022, Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp3.366.607.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.886.851.800,00 atau mencapai 56,05%. Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp108.196.501,00 atau lebih tinggi 6,08% dibandingkan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 sebesar Rp1.778.655.299,00. Realisasi tersebut berupa belanja tanah untuk tanah perkebunan, tanah bangunan tempat kerja, dan tanah kosong secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.79.

Tabel 5.79 Rincian Belanja Modal Tanah TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri	249.060.000,00	214.974.000,00	86,31	0,00
2	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.869.000.000,00	674.480.000,00	36,09	579.335.299,00
3	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	948.547.000,00	947.567.800,00	99,90	1.199.320.000,00
4	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	300.000.000,00	49.830.000,00	16,61	0,00
Jumlah		3.366.607.000,00	1.886.851.800,00	56,05	1.778.655.299,00

Belanja Modal Tanah TA 2022 tersebut dianggarkan dan dilaksanakan oleh empat SKPD dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja modal pengadaan pembebasan lahan tanah untuk lokasi pembangunan sentra pengelola ikan sebesar Rp214.974.000,00 oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 2) Realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk Bangunan Tempat Kerja berupa Tanah Lokasi Rumah Sakit Pratama di Kawawu Barat Desa Garaupa Kec.Pasilambena sebesar Rp351.907.200,00 oleh Dinas Kesehatan;
- 3) Realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk Bangunan Tempat Kerja berupa Tanah Lokasi Rumah Sakit Pratama di Kawawu Barat Desa Garaupa Kec.Pasilambena sebesar Rp381.980.000 oleh Dinas PUTR;
- 4) Realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk Tanah Persil Lainnya berupa Tanah Pelabuhan Pengumpulan Lokal di Desa Nyiur Indah Kec. Taka Bonerate dan Desa Lamantu Kec.Pasimarannu sebesar Rp888.160.600,00 oleh Dinas Perhubungan;
- 5) Realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk pengadaan Tanah Bangunan Air berupa biaya jasa penilai/appraisal pembebasan lokasi intake dan jaringan air baku Topa sebesar Rp49.830.000,00 dilaksanakan oleh Dinas PUTR.

Adapun uraian belanja modal tanah secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.80.

Tabel 5.80 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pembebasan Lahan tanah untuk lokasi pembangunan sentra pengelola ikan di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Dinas Perindagkop	214.974.000,00
2	Pengadaan tanah untuk Lokasi Rumah Sakit Pratama Kecamatan Pasimarannu pada Dinas Kesehatan dan Dinas PUTR	674.480.000,00
3	Pengadaan tanah untuk Lokasi Tanah Pelabuhan Pengumpulan Lokal pada Dinas Perhubungan	947.567.800,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
4	Biaya <i>Appraisal</i> pembebasan tanah lokasi intake dan jaringan air baku Topa pada Dinas PUTR	49.830.000,00
Jumlah		1.886.851.800,00

Atas belanja modal tanah tersebut telah dikapitalisasi sebagai Aset Tetap–Tanah pada Laporan BMD per 31 Desember 2022.

5.1.2.2.1.1 Belanja Modal Tanah Persil

Dalam TA 2022, Belanja Modal Tanah Persil dianggarkan sebesar Rp3.066.607.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.837.021.800,00 atau mencapai 59,90%. Realisasi Belanja Modal Tanah Persil mengalami peningkatan sebesar Rp58.366.501,00 atau lebih tinggi 3,18% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp1.778.655.299,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah Persil secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.81.

Tabel 5.81 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Persil TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri	249.060.000,00	214.974.000,00	86,31%	0,00
3	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.869.000.000,00	674.480.000,00	36,09%	579.335.299,00
4	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	948.547.000,00	947.567.800,00	99,90%	1.199.320.000,00
Jumlah		3.066.607.000,00	1.837.021.800,00	59,90%	1.778.655.299,00

5.1.2.2.1.2 Belanja Modal Lapangan

Dalam TA 2022, Belanja Modal Tanah Lapangan dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp49.830.000,00 atau mencapai 16,61%. Realisasi Belanja Modal Lapangan mengalami peningkatan sebesar Rp49.830.000,00 atau lebih tinggi 100% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Lapangan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.82.

Tabel 5.82 Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Modal Tanah Lapangan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	300.000.000,00	49.830.000,00	16,61%	0,00
Jumlah		300.000.000,00	49.830.000,00	16,61%	0,00



5.1.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	TA 2022	TA 2021
		40.530.407.319,00	59.718.471.630,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp43.454.908.978,00 dan terealisasi sebesar Rp40.530.407.319,00 atau mencapai 93,27%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp19.188.064.311,00 atau lebih rendah 32,13% dibandingkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp59.718.471.630,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.83.

Tabel 5.83 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	00,00	751.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Besar Apung	0,00	0,00	00,00	3.426.000,00
3	Belanja Modal Alat Bantu	137.215.000,00	129.715.000,00	94,53	64.436.000,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.925.642.300,00	1.342.529.400,00	69,72	13.062.177.495,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	12.075.000,00	12.075.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	88.000.000,00	88.000.000,00	100,00	103.308.000,00
8	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
9	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	00,00	19.822.000,00
11	Belanja Modal Alat Kantor	915.772.700,00	860.574.700,00	93,97	631.901.000,00
12	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.128.301.885,00	2.842.433.400,00	90,86	2.359.560.330,00
13	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	721.465.000,00	561.550.000,00	77,83	1.166.751.000,00
14	Belanja Modal Alat Studio	361.714.000,00	324.125.000,00	89,61	160.179.000,00
15	Belanja Modal Alat Komunikasi	443.725.000,00	442.644.487,00	99,76	5.000.000,00
16	Belanja Modal Peralatan Pemancar	663.000.000,00	663.000.000,00	100,00	0,00
17	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
18	Belanja Modal Alat Kedokteran	8.946.715.192,00	8.054.491.192,00	90,03	3.271.180.150,00
19	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	17.694.738.864,00	17.122.499.904,00	96,77	11.877.757.311,00
20	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	599.897.500,00	574.897.500,00	95,83	0,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
21	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.307.113.537,00	4.294.008.000,00	99,70	12.475.620.800,00
22	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	00,00	5.100.000,00
23	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	0,00	00,00	35.000.000,00
24	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	00,00	333.450.000,00
25	Belanja Modal Komputer Unit	2.826.822.500,00	2.575.760.037,00	91,12	2.793.226.000,00
26	Belanja Modal Peralatan Komputer	533.701.500,00	495.021.699,00	92,75	3.679.127.535,00
27	Belanja Modal Alat Pelindung	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00	0,00
28	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	00,00	4.441.500,00
29	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	00,00	29.877.500,00
30	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	00,00	3.100.000,00
31	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	00,00	2.239.500,00
32	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	53.809.000,00	51.882.000,00	96,42	99.910.000,00
33	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	00,00	638.562.018,00
34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	00,00	5.729.322.241,00
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	00,00	412.996.250,00
Jumlah		43.454.908.978,00	40.530.407.319,00	93,27	59.718.471.630,00

	TA 2022	TA 2021
5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Alat Besar	129.715.000,00	818.862.000,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Besar dianggarkan sebesar Rp137.215.000,00 dan terealisasi sebesar Rp129.715.000,00 atau mencapai 94,53%. Realisasi Belanja Modal Alat Besar mengalami penurunan sebesar Rp689.147.000,00 atau lebih rendah 84,16% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp818.862.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Besar secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.84.

Tabel 5.84 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00 %	751.000.000,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
2	Belanja Modal Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00 %	3.426.000,00
3	Belanja Modal Alat Bantu	137.215.000,00	129.715.000,00	94,53 %	64.436.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00 %	818.862.000,00

5.1.2.2.2.1.1 Belanja Modal Alat Besar Darat

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Besar Darat dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Realisasi Belanja Modal Alat Besar mengalami penurunan sebesar Rp751.000.000,00 atau lebih rendah 100% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp751.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.85.

Tabel 5.85 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00 %	751.000.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00 %	751.000.000,00

5.1.2.2.2.1.2 Belanja Modal Alat Besar Apung

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Besar Apung dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Realisasi Belanja Modal Alat Besar mengalami penurunan sebesar Rp3.426.000,00 atau lebih rendah 100% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp3.426.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Besar Apung tersaji secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.86.

Tabel 5.86 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Apung TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Mesin Proses Apung	0,00	0,00	0,00 %	3.426.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00 %	3.426.000,00

5.1.2.2.2.1.3 Belanja Modal Alat Bantu

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Bantu dianggarkan sebesar Rp137.215.000,00 dan terealisasi sebesar Rp129.715.000,00 atau mencapai 94,53%. Realisasi Belanja Modal Alat Besar mengalami peningkatan sebesar Rp65.279.000,00 atau lebih tinggi 101,31% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp64.436.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Besar Bantu secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.87.



Tabel 5.87 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bantu TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00%	55.250.000,00
2	Belanja Modal Pompa	26.215.000,00		71,39%	9.146.000,00
3	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	111.000.000,00		100,00%	0,00
4	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00		0,00%	40.000,00
Jumlah		137.215.000,00	129.715.000,00	94,53%	64.436.000,00

		TA 2022	TA 2021
5.1.2.2.2.2	Belanja Modal Alat Angkutan	1.354.604.400,00	13.062.177.495,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Angkutan dianggarkan sebesar Rp1.937.717.300,00 dan terealisasi sebesar Rp1.354.604.400,00 atau mencapai 69,91%. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan mengalami penurunan sebesar Rp11.707.573.095,00 atau lebih rendah 89,63% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp13.062.177.495,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Angkutan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.88.

Tabel 5.88 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.925.642.300,00	1.342.529.400,00	69,72%	13.062.177.495,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	12.075.000,00	12.075.000,00	100,00%	0,00
Jumlah		1.937.717.300,00	1.354.604.400,00	69,91%	13.062.177.495,00

5.1.2.2.2.2.1 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dianggarkan sebesar Rp1.925.642.300,00 dan terealisasi sebesar Rp1.342.529.400,00 atau mencapai 69,72%. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor mengalami penurunan sebesar Rp11.719.648.095,00 atau lebih rendah 89,72% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp13.062.177.495,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.89.



**Tabel 5.89 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Alat Angkutan Darat Bermotor TA 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.165.492.300,00	602.909.400,00	51,73%	1.274.868.600,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	335.000.000,00	315.800.000,00	94,27%	496.950.000,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00%	1.969.000.000,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	218.000.000,00	216.670.000,00	99,39%	550.679.345,00
5	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	207.150.000,00	207.150.000,00	100,00%	210.000.000,00
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00%	8.560.679.550,00
Jumlah		1.925.642.300,00	1.342.529.400,00	69,72%	13.062.177.495,00

5.1.2.2.2.2 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Angkutan tak Darat Bermotor dianggarkan sebesar Rp12.075.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat tak Bermotor mengalami peningkatan sebesar Rp12.075.000,00 atau lebih tinggi 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat tak Bermotor secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.90.

**Tabel 5.90 Anggaran dan Belanja Belanja Modal
Alat Angkutan Darat tak Bermotor TA 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	12.075.000,00	12.075.000,00	100,00%	0,00
Jumlah		12.075.000,00	12.075.000,00	100,00%	0,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

TA 2022	TA 2021
134.000.000,00	103.308.000,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur dianggarkan sebesar Rp134.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp134.000.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur mengalami peningkatan sebesar Rp30.692.000,00 atau lebih tinggi 29,71% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp103.308.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.91.



Tabel 5.91 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	88.000.000,00	88.000.000,00	100,00%	103.308.000,00
2	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,00
3	Belanja Modal Alat Ukur	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00%	0,00
Jumlah		134.000.000,00	134.000.000,00	100,00%	103.308.000,00

5.1.2.2.3.1 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin dianggarkan sebesar Rp88.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp88.000.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin mengalami penurunan sebesar Rp30.692.000,00 atau lebih rendah 14,82% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp103.308.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.92.

Tabel 5.92 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Peralatan Las	0,00	0,00	0,00%	6.125.000,00
2	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	0,00	0,00	0,00%	97.183.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	88.000.000,00	88.000.000,00	100,00%	0,00
Jumlah		88.000.000,00	88.000.000,00	100,00%	103.308.000,00

5.1.2.2.3.2 Belanja Modal Alat Bengkel tak Bermesin

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Bengkel tak Bermesin dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel tak Bermesin mengalami peningkatan sebesar Rp10.000.000,00 atau lebih tinggi 100,00 % dari realisasi TA 2021 sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Bengkel tak Bermesin secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.93.

Tabel 5.93 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel tak Bermesin TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,00
Jumlah		10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,00



5.1.2.2.2.3 Belanja Modal Alat Ukur

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Ukur dianggarkan sebesar Rp36.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.000.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Modal Alat Ukur mengalami peningkatan sebesar Rp36.000.000,00 atau lebih tinggi 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Ukur secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.94.

Tabel 5.94 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Ukur TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Ukur Universal	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00%	0,00
Jumlah		36.000.000,00	36.000.000,00	100,00%	0,00

	TA 2022	TA 2021
5.1.2.2.2.4 Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	19.822.000,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Pertanian dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian mengalami penurunan sebesar Rp19.822.000,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp19.822.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Pertanian secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.95.

Tabel 5.95 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00%	19.822.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00%	19.822.000,00

5.1.2.2.2.4.1 Belanja Modal Alat Pengolahan

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Pengolahan dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Realisasi Belanja Modal Alat Pengolahan mengalami penurunan sebesar Rp19.822.000,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp19.822.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Pengolahan secara rinci dapat dilihat pada tabel

Tabel 5.96 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pengolahan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00%	9.720.000,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00%	5.102.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00%	19.822.000,00

5.1.2.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	TA 2022	TA 2021
		4.264.558.100,00	4.158.212.330,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp4.765.539.585,00 dan terealisasi sebesar Rp4.264.558.100,00 atau mencapai 89,49%. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga mengalami peningkatan sebesar Rp106.345.770,00 atau lebih tinggi 2,56% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp4.158.212.330,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.97.

Tabel 5.97 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Kantor	915.772.700,00	860.574.700,00	93,97%	631.901.000,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.128.301.885,00	2.842.433.400,00	90,86%	2.359.560.330,00
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	721.465.000,00	561.550.000,00	77,83%	1.166.751.000,00
	Jumlah	4.765.539.585,00	4.264.558.100,00	89,49%	4.158.212.330,00

5.1.2.2.2.5.1 Belanja Modal Alat Kantor

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Kantor dianggarkan sebesar Rp915.772.700,00 dan terealisasi sebesar Rp860.574.700,00 atau mencapai 93,97%. Realisasi Belanja Modal Alat Kantor mengalami peningkatan sebesar Rp228.673.700,00 atau lebih tinggi 36,19% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp631.901.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Kantor secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.98.

Tabel 5.98 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	113.000.000,00	113.000.000,00	100,00%	109.187.000,00
2	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	802.772.700,00	747.574.700,00	93,12%	522.714.000,00
	Jumlah	915.772.700,00	860.574.700,00	93,97%	631.901.000,00



5.1.2.2.2.5.2 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp3.128.301.885,00 dan terealisasi sebesar Rp2.842.433.400,00 atau mencapai 90,86%. Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga mengalami peningkatan sebesar Rp482.873.070,00 atau lebih tinggi 20,46% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp2.359.560.330,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.99.

Tabel 5.99 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Mebel	1.058.710.885,00	977.490.000,00	92,33%	61.600.000,00
2	Belanja Modal Alat Pembersih	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00%	6.500.000,00
3	Belanja Modal Alat Pendingin	547.985.000,00	503.289.000,00	91,84%	599.682.000,00
4	Belanja Modal Alat Dapur	38.766.000,00	36.941.600,00	95,29%	0,00
5	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.461.720.000,00	1.303.762.800,00	89,19%	1.631.338.330,00
6	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	12.620.000,00	12.450.000,00	98,65%	60.440.000,00
Jumlah		3.128.301.885,00	2.842.433.400,00	90,86%	2.359.560.330,00

5.1.2.2.2.5.3 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Dalam TA 2022, Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dianggarkan sebesar Rp721.465.000,00 dan terealisasi sebesar Rp561.550.000,00 atau mencapai 77,83% Realisasi Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat mengalami penurunan sebesar Rp605.201.000,00 atau lebih rendah 51,87% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp1.166.751.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.100.

Tabel 5.100 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	218.150.000,00	158.200.000,00	72,52%	244.564.500,00
2	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	36.000.000,00	18.000.000,00	50,00%	196.093.000,00
3	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	140.230.000,00	129.690.000,00	92,48%	82.714.500,00
4	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00%	137.609.000,00
5	Belanja Modal Kursi Hadap	0,00	0,00	0,00%	2.332.000,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Depan Meja Kerja Pejabat				
6	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	141.002.000,00	102.352.000,00	72,59%	352.729.000,00
7	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	186.083.000,00	153.308.000,00	82,39%	150.709.000,00
Jumlah		721.465.000,00	561.550.000,00	77,83%	1.166.751.000,00

5.1.2.2.2.6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	TA 2022	TA 2021
		1.469.769.487,00	165.179.000,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp1.508.439.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.469.769.487,00 atau mencapai 97,44%. Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar mengalami peningkatan sebesar Rp1.304.590.487,00 atau lebih tinggi 789,80% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp165.179.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.101.

Tabel 5.101 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Studio	361.714.000,00	324.125.000,00	89,61%	160.179.000,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	443.725.000,00	442.644.487,00	99,76%	5.000.000,00
3	Belanja Modal Peralatan Pemancar	663.000.000,00	663.000.000,00	100,00%	0,00
4	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	0,00
Jumlah		1.508.439.000,00	1.469.769.487,00	97,44%	165.179.000,00

5.1.2.2.2.6.1 Belanja Modal Alat Studio

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Studio dianggarkan sebesar Rp361.714.000,00 dan terealisasi sebesar Rp324.125.000,00 atau mencapai 89,61% Realisasi Belanja Modal Alat Studio mengalami peningkatan sebesar Rp163.946.000,00 atau lebih tinggi 102,35% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp160.179.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Studio secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.102.

Tabel 5.102 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	52.430.000,00	18.500.000,00	35,29%	11.079.000,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00%	104.100.000,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	9.100.000,00	9.100.000,00	100,00%	0,00
4	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	195.184.000,00	191.525.000,00	98,13%	45.000.000,00
Jumlah		361.714.000,00	324.125.000,00	89,61%	160.179.000,00

5.1.2.2.2.6.2 Belanja Modal Alat Komunikasi

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Komunikasi, dianggarkan sebesar Rp443.725.000,00 dan terealisasi sebesar Rp442.644.487,00 atau mencapai 99,76% Realisasi Belanja Modal Alat Komunikasi, mengalami peningkatan sebesar Rp1437.644.487,00 atau lebih tinggi 8.752,89% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp5.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Komunikasi secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.103.

Tabel 5.103 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
3	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	150.000.000,00	148.919.487,00	99,28%	0,00
4	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	293.725.000,00	293.725.000,00	100,00%	0,00
Jumlah		443.725.000,00	442.644.487,00	99,76%	5.000.000,00

5.1.2.2.2.6.3 Belanja Modal Peralatan dan Pemancar

Dalam TA 2022, Belanja Modal Peralatan dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp663.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp663.000.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Pemancar mengalami peningkatan sebesar Rp663.000.000,00 atau lebih tinggi 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Pemancar secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.104.



Tabel 5.104 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Pemancar TA 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Peralatan Pemancar	663.000.000,00	663.000.000,00	100,00%	0,00
Jumlah		663.000.000,00	663.000.000,00	100,00%	0,00

5.1.2.2.2.6.3 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi

Dalam TA 2022, Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp40.000.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi mengalami peningkatan sebesar Rp663.000.000,00 atau lebih tinggi 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.105.

Tabel 5.105 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi TA 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00

5.1.2.2.2.7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

	TA 2022	TA 2021
	25.176.991.096,00	15.148.937.461,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp26.641.454.056,00 dan terealisasi sebesar Rp25.176.991.096,00 atau mencapai 94,50% Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, mengalami peningkatan sebesar Rp10.028.053.635,00 atau lebih tinggi 66,20% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp15.148.937.461,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.106.

Tabel 5.106 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2022

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Kedokteran	8.946.715.192,00	8.054.491.192,00	90,03	3.271.180.150,00
2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	17.694.738.864,00	17.122.499.904,00	96,77	11.877.757.311,00
Jumlah		26.641.454.056,00	25.176.991.096,00	94,50	15.148.937.461,00

5.1.2.2.2.7.1 Belanja Modal Alat Kedokteran

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Kedokteran dianggarkan sebesar Rp8.946.715.192,00 dan terealisasi sebesar Rp8.054.491.192,00 atau mencapai 90,03% Realisasi Belanja Modal Alat



Kedokteran mengalami peningkatan sebesar Rp4.783.311.042,00 atau lebih tinggi 146,23% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp3.271.180.150,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.107.

Tabel 5.107 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	21.400.000,00	8.050.000,00	37,62	3.260.180.150,00
2	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	9.215.000,00	9.215.000,00	100,00	11.000.000,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	8.916.100.192,00	8.037.226.192,00	90,14	0,00
Jumlah		8.946.715.192,00	8.054.491.192,00	90,03	3.271.180.150,00

5.1.2.2.2.7.1 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Kesehatan Umum dianggarkan sebesar Rp17.694.738.864,00 dan terealisasi sebesar Rp17.122.499.904,00 atau mencapai 96,77% Realisasi Belanja Modal Alat Kesehatan Umum mengalami peningkatan sebesar Rp5.244.742.593,00 atau lebih tinggi 44,16% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp11.877.757.311,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Kesehatan Umum secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.108.

Tabel 5.108 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kesehatan Umum TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	17.694.738.864,00	17.122.499.904,00	96,77	11.877.757.311,00
Jumlah		17.694.738.864,00	17.122.499.904,00	96,77	11.877.757.311,00

5.1.2.2.2.8 Belanja Modal Alat Laboratorium

	TA 2022	TA 2021
	4.868.905.500,00	12.849.170.800,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp4.907.011.037,00 dan terealisasi sebesar Rp4.868.905.500,00 atau mencapai 99,22% Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium mengalami penurunan sebesar Rp7.980.265.300,00 atau lebih rendah 62,11% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp12.849.170.800,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.109.



Tabel 5.109 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	4.307.113.537,00	4.294.008.000,00	99,70	12.475.620.800,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	599.897.500,00	574.897.500,00	95,83	0,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
4	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	0,00	0,00	333.450.000,00
Jumlah		4.907.011.037,00	4.868.905.500,00	99,22	12.849.170.800,00

5.1.2.2.2.8.1 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium

Dalam TA 2022, Belanja Modal Unit Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp4.307.113.537,00 dan terealisasi sebesar Rp4.294.008.000,00 atau mencapai 99,70% Belanja Modal Unit Alat Laboratorium mengalami penurunan sebesar Rp8.181.612.800,00 atau lebih rendah 65,58% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp12.475.620.800,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Unit Alat Laboratorium secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.110.

Tabel 5.110 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Unit Alat Laboratorium TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	0,00	0,00	0,00%	75.749.900,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00	100,00%	0,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	0,00	0,00	0,00%	71.444.900,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	1.204.465.537,00	1.201.080.000,00	99,72%	12.328.426.000,00
5	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.822.648.000,00	1.812.928.000,00	99,47%	0,00
Jumlah		4.307.113.537,00	4.294.008.000,00	99,70%	12.475.620.800,00

5.1.2.2.2.8.2 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah dianggarkan sebesar Rp599.897.500,00 dan terealisasi sebesar Rp574.897.500,00 atau mencapai 95,83% Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah mengalami peningkatan sebesar Rp574.897.500,00 atau lebih tinggi 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.111.



**Tabel 5.111 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga
Praktek Sekolah TA 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	0,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	499.897.500,00	474.897.500,00	95,00%	0,00
Jumlah		599.897.500,00	574.897.500,00	95,83%	0,00

5.1.2.2.2.8.3 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika mengalami penurunan sebesar Rp5.100.000,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp5.100.000,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.112.

**Tabel 5.112 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
TA 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal System/Power Supply	0,00	0,00	0,00%	3.400.000,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	0,00	0,00	0,00%	1.700.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00%	5.100.000,00

5.1.2.2.2.8.4 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica

Dalam TA 2022, Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica mengalami penurunan sebesar Rp35.000.000,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp35.000.000,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.113.

Tabel 5.113 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	35.000.000,00



5.1.2.2.2.8.5 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi mengalami penurunan sebesar Rp333.450.000,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp333.450.000,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.114.

Tabel 5.114 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Perangkat	0,00	0,00	0,00	333.450.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	333.450.000,00

5.1.2.2.2.9 Belanja Modal Komputer

TA 2022	TA 2021
3.070.781.736,00	6.472.353.535,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp3.360.524.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.070.781.736,00 atau mencapai 91,38% Realisasi Belanja Modal Komputer mengalami penurunan sebesar Rp3.401.571.799,00 atau lebih rendah 52,56% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp6.472.353.535,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Komputer secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.115.

Tabel 5.115 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Komputer Unit	2.826.822.500,00	2.575.760.037,00	91,12	2.793.226.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	533.701.500,00	495.021.699,00	92,75	3.679.127.535,00
Jumlah		3.360.524.000,00	3.070.781.736,00	91,38	6.472.353.535,00

5.1.2.2.2.9.1 Belanja Modal Komputer Unit

Dalam TA 2022, Belanja Modal Komputer Unit dianggarkan sebesar Rp2.826.822.500,00 dan terealisasi sebesar Rp2.575.760.037,00 atau mencapai 91,12% Realisasi Belanja Modal Komputer Unit mengalami penurunan sebesar Rp217.465.963,00 atau lebih rendah 7,79% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp2.793.226.000,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Komputer Unit secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.116.

Tabel 5.116 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer Unit TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Komputer Jaringan	118.475.000,00	112.014.999,00	94,55	2.084.431.900,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
2	Belanja Modal Personal Computer	2.386.611.500,00	2.255.671.038,00	94,51	407.737.000,00
3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	321.736.000,00	208.074.000,00	64,67	301.057.100,00
Jumlah		2.826.822.500,00	2.575.760.037,00	91,12	2.793.226.000,00

5.1.2.2.2.9.1 Belanja Modal Peralatan Komputer

Dalam TA 2022, Belanja Modal Peralatan Komputer Unit dianggarkan sebesar Rp533.701.500,00 dan terealisasi sebesar Rp495.021.699,00 atau mencapai 92,75% Realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer mengalami penurunan sebesar Rp3.184.105.836,00 atau lebih rendah 86,55% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp3.679.127.535,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Peralatan Komputer secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.117.

Tabel 5.117 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00%	0,00
2	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	403.041.500,00	364.521.699,00	90,44%	16.617.500,00
3	Belanja Modal Peralatan Jaringan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	2.844.181.065,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	96.160.000,00	96.000.000,00	99,83%	818.328.970,00
Jumlah		533.701.500,00	495.021.699,00	92,75%	3.679.127.535,00

	TA 2022	TA 2021
5.1.2.2.2.10 Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	4.441.500,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Eksplorasi dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% Realisasi Belanja Modal Alat Eksplorasi mengalami penurunan sebesar Rp4.441.500,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp4.441.500,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Alat Eksplorasi secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.118.

Tabel 5.118 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Eksplorasi TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	4.441.500,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	4.441.500,00

5.1.2.2.2.10.1 Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% Realisasi Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika mengalami penurunan sebesar Rp4.441.500,00 atau lebih rendah 100,00% dari



realisasi TA 2021 sebesar Rp4.441.500,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika secara rinci dapat dilihat pada tabel

Tabel 5.119 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00	4.441.500,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	4.441.500,00

5.1.2.2.2.11 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

TA 2022	TA 2021
0,00	29.877.500,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian mengalami penurunan sebesar Rp29.877.500,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp29.877.500,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.120.

Tabel 5.120 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	29.877.500,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	29.877.500,00

5.1.2.2.2.11.1 Belanja Modal Sumur

Dalam TA 2022, Belanja Modal Sumur dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% Realisasi Belanja Modal Sumur mengalami penurunan sebesar Rp29.877.500,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp29.877.500,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Sumur secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.121.

Tabel 5.121 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Sumur TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Sumur Lainnya	0,00	0,00	0,00%	29.877.500,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00%	29.877.500,00

5.1.2.2.2.12 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

TA 2022	TA 2021
9.200.000,00	3.100.000,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja dianggarkan sebesar Rp9.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.200.000,00 atau mencapai 100,00% Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja mengalami peningkatan sebesar Rp6.100.000,00 atau lebih tinggi 196,77%



dari realisasi TA 2021 sebesar Rp3.100.000,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.122.

Tabel 5.122 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Pelindung	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
Jumlah		9.200.000,00	9.200.000,00	100,00	3.100.000,00

5.1.2.2.2.12.1 Belanja Modal Alat Pelindung

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Pelindung dianggarkan sebesar Rp9.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.200.000,00 atau mencapai 100,00% Realisasi Belanja Modal Alat Pelindung mengalami peningkatan sebesar Rp9.200.000,00 atau lebih tinggi 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Alat Pelindung secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.123.

Tabel 5.123 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pelindung TA 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Baju Pengaman	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00	0,00
Jumlah		9.200.000,00	9.200.000,00	100,00	0,00

5.1.2.2.2.12.2 Belanja Modal SAR

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat SAR dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% Realisasi Belanja Modal Alat SAR mengalami penurunan sebesar Rp3.100.000,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp3.100.000,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal SAR secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.124.

Tabel 5.124 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal SAR TA 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	3.100.000,00

5.1.2.2.2.13 Belanja Modal Alat Peraga	TA 2022	TA 2021
	0,00	2.239.500,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Peraga dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% Realisasi Belanja Modal Alat Peraga mengalami penurunan sebesar Rp2.239.500,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar



Rp2.239.500,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.125.

Tabel 5.125 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00%	2.239.500,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00%	2.239.500,00

5.1.2.2.2.13.1 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan

Dalam TA 2022, Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan mengalami penurunan sebesar Rp2.239.500,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp2.239.500,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.126.

Tabel 5.126 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	0,00	0,00	0,00	2.239.500,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	2.239.500,00

	TA 2022	TA 2021
5.1.2.2.2.14 Belanja Modal Rambu-Rambu	51.882.000,00	99.910.000,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Rambu-Rambu dianggarkan sebesar Rp53.809.000,00 dan terealisasi sebesar Rp51.882.000,00 atau mencapai 96,42%. Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu mengalami penurunan sebesar Rp48.028.000,00 atau lebih rendah 48,07% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp99.910.000,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Rambu-Rambu secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.127.

Tabel 5.127 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	53.809.000,00	51.882.000,00	96,42	99.910.000,00
Jumlah		53.809.000,00	51.882.000,00	96,42	99.910.000,00



5.1.2.2.2.14.1 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Dalam TA 2022, Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat dianggarkan sebesar Rp53.809.000,00 dan terealisasi sebesar Rp51.882.000,00 atau mencapai 96,42%. Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu mengalami penurunan sebesar Rp48.028.000,00 atau lebih rendah 48,07% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp99.910.000,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.128.

**Tabel 5.128 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat TA 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	53.809.000,00	51.882.000,00	96,42	99.910.000,00
Jumlah		53.809.000,00	51.882.000,00	96,42	99.910.000,00

5.1.2.2.2.15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	TA 2022	TA 2021
		0,00	638.562.018,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Peralatan Olahraga dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Belanja Modal Peralatan Olahraga mengalami penurunan sebesar Rp638.562.018,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp638.562.018,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Peralatan Olahraga secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.129.

Tabel 5.129 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	638.562.018,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	638.562.018,00

5.1.2.2.2.15.1 Belanja Modal Peralatan Olahraga

Dalam TA 2022, Belanja Modal Peralatan Olahraga dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Belanja Modal Peralatan Olahraga mengalami penurunan sebesar Rp638.562.018,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp638.562.018,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Peralatan Olahraga secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.130.



Tabel 5.130 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	638.562.018,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	638.562.018,00

5.1.2.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	TA 2022	TA 2021
		0,00	5.729.322.241,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS mengalami penurunan sebesar Rp5.729.322.241,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp5.729.322.241,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.131.

Tabel 5.131 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	5.729.322.241,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	5.729.322.241,00

5.1.2.2.2.16.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Dalam TA 2022, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS mengalami penurunan sebesar Rp5.729.322.241,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp5.729.322.241,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.132.

Tabel 5.132 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	5.729.322.241,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	5.729.322.241,00

5.1.2.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	TA 2022	TA 2021
		0,00	412.996.250,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD mengalami penurunan sebesar Rp412.996.250,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp412.996.250,00. Rincian anggaran dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.133.



Tabel 5.133 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	412.996.250,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	412.996.250,00

5.1.2.2.2.17.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Dalam TA 2022, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD mengalami penurunan sebesar Rp412.996.250,00 atau lebih rendah 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp412.996.250,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.134.

Tabel 5.134 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	412.996.250,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	412.996.250,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
	74.323.315.084,00	33.830.974.656,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp113.702.908.287,00 dan terealisasi sebesar Rp74.323.315.084,00 atau mencapai 65,37%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp40.492.340.428,00 atau lebih tinggi 119,69% dibandingkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp33.830.974.656,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.135.

Tabel 5.135 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	112.128.857.186,00	72.964.280.233,00	65,07	28.201.919.876,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	354.778.635,00	354.778.635,00	100,00	4.257.513.150,00
3	Belanja Modal Bangunan Menara	4.740.000,00	4.740.000,00	100,00	90.060.000,00
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	1.272.234.630,00
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.214.532.466,00	999.516.216,00	82,30	0,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	9.247.000,00
Jumlah		113.702.908.287,00	74.323.315.084,00	65,37	33.830.974.656,00

5.1.2.2.3.1

Belanja Modal Bangunan Gedung

	TA 2022	TA 2021
	73.319.058.868,00	32.459.433.026,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Bangunan Gedung dianggarkan sebesar Rp112.483.635.821,00 dan terealisasi sebesar Rp73.319.058.868,00 atau mencapai 65,18%. Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp40.859.625.842,00 atau lebih tinggi 125,88% dibandingkan realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2021 sebesar Rp32.459.433.026,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.136.

Tabel 5.136 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	112.128.857.186,00	72.964.280.233,00	65,07	28.201.919.876,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	354.778.635,00	354.778.635,00	100,00	4.257.513.150,00
Jumlah		112.483.635.821,00	73.319.058.868,00	65,18	32.459.433.026,00

5.1.2.2.3.1.1

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

Dalam TA 2022, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dianggarkan sebesar Rp112.128.857.186,00 dan terealisasi sebesar Rp72.964.280.233,00 atau mencapai 65,07% Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp44.762.360.357,00 atau lebih tinggi 158,72% dibandingkan realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja TA 2021 sebesar Rp28.201.919.876,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.137.

Tabel 5.137 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	83.047.117.608,00	45.180.319.536,00	54,40	19.211.480.564,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
2	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	337.079.250,00	182.595.000,00	54,17	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	3.447.500,00	3.447.500,00	100,00	68.502.500,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.545.079.448,00	9.846.566.625,00	93,38	5.147.280.809,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	4.125.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.091.947.500,00	1.039.887.850,00	95,23	2.106.004.139,00
8	Belanja Modal Bangunan Industri	6.317.381.125,00	6.301.762.800,00	99,75	0,00
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.622.500,00	8.622.500,00	100,00	169.202.500,00
10	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	230.788.035,00	189.280.870,00	82,02	753.820.734,00
11	Belanja Modal Bangunan Parkir	158.435.000,00	148.042.500,00	93,44	209.765.000,00
12	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	826.483.520,00	751.548.970,00	90,93	342.535.480,00
13	Belanja Modal Taman	13.937.500,00	13.937.500,00	100,00	0,00
14	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	9.544.413.200,00	9.298.268.582,00	97,42	193.328.150,00
Jumlah		112.128.857.186,00	72.964.280.233,00	65,07	28.201.919.876,00

5.1.2.2.3.1.2 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Dalam TA 2022, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal dianggarkan sebesar Rp354.778.635,00 dan terealisasi sebesar Rp354.778.635,00 atau mencapai 100,00% Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3.902.734.515,00 atau lebih rendah 91,67% dibandingkan realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal TA 2021 sebesar Rp28.201.919.876,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.134.



Tabel 5.138 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	354.778.635,00	354.778.635,00	100,00	4.257.513.150,00
Jumlah		354.778.635,00	354.778.635,00	100,00	4.257.513.150,00

5.1.2.2.3.3

Belanja Modal Bangunan Menara

TA 2022	TA 2021
4.740.000,00	90.060.000,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Bangunan Menara dianggarkan sebesar Rp4.740.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.740.000,00 atau mencapai 100,00% Realisasi Belanja Modal Bangunan Menara pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp85.320.000,00 atau lebih rendah 94,74% dibandingkan realisasi Belanja Modal Bangunan Menara TA 2021 sebesar Rp90.060.000,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Menara secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.139. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Menara secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.139.

Tabel 5.139 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Menara TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	4.740.000,00	4.740.000,00	100,00	90.060.000,00
Jumlah		4.740.000,00	4.740.000,00	100,00	90.060.000,00

5.1.2.2.3.3.1 Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan

Dalam TA 2022, Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan dianggarkan sebesar Rp4.740.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.740.000,00 atau mencapai 100,00% Realisasi Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp85.320.000,00 atau lebih rendah 94,74% dibandingkan realisasi Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan TA 2021 sebesar Rp90.060.000,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.140.

Tabel 5.140 Anggaran dan Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas	4.740.000,00	4.740.000,00	100,00	90.060.000,00
Jumlah		4.740.000,00	4.740.000,00	100,00	90.060.000,00



5.1.2.2.3.4	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	TA 2022	TA 2021
		999.516.216,00	1.272.234.630,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dianggarkan sebesar Rp1.214.532.466,00 dan terealisasi sebesar Rp999.516.216,00 atau mencapai 82,30% Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp272.718.414,00 atau lebih rendah 21,44% dibandingkan realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2021 sebesar Rp1.272.234.630,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.141.

Tabel 5.141 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.214.532.466,00	999.516.216,00	82,30	1.272.234.630,00
Jumlah		1.214.532.466,00	999.516.216,00	82,30	1.272.234.630,00

5.1.2.2.3.4.1 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas

Dalam TA 2022, Belanja Modal Tugu/Tanda Batas dianggarkan sebesar Rp1.214.532.466,00 dan terealisasi sebesar Rp999.516.216,00 atau mencapai 82,30% Realisasi Belanja Modal Tugu/Tanda Batas pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp272.718.414,00 atau lebih rendah 21,44% dibandingkan realisasi Belanja Modal Tugu/Tanda Batas TA 2021 sebesar Rp1.272.234.630,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tugu/Tanda Batas secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.142.

Tabel 5.142 Anggaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Pagar	1.140.832.466,00	925.866.216,00	81,16	1.272.234.630,00
2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	73.700.000,00	73.650.000,00	99,93	0,00
Jumlah		1.214.532.466,00	999.516.216,00	82,30	1.272.234.630,00

5.1.2.2.3.5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	TA 2022	TA 2021
		0,00	9.247.000,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp9.247.000,00 atau mencapai 0,00% Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.247.000,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2021 sebesar Rp9.247.000,00. Rincian anggaran dan



Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.143.

Tabel 5.143 Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	9.247.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	9.247.000,00

5.1.2.2.3.5.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Dalam TA 2022, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp9.247.000,00 atau mencapai 0,00% Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.247.000,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2021 sebesar Rp9.247.000,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.144.

Tabel 5.144 Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00%	9.247.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00%	9.247.000,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	TA 2022	TA 2021
	78.055.523.650,00	73.778.890.701,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp119.721.092.275,00 dan terealisasi sebesar Rp78.055.523.650,00 atau mencapai 65,20%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp4.276.632.949,00 atau lebih tinggi 5,80% dibandingkan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp73.778.890.701,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.145.

Tabel 5.145 Anggaran dan Realisasi Modal Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Jalan	87.170.804.088,00	48.879.312.430,00	56,07	43.600.395.714,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
2	Belanja Modal Jembatan	2.561.812.102,00	1.038.388.500,00	40,53	817.195.700,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.497.337.604,00	2.149.651.882,00	86,08	2.312.946.889,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	0,00	0,00	00,00	3.105.727.183,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.735.060.474,00	13.122.233.479,00	95,54	8.525.790.866,00
6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	3.300.000,00	0,00	00,00	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	856.638.591,00	719.574.500,00	84,00	23.533.000,00
8	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7.326.945.695,00	6.961.163.229,00	95,01	40.000.000,00
	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	00,00	2.785.555.800,00
	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	295.108.200,00	295.108.200,00	100,00	2.821.500.000,00
10	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.419.215.171,00	4.038.319.929,00	91,38	8.575.591.199,00
11	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	842.840.000,00	839.741.151,00	99,63	581.724.098,00
12	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	00,00	269.353.602,00
	Belanja Modal Jaringan Gas	12.030.350,00	12.030.350,00	100,00	319.576.650,00
Jumlah		119.721.092.275,00	78.055.523.650,00	65,20	73.778.890.701,00

5.1.2.2.4.1 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Dalam TA 2022, Belanja Modal Jalan dan Jembatan dianggarkan sebesar Rp89.732.616.190,00 dan terealisasi sebesar Rp49.917.700.930,00 atau mencapai 55,63% Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.500.109.516,00 atau lebih rendah 12,38% dibandingkan realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2021 sebesar Rp44.417.591.414,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.146.

Tabel 5.146 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2022



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Jalan				
	Belanja Modal Jalan Kabupaten	71.392.478.301,00	34.424.674.721,00	48,22	30.425.745.860,00
	Belanja Modal Jalan Kota	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	Belanja Modal Jalan Desa	50.000.000,00	43.755.000,00	87,51	0,00
	Belanja Modal Jalan Khusus	14.265.007.002,00	13.106.080.709,00	91,88	12.944.619.854,00
	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.463.318.785,00	1.304.802.000,00	89,17	200.030.000,00
2	Belanja Modal Jembatan	6			
	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.419.734.102,00	896.310.500,00	37,04	734.624.000,00
	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	142.078.000,00	142.078.000,00	100,00	81.000.000,00
	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus	0,00	0,00	0,00	1.571.700,00
	Jumlah	89.732.616.190,00	49.917.700.930,00	55,63	44.417.591.414,00

5.1.2.2.4.2 Belanja Modal Bangunan Air

Dalam TA 2022, Belanja Modal Bangunan Air dianggarkan sebesar Rp24.419.282.364,00 dan terealisasi sebesar Rp22.952.623.090,00 atau mencapai 93,99% Realisasi Belanja Modal Bangunan Air pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp8.944.625.152,00 atau lebih tinggi 63,85% dibandingkan realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2021 sebesar Rp14.007.997.938,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.147.

Tabel 5.147 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi				
	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	72.426.050,00	68.521.550,00	94,61	1.453.245.341,00
	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00	118.500.000,00
	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	478.913.054,00	451.355.432,00	94,25	0,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	482.906.048,00
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.945.998.500,00	1.629.774.900,00	83,75	258.295.500,00
		2.497.337.604,00	2.149.651.882,00	86,08	2.312.946.889,00
2	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	3.105.727.183,00
	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	3.049.969.733,00
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	55.757.450,00
		0,00	0,00	0,00	3.105.727.183,00
3	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam				
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.489.128.050,00	3.489.123.889,00	100,00	8.032.770.866,00
	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	0,00	0,00	0,00	5.830.000,00
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	0,00	0,00	0,00	7.620.000,00
	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	10.245.932.424,00	9.633.109.590,00	94,02	479.570.000,00
		13.735.060.474,00	13.122.233.479,00	95,54	8.525.790.866,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah				
	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku				
	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	13.161.750,00
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	856.638.591,00	719.574.500,00	84,00	10.371.250,00
		856.638.591,00	719.574.500,00	84,00	23.533.000,00



No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor				
	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	175.940.000,00	167.143.000,00	95,00	40.000.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	7.151.005.695,00	6.794.020.229,00	95,01	0,00
		7.326.945.695,00	6.961.163.229,00	95,01	40.000.000,00
	Jumlah	24.419.282.364,00	22.952.623.090,00	93,99	10.902.270.755,00

5.1.2.2.4.3 Belanja Modal Instalasi

Dalam TA 2022, Belanja Modal Instalasi dianggarkan sebesar Rp1.137.948.200,00 dan terealisasi sebesar Rp1.134.849.351,00 atau mencapai 99,73% Realisasi Belanja Modal Instalasi pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.053.930.547,00 atau lebih rendah 81,66% dibandingkan realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2021 sebesar Rp6.188.779.898,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.148.

Tabel 5.148 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Instalasi Air Kotor				
	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.785.555.800,00
		0,00	0,00	0,00	2.785.555.800,00
2	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah				
	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	295.108.200,00	295.108.200,00	100,00	2.821.500.000,00
		295.108.200,00	295.108.200,00	100,00	2.821.500.000,00
3	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik				
	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	842.840.000,00	839.741.151,00	99,63	581.724.098,00
		842.840.000,00	839.741.151,00	99,63	581.724.098,00
	Jumlah	1.137.948.200,00	1.134.849.351,00	99,73	6.188.779.898,00

5.1.2.2.4.4 Belanja Modal Jaringan

Dalam TA 2022, Belanja Modal Jaringan dianggarkan sebesar Rp4.431.245.521,00 dan terealisasi sebesar Rp4.050.350.279,00 atau mencapai 91,40% Realisasi Belanja Modal Jaringan pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.114.171.172,00 atau lebih rendah 55,80% dibandingkan realisasi Belanja Modal Jaringan TA 2021 sebesar Rp9.164.521.451,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.149.

Tabel 5.149 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan TA 2022



(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Jaringan Air Minum				
	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	4.419.215.171,00	4.038.319.929,00	91,38	8.575.591.199,00
		4.419.215.171,00	4.038.319.929,00	91,38	8.575.591.199,00
2	Belanja Modal Jaringan Listrik				
	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	269.353.602,00
		0,00	0,00	0,00	269.353.602,00
3	Belanja Modal Jaringan Gas				
	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	12.030.350,00	12.030.350,00	100,00	319.576.650,00
		12.030.350,00	12.030.350,00	100,00	319.576.650,00
	Jumlah	4.431.245.521,00	4.050.350.279,00	91,40	9.164.521.451,00

	TA 2022	TA 2021
5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.896.532.500,00	119.998.000,00

Dalam TA 2022, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp1.898.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.896.532.500,00 atau mencapai 99,87%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.776.534.500,00 atau lebih tinggi 1480,47 % dibandingkan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp119.998.000,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.150.

Tabel 5.150 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	99,99	119.998.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.860.980.000,00	1.858.532.500,00		0,00
	Jumlah	1.898.980.000,00	1.896.532.500,00	99,87	119.998.000,00

5.1.2.2.5.1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Dalam TA 2022, Dalam TA 2022 tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan. Realisasi Belanja Bahan Perpustakaan pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp119.998.000,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2021 sebesar Rp119.998.000,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.151.



Tabel 5.151 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak				
	Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	119.998.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	119.998.000,00

5.1.2.2.5.2 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Dalam TA 2022, Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga dianggarkan sebesar Rp38.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp38.000.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp38.000.000,00 atau lebih tinggi 100,00 % dibandingkan realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga TA 2021 sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.143.

Tabel 5.152 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian				
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	0,00

5.1.2.2.5.3 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Dalam TA 2022, Belanja Modal Aset Tidak Berwujud dianggarkan sebesar Rp1.860.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.858.532.500,00 atau mencapai 99,87%. Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp1.858.532.500,00 atau lebih tinggi 100,00 % dibandingkan realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud TA 2021 sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.143.

Tabel 5.153 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud				
	Belanja Modal Software	200.500.000,00	200.052.500,00	99,78%	0,00
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.660.480.000,00	1.658.480.000,00	99,88%	0,00
	Jumlah	1.860.980.000,00	1.858.532.500,00	99,87%	0,00



	TA 2022	TA 2021
5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	1.444.530.800,00	2.799.387.174,50

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dalam Tahun Anggaran 2022 wabah COVID-19 secara nasional telah melanda dan dalam tahun 2022 juga telah dilakukan penanganan bencana gempa bumi yang berdampak pada Kecamatan Pasimarannu dan Pasilambena dengan pembangunan rumah penduduk yang mengalami rusak berat, sedang dan ringan melalui program dan kegiatan pada Dinas Perkim dan BPBD. Adapun penggunaan belanja tidak terduga selama T.A. 2022 dalam rangka penanganan Covid-19, gempa bumi, banjir, dan cuaca ekstrim telah ditindaklanjuti oleh Bupati Kepulauan Selayar sebagai situasi tanggap darurat bencana berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 584/XII/Tahun 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam di Kabupaten Kepulauan Selayar. Surat Pernyataan Keadaan Tanggap Darurat Bencana. BTT Tahun Anggaran 2022 termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah diterima berupa adanya pengembalian atas hasil penjualan aset tetap dalam tahun 2022.

Atas dasar Keputusan Bupati dan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana, maka Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp2.250.000.000,00 dan terealisasi hingga akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.444.530.800,00 atau mencapai 64,20%. Realisasi Belanja Tidak Terduga pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.354.856.374,50 atau lebih rendah 48,40% dibandingkan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 sebesar Rp2.799.387.174,50. Dari realisasi Belanja Tidak Terduga tersebut diketahui adanya pengembalian saldo akhir Kas bos yang disetor ke Kas Daerah tahun 2021 sebesar Rp198.500,00, pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB An.Patialang sebesar Rp4.322.300,00 dan pengembalian hasil penjualan aset tetap dalam tahun 2022 sebesar Rp95.250.000,00. Belanja BTT sebesar Rp1.344.760.000,00 merupakan belanja pada BPBD yang masing-masing digunakan dalam penanggulangan bencana gempa bumi sebesar Rp300.000.000,00, penanganan Covid-19 sebesar Rp450.000.000,00, penanggulangan banjir sebesar Rp300.000.000,00 serta penanggulangan cuaca ekstrim Rp294.760.000,00. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja tidak terduga secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.144.

Tabel 5.154 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Nama OPD	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.344.760.000,00	1.344.760.000,00	100,00	2.542.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
3	BPKPD	905.240.000,00	99.770.800,00	100,00	107.387.174,50
Jumlah		2.250.000.000,00	1.444.530.800,00	94,94	2.799.387.174,50

Penurunan BTT pada TA 2022 disebabkan penganggaran belanja dalam rangka penanganan pandemic COVID-19 dan penanganan dampak gempa pada Kecamatan Pasimarannu dan Pasilambena telah dianggarkan pada akun belanja yang sesuai dengan substansi belanja.



		TA 2022	TA 2021
5.1.3	Transfer	135.707.988.653,00	154.978.189.589,00

Pada TA 2022 Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bagi Hasil Pendapatan meliputi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah, sedangkan Transfer Bantuan Keuangan meliputi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. Pada APBD Perubahan TA 2022 Kabupaten Kepulauan Selayar dianggarkan sebesar Rp135.839.666.582,00 dan terealisasi sebesar Rp135.707.988.653,00 atau mencapai 99,90%. Realisasi Transfer mengalami penurunan sebesar Rp19.270.200.936,00 atau lebih rendah 12,43% dibandingkan realisasi Transfer TA 2021 sebesar Rp154.978.189.589,00. Rincian anggaran dan Realisasi Transfer secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.155.

Tabel 5.155 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.500.000.000,00	1.369.303.500,00	91,29	1.344.635.355,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	134.339.666.582,00	134.338.685.153,00	99,99	153.633.554.234,00
Jumlah		135.839.666.582,00	135.707.988.653,00	99,90	154.978.189.589,00

		TA 2022	TA 2021
5.1.3.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.369.303.500,00	1.344.635.355,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.369.303.500,00 atau mencapai 91,29%. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp24.668.145,00 atau lebih tinggi 1,83% dibandingkan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2021 sebesar Rp1.344.635.355,00. Rincian anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.156.

Tabel 5.156 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.200.000.000,00	1.095.442.800,00	91,25	1.075.708.283,00
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	300.000.000,00	273.860.700,00	91,29	268.927.072,00
3	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.500.000.000,00	1.344.635.355,00	89,64	1.242.601.930,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut seluruhnya merupakan pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA 2022 yang diberikan kepada 81 desa dengan rincian pada **Lampiran 3.a**.

Atas pengelolaan dana tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Desa TA 2022 dengan ikhtisar dapat dilihat pada **Lampiran 3.b**.



		TA 2022	TA 2021
5.1.3.2	Transfer Bantuan Keuangan	134.338.685.153,00	153.633.544.234,00

Dalam TA 2022, Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp134.339.666.582,00 dan terealisasi sebesar Rp134.338.685.153,00 atau mencapai 99,99%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp19.294.869.081,00 atau lebih rendah 12,56% dibandingkan realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar Rp153.633.544.234,00. Rincian anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.157.

Tabel 5.157 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	134.339.666.582,00	134.338.685.153,00	99,99	153.633.544.234,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		134.339.666.582,00	134.338.685.153,00	99,99	153.633.544.234,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari pembayaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan Dana Desa secara rinci dapat dilihat pada table 5.158.

Tabel 5.158 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	SK	Realisasi	Sisa
1	Alokasi Dana Desa	63.294.461.582,00	63.294.461.582,00	63.293.480.153,00	981.429,00
2	Bantuan Dana Desa	71.045.205.000,00	71.045.205.000,00	71.045.205.000,00	0,00
Jumlah		134.339.666.582,00	134.339.666.582,00	134.338.685.153,00	0,00

Bantuan keuangan berupa Dana Desa tersebut diberikan kepada 81 Desa dari RKUN langsung ke RKUDes sebagai bentuk penerusan transfer TKDD dengan rincian pada **Lampiran 3.a**.

Atas pengelolaan dana tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2022 dengan ikhtisar dapat dilihat pada **Lampiran 3.b**.

		TA 2022	TA 2021
5.1.4	Surplus/(Defisit)	23.056.567.176,01	847.853.884,34

Berdasarkan total realisasi sampai dengan akhir Tahun 2022 atas pendapatan sebesar Rp1.021.771.355.235,53, belanja sebesar Rp863.006.799.406,52 dan transfer sebesar Rp135.707.988.653,00, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja) sebesar Rp23.056.567.176,01. Surplus pendapatan dari belanja tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp22.208.713.291,67 atau lebih tinggi 2619,40% dari surplus TA 2021 sebesar Rp847.853.884,34.



	TA 2022	TA 2021
5.1.5 Pembiayaan	66.660.837.653,41	65.601.373.624,07

Dalam TA 2022 pada kelompok Pembiayaan dalam Struktur APBD Kabupaten Kepulauan Selayar pada posisi Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp66.449.227.508,00 dan terealisasi sebesar Rp66.660.837.653,41 atau mencapai 100,32% yang terdiri dari SiLPA TA 2021 sebesar Rp66.449.227.508,41 dan penerimaan kembali piutang pinjaman uang muka perumahan serta piutang Dana pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar Rp211.610.145,00.

Sedangkan pada posisi Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2022 tidak terdapat anggaran dan direalisasi. Secara sistematis Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan secara rinci pada tabel 5.159.

Tabel 5.159 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2022 (dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Penerimaan Pembiayaan	66.449.227.508,00	66.660.837.653,41	100,32	67.601.373.624,07
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	00,00	(2.000.000.000,00)
Jumlah		66.449.227.508,00	66.660.837.653,41	100,32	65.601.373.624,07

	TA 2022	TA 2021
5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan	66.660.837.653,41	67.601.373.624,07

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp66.449.227.508,00 dapat direalisasi sebesar Rp66.660.837.653,41 atau mencapai 100,32%. Mengalami penurunan sebesar 940.535.970,66 atau lebih rendah 1,39% dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp67.601.373.624,07. Rincian anggaran dan Realisasi penerimaan pembiayaan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.160.

Tabel 5.160 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 (dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Penggunaan SiLPA	66.449.227.508,00	66.449.227.508,41	100,32	67.488.955.992,07
2	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	211.610.145,00	00,00	112.417.632,00
Jumlah		66.449.227.508,00	66.660.837.653,41	100,32	67.601.373.624,07

Penerimaan Kembali Piutang sebesar Rp211.610.145,00 merupakan penerimaan atas:

- Pengembalian pinjaman uang muka perumahan bagi PNS sebesar Rp5.603.800,00 pada Sekretariat Daerah;
- Pengembalian atas pinjaman Dana Bergulir Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp206.006.345,00 pada Sekretariat Daerah.

	TA 2022	TA 2021
5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan	0,00	2.000.000.000,00

Dalam tahun anggaran 2022 tidak terdapat anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan.



Tabel 5.161 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	00,00	2.000.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	00,00	2.000.000.000,00

5.1.6

SiLPA

TA 2022

89.717.404.829,42

TA 2021

66.449.227.508,41

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022, yaitu sebesar Rp89.717.404.829,42 mengalami peningkatan sebesar Rp23.268.177.321,01 atau lebih tinggi 35,02% dari TA 2021 sebesar 66.449.227.508,41. SiLPA secara rinci dapat dilihat pada table 5.162.

Tabel 5.162 Rincian SiLPA TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Kas di Kas Daerah	80.213.551.864,57	34.613.323.803,31
2	Kas di Bendahara Penerimaan	40.881.700,00	69.574.600,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran (setelah dikurangi Utang PFK)	6.364.600,00	24.000.195,73
4	Kas di BLUD	9.001.238.042,67	12.470.455.577,19
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	930.150,00	1.795.502,00
6	Kas Dana Bos	430.693.672,18	1.270.077.830,18
7	Setara Kas (deposito pada Bank Sulselbar)	0,00	18.000.000.000,00
8	Kas Lainnya	23.744.800,00	331.364,00
9	Utang PFK	0,00	(331.364,00)
Jumlah		89.717.404.829,42	66.449.227.508,41

SiLPA TA 2022 berupa Kas di Kas Daerah yang sudah ada peruntukannya dapat dilihat pada tabel 5.163.

Tabel 5.163 Dana yang Sudah Ada Peruntukannya Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sisa Dana di Kas Daerah (Rp)
1	Pembayaran Utang 2022	18.042.014.351,23
2	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	34.088.675.670,00
3	DAK Reguler Bidang Pendidikan	322.016.725,00
4	DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	20.000.000,00
4	DAK Reguler Bidang Jalan	1.222.196.577,00
5	DAK Penugasan Bidang Kelautan Perikanan	109.111.642,00
7	DAK Penugasan Bidang Pertanian	813.591,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Sisa Dana di Kas Daerah (Rp)
8	DAK Fisik Pariwisata	62.280.870,00
9	DAK Non fisik BOP PAUD	1.968.800,00
10	DAK Non fisik BOP Kesetaraan	23.400.000,00
11	DAK Non fisik Tunjangan Profesi Guru	1.459.488.060,00
12	DAK Non fisik Tambahan Penghasilan Guru	459.460.000,00
13	DAK Non fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.004.804.882,00
14	DAK Non fisik Penataan Pariwisata	211.952.501,00
15	DAK Non fisik Bantuan Admnistrasi Kependudukan	7.611.929,00
16	DAK Non fisik BOK	3.269.919.100,00
17	Dana Insentif Daerah	687.135.255,00
18	DAK Penugasan Lingkungan Hidup	342.450.000,00
19	DAK Penugasan Industri Kecil dan Menengah	16.664.316,00
20	DAK Penugasan Jalan	254.823.750,00
21	DAK Non Fisik FKM	73.706.000,00
22	DAK Non Fisik KPP	6.437.000,00
23	DAK Non Fisik PK2SIKM	82.302.800,00
24	DAK Non Fisik TKG	412.579.100,00
25	DAK Non Fisik PK2UMK	2.600.000,00
26	DAK Non Fisik BOP MTB	24.319.254,00
27	Dana Hibah BNPB	5.068.047.500,00
28	DAU	12.936.772.191,34
Jumlah		80.213.551.864,57



5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Selisih Anggaran Lebih

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	66.449.227.508,41	67.488.955.992,07
<p>Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.</p>		
	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	66.449.227.508,41	67.488.955.992,07
<p>Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Pada Tahun 2022 Penggunaan SAL merupakan penerimaan pembiayaan berupapenggunaan SiLPA sebesar Rp66.449.227.508,41.</p>		
	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	89.717.404.829,42	66.449.227.508,41
<p>Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp89.717.404.829,42.</p>		
	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.2.4 Saldo Anggaran Lebih pada Tahun 2022	89.717.404.829,42	66.449.227.508,41



5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

Posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

Aset sebesar	Rp	1.980.395.572.520,34
Kewajiban sebesar	Rp	17.639.758.401,40
Ekuitas sebesar	Rp	1.962.755.814.118,94

Jumlah aset sebesar Rp1.980.395.572.520,34 terdiri atas aset lancar sebesar Rp136.249.283.256,79; investasi jangka panjang sebesar Rp53.569.834.782,34; aset tetap sebesar Rp1.733.737.692.338,21; dan aset lainnya sebesar Rp 56.838.762.143,00. Jumlah kewajiban sebesar Rp17.639.758.401,40 seluruh hanya merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp17.639.758.401,40. Total ekuitas sebesar Rp1.962.755.814.118,94

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.3.1 Aset	1.980.395.572.520,34	2.108.649.684.023,49

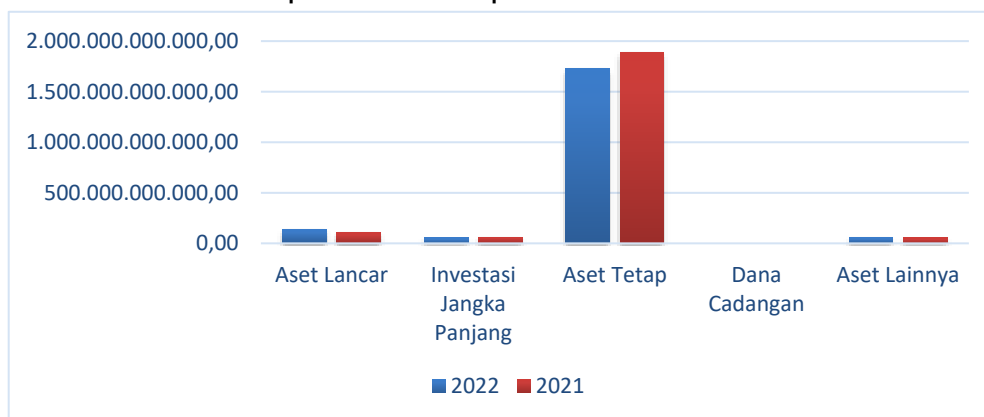
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, secara rinci dapat dilihat pada table 5.164.

Tabel 5.164 Rincian Aset per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Aset Lancar	136.249.283.256,79	106.477.837.456,05	27,96
2	Investasi Jangka Panjang	53.569.834.782,34	62.572.592.688,81	(14,39)
3	Aset Tetap	1.733.737.692.338,21	1.886.305.566.021,27	(8,09)
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	56.838.762.143,00	53.293.687.857,36	6,65
Jumlah Aset		1.980.395.572.520,34	136.249.283.256,79	(6,08)

Gambar 5.3.1 Komposisi Rincian Aset per 31 Desember 2022 dan 2021





5.3.1.1 Aset Lancar **TA 2022** **136.249.283.256,79** **TA 2021** **106.477.837.456,05**

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Belanja (Beban) Dibayar Dimuka, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya dan Persediaan. Nilai Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp136.249.283.256,79 dan Rp106.477.837.456,05 mengalami peningkatan sebesar Rp29.771.445.800,74 atau sebesar 27,96% secara rinci dapat dilihat pada table 5.165.

Tabel 5.165 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Kas di Kas Daerah	80.213.551.864,57	34.613.323.803,31	131,74
2	Kas di Bendahara Penerimaan	40.881.700,00	69.574.600,00	(41,24)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.364.600,00	24.000.195,73	(73,48)
4	Kas di BLUD	9.001.238.042,67	12.470.455.577,19	(27,82)
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	930.150,00	1.795.502,00	(48,20)
6	Kas Dana BOS	430.693.672,18	1.270.077.830,18	(66,09)
7	Kas Lainnya	23.744.800,00	331.364,00	(100,00)
8	Setara Kas	0,00	18.000.000.000,00	(99,87)
9	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	-
10	Piutang Pajak	3.515.016.425,00	2.593.704.427,00	35,52
	Penyisihan Piutang Pajak	(1.494.640.304,20)	(1.235.695.238,36)	20,96
	Piutang Pajak Netto	2.020.376.120,81	1.358.009.188,64	48,77
11	Piutang Retribusi	272.634.000,00	185.485.000,00	46,98
	Penyisihan Piutang Retribusi	(174.399.900,00)	(157.495.000,00)	10,73
	Piutang Retribusi Netto	98.234.100,00	27.990.000,00	250,96
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.574.024.104,24	1.944.173.808,00	32,40
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(12.870.120,52)	(9.720.869,04)	32,40
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	2.561.153.983,72	1.934.452.938,96	0
13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-
	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto	0,00	0,00	-
14	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	14.047.556.888,00	12.573.011.767,00	11,73
	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(70.237.784,44)	(62.865.058,84)	11,73
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	13.977.319.103,56	12.510.146.708,17	11,73
15	Belanja (Beban) Dibayar Dimuka	507.868.249,85	109.784.752,42	362,60
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	188.220.900,00	220.220.900,00	(14,53)



No	Uraian	2022	2021	%
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(188.220.900,00)	(220.220.900,00)	(14,53)
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0,00	0,00	-
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.374.542.080,61	5.374.542.080,61	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(5.374.542.080,61)	(5.374.542.080,61)	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	0,00	0,00	-
18	Piutang Uang Muka	0,00	226.319.635,80	(100,00)
	Penyisihan Piutang Uang Muka	0,00	(1.131.598,18)	(100,00)
	Piutang Uang Muka netto	0,00	225.188.037,62	(100,00)
19	Piutang Lainnya	6.462.273.007,25	6.673.883.152,25	(3,17)
	Penyisihan Piutang Lainnya	(6.462.273.007,25)	(6.649.014.122,25)	(2,81)
	Piutang Lainnya Netto	0,00	24.869.030,00	(100,00)
20	Persediaan	27.366.926.869,43	23.837.837.927,83	14,80
	Jumlah Aset Lancar	136.249.283.256,79	106.477.837.456,05	27,96%

	TA 2022	TA 2021
5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	80.213.551.864,57	34.613.323.803,31

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp80.213.551.864,57 dan Rp34.613.323.803,31.

Kas di Kas Daerah sebesar Rp80.213.551.864,57 merupakan saldo kas di rekening Bank berdasarkan hasil rekonsiliasi pada empat rekening giro yang terdapat pada tiga Bank, yaitu PT Bank Sulselbar, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Terdapat selisih sebesar Rp9.074.332,00 antara saldo kas di bank dan saldo kas di buku, selisih tersebut karena Bank Sulselbar lebih melakukan debit pada rekening kas daerah masing-masing pada PMPTSPTK sebesar Rp5.000.000,00 sesuai SP2D nomor 6931/SP2D-LS/XII/PMPTSPTK/2022 tanggal 21 Des 2022 An. Andi Aprizal, Dinas Sosial sebesar Rp3.600.000,00 sesuai SP2D nomor 10367/SP2D-LS/XII/DINSOS/2022 tanggal 29 Des 2022 An.Kiki Ariani, Dinas Sosial sebesar Rp450.000,00 sesuai SP2D nomor 10400/SP2D-LS/XII/DINSOS/2022 tanggal 29 Des 2022 An.Baeduri, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp10.000,00 sesuai SP2D nomor 4606/SP2D-LS/X/BPKPD/2022 tanggal 19 Okt 2022 An. Desa Bontobulaeng, dan koreksi pajak atas bunga rekening 42-001-000000001-0 pada PT Bank Sulselbar sebesar Rp14.332,00, dengan rincian kas pada masing-masing bank dapat dilihat pada table 5.166.



Tabel 5.166. Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Nama Bank Nama dan Nomor Rekening	2022	2021	%
1	PT Bank Sulselbar			
	a. Rekening Penyimpanan dana dari Pemerintah Provinsi dan PAD No. Rek. 42-001-000000001-0	23.799.550.041,39	4.024.274.267,13	491,40
	b. Rekening Penyimpanan dana dari Pemerintah Pusat No. Rek. 42-001-000001525-4	50.801.968.665,72	25.085.495.297,09	102,52
2	PT BRI (Persero) Tbk			
	Rekening Penyimpanan dana berupa deposito. bunga deposito dan jasa giro No. Rek. 0257-01-000458-30-5	2.892.927.223,46	2.838.212.619,46	1,93
3	PT BNI (Persero) Tbk			
	Rekening Penyimpanan dana berupa deposito. bunga deposito dan jasa giro No. Rek. 1000-132-133	2.710.031.602,00	2.665.341.621,00	1,68
Jumlah Kas di Kas Daerah		80.204.477.532,57	34.613.323.804,68	56,84

Kenaikan signifikan jumlah Kas di Kas Daerah berkisar 56,84% atau sebesar Rp45.591.153.727,89, disebabkan adanya pencairan deposito pada akhir tahun anggaran 2022.

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	40.881.700,00	69.574.600,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.881.700,00 merupakan kas penerimaan di Bendahara Penerimaan OPD dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.167.

Tabel 5.167 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	OPD	2022	2021	%
1	RSUD K.H. Hayyung	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Perhubungan	30.651.400,00	56.988.000,00	(46,21)
3	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	10.230.300,00	12.586.600,00	(18,72)
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan		40.881.700,00	69.574.600,00	(41,24)

Seluruh Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan dan Kas pada Bendahara Penerimaan Dinas Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah telah seluruhnya disetor ke Kasda sampai bulan Februari 2022. Keterlambatan penyetoran ke kas daerah dalam TA 2022 terjadi karena adanya keterlambatan penyetoran dari kolektor yang sebahagian besar bertugas diwilayah kecamatan kepulauan ke Bendahara Penerimaan SKPD.



Seluruh bendahara penerimaan SKPD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki rekening penampungan pada PT Bank Sulselbar Cabang Selayar, seluruh transaksi wajib disetor ke kas daerah pada setiap akhir hari kerja kecuali untuk lokasi yang sulit menjangkau fasilitas perbankan dalam jangka waktu satu hari kerja. dengan rincian pada *Lampiran 4*.

	TA 2022	TA 2021
5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	6.364.600,00	24.000.195,73

Tabel 5.168 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

No	OPD	2022	2021	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
5	Kecamatan Buki	6.220.000,00	0,00	100,00
6	Kelurahan Batangmata	144.600,00	0,00	100,00
7	Kecamatan Taka Bonerate	0,00	24.000.000,00	(100,00)
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	195,73	(100,00)
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran		6.364.600,00	24.000.195,73	(73,48)

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran terdapat pada *Lampiran 5*.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp6.364.600,00 dan Rp24.000.195,73. Dalam Tahun Anggaran 2022 masih terdapat kas tunai pada Kas di Bendahara Pengeluaran OPD Kecamatan Buki sebesar Rp6.220.000.00,00 dan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 16 Januari 2023 serta pada Kelurahan Batangmata sebesar Rp144.600,00 yang telah disetor ke kas daerah pada tanggal 20 Februari 2023.

	TA 2022	TA 2021
5.3.1.1.4 Kas di BLUD	9.001.238.042,67	12.470.455.577,19

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp9.001.238.042,67 dan sebesar Rp12.470.455.577,19 merupakan saldo Kas di BLUD RSUD K.H. Hayyung. RSUD K.H. Hayyung ditetapkan menjadi BLUD berstatus penuh berdasarkan SK Bupati Nomor 134/III/Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016. Adapun pembukaan rekening Kas BLUD pada Bank Sulselbar ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar Nomor 15.b/II/HP/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar.

Tabel 5.169 Rincian Mutasi Kas di BLUD

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Mutasi
1	Saldo Kas BLUD 31-12-2021	12.470.455.577,19
2	Pendapatan BLUD	21.004.303.207,00



3	Belanja BLUD	(24.473.520.741,52)
4	Saldo Kas BLUD 31-12-2022	9.001.238.042,67

Tabel 5.170 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	2022	2021	%
PT Bank Sulselbar No Rek 42-00200005604-7				
1	Pendapatan Pasien Umum	1.030.115.903,00	1.030.115.903,00	0,00
2	Pendapatan Pasien Umum (Jasa Sarana)	1.066.160.195,06	1.766.160.195,06	(39,63)
3	Pendapatan SKTM	0,00	737.435.401,88	(100,00)
4	Pendapatan Jasa Raharja (Jasa Sarana)	330.024.262,70	330.024.262,70	0,00
5	Pendapatan Jasa Raharja	454.831.028,28	454.831.028,28	0,00
6	Pendapatan Ketenagakerjaan (Jasa Sarana)	28.964.061,00	28.964.061,00	0,00
7	Pendapatan Ketenagakerjaan	46.649.341,24	46.649.341,24	0,00
8	Pendapatan <i>In Health</i> (Jasa sarana)	11.639.544,48	11.639.544,48	0,00
9	Pendapatan JKN (Jasa Sarana)	2.067.004.975,95	2.067.004.975,95	0,00
10	Pendapatan JKN	2.929.617.952,36	3.304.957.664,00	(11,36)
11	Pendapatan Lain-Lain (Parkir)	0,00	25.418.000,00	(100,00)
12	Pendapatan Lain-Lain (Pengembalian TPP)	0,00	0,00	0,00
13	Pendapatan Jasa Giro BPD	756.868.850,00	756.868.850,00	0,00
14	Pendapatan Lain-lain (Penjualan O2)	0,00	1.050.000,00	(100,00)
15	Pendapatan Covid-19	279.361.928,60	1.909.336.349,60	(85,37)
	Jumlah	9.001.238.042,67	12.470.455.577,19	(27,82)

	TA 2022	TA 2021
5.3.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP	930.150,00	1.795.502,00

Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan sisa kas Dana Kapitasi di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Puskesmas selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp930.150,00 yang seluruhnya terdiri dari saldo kas di Bank Sulselbar dengan rincian dapat dilihat pada table 5.171.

Tabel 5.171 Rincian Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	FKTP	Saldo 2022	Saldo 2021	%
1	Puskesmas Parangia	17	12.317,00	(99,86)
2	Puskesmas Bontomatene	0	0	0,00
3	Puskesmas Buki	0	0	0,00
4	Puskesmas Polebunging	0	0	0,00
5	Puskesmas Barugaia	0	0	0,00
6	Puskesmas Benteng	0	173	0,00
7	Puskesmas Bontosunggu	0	0	0,00
8	Puskesmas Bontosikuyu	0	0	0,00



(dalam Rupiah)

No	FKTP	Saldo 2022	Saldo 2021	%
9	Puskesmas Lowa	930.000,00	930.000,00	0,00
10	Puskesmas Benteng Jampea	0	109	100,00
11	Puskesmas Ujung Jampea	92	92	0,00
12	Puskesmas Pasimarannu	0	852.206,00	100,00
13	Puskesmas Pasitallu	41	41	0,00
14	Puskesmas Pasilambena	0	564	100,00
Jumlah		930.150,00	1.795.502,00	(48,20)

Penurunan signifikan Saldo Kas di Bendahara FKTP berkisar (48,20%) atau sebesar Rp865.352,00 karena adanya peningkatan realisasi penyerapan belanja Dana Kapitasi JKN pada 14 FKTP. Rincian perhitungan Kas di Bendahara FKTP, lebih lanjut pada *Lampiran 6*.

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.3.1.1.6 Kas Dana BOS	430.693.672,18	1.270.077.830,18

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar 430.693.672,18 saldo Kas tersebut merupakan Sisa Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada pada tiap sekolah negeri di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mulai tingkat SD sebanyak 139 dan SMP sebanyak 49. Dalam TA 2022 kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saldo dana BOS yang tersisa pada tanggal Neraca (31 Desember 2022) tidak wajib disetor ke Kas Daerah dan tetap berada di Kas BOS masing-masing sekolah. Saldo kas BOS tersebut wajib dianggarkan kembali oleh setiap sekolah negeri dalam tahun anggaran berikutnya.

Tabel 5.172 Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	SD	321.508.936,18	915.468.548,18	(64,88)
2	SMP	109.184.736,00	354.609.282,00	(69,21)
Jumlah Kas di Bendahara BOS		430.693.672,18	1.270.077.830,18	(66,09)

Penurunan signifikan Saldo Kas di Bendahara BOS berkisar (66,09%) atau sebesar Rp839.384.158,00 karena adanya peningkatan realisasi penyerapan belanja Dana BOS pada 188 Sekolah Negeri. Sedangkan, rincian Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 per sekolah dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.3.1.1.7 Kas Lainnya	23.744.800,00	331.364,00

Saldo Kas Lainnya merupakan saldo Kas yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat DAK Non Fisik BOP PAUD Negeri sebesar Rp344.800,00 dan BOP Kesetaraan pada UPT SPNF SKB Daratan Kecamatan Bontoharu sebesar Rp23.400.000,00.



	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.3.1.1.8 Setara Kas	0,00	18.000.000.000,00

Setara kas ini merupakan dana di Kas Daerah yang penempatannya sebagai bentuk dari pemanfaatan manajemen kas untuk memperoleh pendapatan asli daerah. Kas tersebut ditempatkan sebagai deposito berjangka di Bank Sulselbar, dengan jangka waktu satu bulan berdasarkan rate yang tertera pada sertifikat deposito sesuai PKS antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Bank Sulselbar Cabang Selayar, pada tanggal neraca tahun 2022 seluruh sertifikat deposito telah dikonversikan 158 kembali ke rekening giro milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.3.1.1.9 Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

Tidak terdapat Investasi Jangka Pendek Per tanggal Neraca.

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.3.1.1.10 Piutang	33.344.391.604,78	29.901.125.523,08

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan uang dalam satu periode akuntansi. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode tertentu.

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021, maka dilakukan penilaian kualitas piutang dan penyisihan atas piutang yang tak tertagih. Dalam menetapkan penyisihan piutang tidak tertagih dengan ketentuan Kebijakan Penyisihan Piutang dapat dilihat pada table 5.173.

Tabel 5.173 Kebijakan Penyisihan Piutang

No.	Kualitas Piutang	% Penyisihan
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Piutang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp33.344.391.604,78 dan Rp29.901.125.523,08 terjadi peningkatan sebesar Rp3.443.266.081,70 atau sebesar 11,52%.

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.3.1.1.10.1 Piutang Pajak	3.515.016.425,00	2.593.704.427,00

Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp3.515.016.425,00 dan sebesar Rp2.593.704.427,00, dalam TA 2022 terjadi peningkatan nilai piutang pajak sebesar Rp921.311.998,00 atau mencapai 35,52% dengan rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada tabel 5.174.



Tabel 5.174 Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Piutang Pajak Restoran	1.415.000,00	415.000,00	240,96
2	Piutang Pajak Air Tanah	331.000,00	251.000,00	31,87
3	Piutang Pajak Reklame	14.430.000,00	14.430.000,00	0,00
4	Piutang Mineral Bukan Logam & Batuan	205.049.180,00	205.049.180,00	0,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.293.791.245,00	2.373.559.247,00	38,77
Jumlah Piutang Pajak		3.515.016.425,00	2.593.704.427,00	35,52
7	Penyisihan Piutang Pajak	-1.494.640.304,20	-1.235.695.238,36	
Jumlah Piutang Pajak Bersih		2.020.376.120,80	1.358.009.188,65	48,77

Rincian piutang pajak dan perhitungan penyisihan pada *Lampiran 8.1*

5.3.1.1.10.1.1 Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.415.000,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp415.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.000.000,00 atau lebih tinggi 240,96%. Rincian piutang per wajib pajak dan perhitungan penyisihan pada *Lampiran 8.2*

5.3.1.1.10.1.2 Piutang Pajak Air Tanah

Saldo akhir Piutang Pajak Air Tanah yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp331.000,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp251.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp80.000,00 atau lebih tinggi 31,87% . Rincian piutang per wajib pajak dan perhitungan penyisihan pada *Lampiran 8.3*.

5.3.1.1.10.1.3 Piutang Pajak Reklame

Saldo akhir Piutang Pajak Reklame yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.430.000,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp14.430.000,00, dalam tahun 2022 tidak terdapat penambahan dan pengurangan piutang Pajak Reklame. Tidak terdapat pengurangan atas saldo Piutang Pajak Reklame selama Tahun 2022. Rincian piutang per wajib pajak dan perhitungan penyisihan pada *Lampiran 8.4*.

5.3.1.1.10.1.4 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo akhir Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp205.049.180,00, dalam tahun 2022 tidak terdapat penambahan dan pengurangan piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Terdapat pengurangan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



selama Tahun 2022 sebesar Rp205.049.180,00. Rincian piutang perwajib pajak dan perhitungan penyisihan pada **Lampiran 8.5**.

5.3.1.1.10.1.5 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan piutang yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini KPP Pratama Bulukumba kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-34/WPJ.15/KP.08/2014 sebesar Rp3.799.853.059,00.

Saldo akhir Piutang PBB-P2 yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.293.791.245,00 dari saldo awal sebesar Rp2.373.559.247,00, terdapat mutasi penambahan sebesar Rp984.811.859,00 dan pengurangan sebesar Rp64.579.861,00 atau mencapai 38,77%. Jumlah tersebut merupakan mutasi pengurangan atas pembayaran piutang tahun 2014 s.d. 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (<i>audited</i>)	2.373.559.247,00
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2022	2.373.559.247,00
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Penetapan PBB-P2 Tahun 2022	984.811.859,00
Jumlah	<u>984.811.859,00</u>
Pengurangan:	
- Pelunasan Piutang PBB-P2 Tahun 2014-2021	(64.579.861,00)
- Penghapusan PBB-P2 Tahun 2022	(0,00)
Jumlah	<u>(64.579.861,00)</u>
Saldo per 31-12-2022	<u>3.293.791.245,00</u>

Rincian piutang per tahun pajak dan perhitungan penyisihan pada **Lampiran 8.6**.

Dalam tahun 2022, telah dilakukan upaya penagihan piutang pajak dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- Melakukan pemotongan SP2D pada pihak ketiga yang berpiutang dan sedang berkontrak dengan Pemkab Kepulauan Selayar khususnya piutang pajak mineral bukan logam dan batuan;
- Menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kepada masing-masing wajib pajak daerah;
- Menunda penerbitan perpanjangan izin usaha bagi wajib pajak daerah yang masih memiliki piutang.

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.3.1.1.10.2 Piutang Retribusi	272.634.000,00	185.485.000,00

Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp272.634.000,00 dan sebesar Rp185.485.000,00 dalam TA 2022 terjadi peningkatan nilai piutang retribusi sebesar Rp87.149.000,00 atau mencapai 46,98% dengan rincian dapat dilihat tabel 5.175.



Tabel 5.175 Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Piutang Retribusi Pasar	24.222.500,00	24.222.500,00	0,00
2	Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	108.900.000,00	107.750.000,00	1,07
3	Piutang Retribusi IMB	69.911.500,00	1.912.500,00	3555,50
4	Piutang Retribusi Mobil Refrigasi	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5	Piutang Retribusi Sewa Pabrik Es	10.000.000,00	0,00	100,00
6	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	37.600.000,00	29.600.000,00	27,03
Jumlah Piutang Retribusi		272.634.000,00	185.485.000,00	46,98
7	Penyisihan Piutang Retribusi	(174.399.900,00)	(157.495.000,00)	10,73
Jumlah Piutang Retribusi Bersih		98.234.100,00	27.990.000,00	250,96

Rincian piutang Retribusi dan perhitungan penyisihan pada *Lampiran 9.1*

5.3.1.1.10.2.1 Piutang Retribusi Pasar

Saldo akhir Piutang Retribusi Pasar yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.222.500,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp24.222.500,00. Tidak terdapat penambahan dan pengurangan atas Piutang Retribusi Pasar selama Tahun 2022. Rincian piutang per wajib retribusi dan perhitungan penyisihan pada *Lampiran 9.2*.

5.3.1.1.10.2.2 Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas

Saldo akhir Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp108.900.000,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp107.750.000,00. Terdapat pengurangan atas Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas selama Tahun 2022 sebesar Rp400.000,00 dan terdapat penambahan sebesar Rp1.550.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 1,07%. Rincian piutang per wajib retribusi dan perhitungan penyisihan pada *Lampiran 9.3*.

5.3.1.1.10.2.3 Piutang Retribusi IMB

Saldo akhir Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp69.911.500,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp1.912.500,00. Terdapat mutasi penambahan sebesar Rp67.999.000,00 atas piutang selama tahun 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 3555,50%. Rincian piutang per wajib retribusi dan perhitungan penyisihan pada *Lampiran 9.4*.

5.3.1.1.10.2.4 Piutang Retribusi Mobil Refrigasi

Saldo akhir Piutang Retribusi Mobil Refrigasi yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.000.000,00 dari saldo awal sebesar Rp22.000.000,00. Tidak terdapat penambahan dan pengurangan atas Piutang Retribusi Mobil Refrigasi selama Tahun 2022. Rincian piutang per wajib retribusi dan perhitungan penyisihan pada *Lampiran 9.5*.



5.3.1.1.10.2.5 Piutang Retribusi Sewa Pabrik Es

Saldo akhir Piutang Retribusi Sewa Pabrik Es yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.000.000,00 dari saldo awal sebesar Rp0,00. Terdapat mutasi penambahan atas Piutang Retribusi Sewa Pabri Es selama Tahun 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 100,00%. Rincian piutang per wajib retribusi dan perhitungan penyisihan pada *Lampiran 9.5*.

5.3.1.1.10.2.6 Piutang Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Saldo akhir Piutang Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.600.000,00 dari saldo awal sebesar Rp29.600.000,00. Dalam tahun 2022 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp29.600.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp21.600.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 27,03%. Rincian piutang per wajib retribusi dan perhitungan penyisihan pada *Lampiran 9.6*.

Dalam tahun 2022, telah dilakukan upaya penagihan piutang retribusi dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- Menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kepada masing-masing wajib retribusi daerah;
- Menunda penerbitan IMB, bagi wajib retribusi daerah yang masih memiliki piutang.
- Untuk piutang Retribusi Mobil Refrigasi, telah dilakukan upaya persuasif kepada ahli waris wajib retribusi dengan melakukan kunjungan secara personal.

	TA 2022	TA 2021
5.3.1.1.10.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.574.024.104,24	1.944.173.808,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp2.574.024.104,24 sebesar Rp1.944.173.808,00 dalam TA 2022 terjadi peningkatan nilai piutang lain-lain PAD yang sah sebesar Rp629.850.296,24 atau 32,40% dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.176.

Tabel 5.176 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Piutang Non Kapitasi	389.280.000,00	193.700.000,00	100,97
2	Piutang BLUD	2.184.226.058,00	1.621.624.500,00	34,69
3	Piutang Sewa Aset Tetap (Kapal Banawa)	0,00	6.000.000,00	(100,00)
4	Piutang Bunga Deposito Pemda di Bank Sulselbar	0,00	122.849.308,00	(100,00)
5	Piutang Bunga (<i>Treasury Deposit Facility</i>)	515.546,24	0,00	100,00
6	Piutang Kurang Bayar Pelelangan Kendaraan Dinas	2.500,00	0,00	100,00
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah		2.574.024.104,24	1.944.173.808,00	32,40
7	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(12.870.120,52)	(9.720.869,04)	32,40



(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
	Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah Bersih	2.561.153.983,72	1.934.452.938,96	32,40

Daftar Piutang Lain-lain PAD dan perhitungan penyisihan pada *Lampiran 10*.

5.3.1.1.10.3.1 Piutang Non Kapitasi

Piutang Non Kapitasi merupakan pengakuan piutang atas pendapatan klaim biaya BPJS untuk Tahun 2022 yang akan diterima pada Tahun 2022 berdasarkan Surat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Bulukumba. Saldo akhir Piutang Non kapitasi yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp389.280.000,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp193.700.000,00. Selama Tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp389.280.000,00 dan pengurangan sebesar Rp193.700.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 100,97%. Atas saldo piutang per 31 Desember 2022 dilakukan perhitungan penyisihan piutang sebesar 0.5% atau sebesar Rp1.946.400,00.

5.3.1.1.10.3.2 Piutang BLUD

Saldo akhir Piutang BLUD yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.184.226.058,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp1.621.624.500,00 atau mengalami peningkatan sebesar 34,69%. atas seluruh nilai saldo akhir tersebut RSUD KH Hayyung telah menerima persetujuan pembayaran dari BPJS Cabang Bulukumba sesuai surat Nomor PL/R/003/II/SLY/2022 tanggal 17 Februari 2022, perihal konfirmasi piutang 2022. Adapun rincian piutang BLUD dapat dilihat pada tabel 5.177.

Tabel 5.177 Rincian Piutang BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Piutang BPJS	2.147.171.485,00	1.563.395.986,00	37,34
2	Piutang Pelayanan Covid-19 Ambulance	8.926.372,00	0,00	100,00
3	Piutang Jasa Raharja	14.851.736,00	53.766.363,00	(72,38)
4	Piutang Pasien umum	0,00	4.462.151,00	(100,00)
5	BPJS Ketenagakerjaan	13.276465,00	0,00	100,00
Jumlah Piutang BLUD		2.184.226.058,00	1.621.624.500,00	34,69

Atas saldo piutang per 31 Desember 2022 dilakukan perhitungan penyisihan piutang sebesar 0,5% atau sebesar Rp(10.921.130,29).

Dalam tahun 2022, telah dilakukan upaya penagihan piutang Lain-lain PAD yang Sah dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- Menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kepada masing-masing pihak;
- Untuk piutang bunga deposito telah diterbitkan surat Direktur Pemasaran dan Syariah Nomor SR/07/B/DTR/V/2022, tanggal 19 Mei 2022, Perihal Persetujuan Prinsip PT.



Bank Sulselbar Cabang Selayar yang akan membayar piutang bunga deposito sebelum jatuh tempo sebesar Rp122.849.308,00.

5.3.1.1.10.3.3 Piutang Sewa Aset Tetap (KMP Banawa)

Piutang Sewa Aset Tetap (KMP Banawa) yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp6.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%. Piutang Sewa Aset Tetap (KMP Banawa) Telah disetor seluruhnya ke Kas Daerah Per 31 Desember 2022.

5.3.1.1.10.3.4 Piutang Bunga Deposito Pemda di Bank Sulselbar

Piutang Bunga Deposito Pemda di Bank Sulselbar yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp122.849.308,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%. Piutang Bunga Deposito Pemda di Bank Sulselbar Telah disetor seluruhnya ke Kas Daerah Per 31 Desember 2022.

5.3.1.1.10.3.5 Piutang Kurang Bayar Pelelangan Kendaraan Dinas

Piutang Kurang Bayar Pelelangan Kendaraan Dinas yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.500,00 atau mengalami peningkatan sebesar 100,00%. Merupakan Piutang Kurang Bayar Pelelangan Kendaraan Dinas yang Kurang Bayar sesuai SK Nomor 392/X/TAHUN/2022 Tentang Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dilelang Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda (Dua) dan 2 Paket Scrap Milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

5.3.1.1.10.3.6 Piutang Bunga (*Treasury Deposit Facility*)

Piutang Bunga (*Treasury Deposit Facility*) yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp515.546,24 atau mengalami peningkatan sebesar 100,00%. Merupakan Bunga dari Saldo dan *Remunerasi Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah dari saldo Pokok Sebesar Rp2.125.697.317,00. Piutang bunga dimaksud telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengeloalan *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Dalam Bentuk Non Tunai serta surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-64/PK/PK.2/2023, perihal Rincian Penyaluran DBH Non Tunai melalui *TDF* Tahun 2022, tanggal 30 Maret 2023.

5.3.1.1.10.4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	TA 2022	TA 2021
		0,00	0,00

Tidak terdapat saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per tanggal neraca.



5.3.1.1.10.5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	TA 2022	TA 2021
		14.047.556.888,00	12.573.011.767,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp14.047.556.888,00 dan Rp12.573.011.767,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.474.545.121,00 atau 11,73%. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tersebut merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi yang belum ditransfer per 31 Desember 2022. Untuk saldo awal yang merupakan piutang tahun 2021 telah diterima di kas daerah dalam tahun 2022 dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.178.

**Tabel 5.178 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
per 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Piutang Transfer Bagi Hasil dari Pajak Rokok Masa Pajak Oktober s.d. November 2022	2.382.314.442,00	2.050.326.008,00	16,19
2	Piutang Transfer Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Masa Pajak Oktober s.d. November 2022	3.499.137.645,00	10.522.685.759,00	(66,75)
3	Piutang Transfer Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Masa Pajak September s.d. Desember 2022	2.562.527.453,00	00,00	100
4	Piutang Transfer Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Masa Pajak September s.d. Desember 2022	5.574.774.903,00	00,00	100
5	Piutang Transfer Bagi Hasil dari Pemanfaatan Air Permukaan Tanah Masa Pajak September s.d. Desember 2022	19.563.363,00	00,00	100
6	Piutang Transfer Bagi Hasil dari PLN dan INCO. Bakaru/Sawitto September s.d. Desember 2022	9.239.082,00	00,00	100
7	Piutang Transfer Bagi Hasil dari AP PLTA Bili-bili September s.d. Desember 2022	00,00	00,00	100
Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		14.047.556.888,00	12.573.011.767,00	11,73
8	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(70.237.784,44)	(62.865.058,84)	11,73
Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bersih		13.977.319.103,56	12.510.146.708,17	11,73

Daftar Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan perhitungan penyisihan pada *Lampiran 11*.



5.3.1.1.10.6	Belanja (Beban) Dibayar di Muka	TA 2022	TA 2021
		507.868.249,85	109.784.752,42

Belanja Dibayar di Muka sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp507.868.249,85, dalam tahun 2022 terjadi penambahan dan pengurangan beban dibayar dimuka sebesar Rp398.083.497,43 atau sebesar 362,60%. Belanja dibayar dimuka timbul karena terdapat pembayaran barang dan jasa yang telah terbayarkan namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 nilai barang dan jasa yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih sebagian atau belum seluruhnya sebesar nilai realisasi keuangan, dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.179

Tabel 5.179 Rincian Belanja (Beban) Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Beban Dibayar di Muka atas Surat Tanda Nomor Kendaraan	153.693.249,85	109.784.752,42	40,00
2	Beban Dibayar di Muka atas Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	0,00	0,00	0,00
3	Beban Dibayar Sewa Bandwitch	354.175.000,00	0,00	100,00
Jumlah Belanja (Beban) Dibayar Dimuka		507.868.249,85	109.784.752,42	362,60

Rincian per OPD dapat dilihat pada *lampiran 13*

5.3.1.1.10.7	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	TA 2022	TA 2021
		188.220.900,00	220.220.900,00

Piutang ini merupakan hasil reklasifikasi dari Akun Piutang Lainnya – Bagian Lancar Dum Rumah Dinas dan Piutang Lainnya – Bagian Lancar Dum Kendaraan Dinas dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.180.

Tabel 5.180 Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Bagian Lancar Dum Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00
2	Bagian Lancar Dum Kendaraan Dinas	188.220.900,00	220.220.900,00	(14,53)
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		188.220.900,00	220.220.900,00	(14,53)
3	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(188.220.900,00)	(220.220.900,00)	(14,53)
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bersih		0,00	0,00	0,00



Rincian bagian lancar dan perhitungan penyisihan pada **Lampiran 12.1**

Terdapat Pelunasan Piutang pada Tahun 2021 namun baru dilaporkan pada Tahun 2022 sebesar Rp32.000.000,00 atas nama Ir. Ma'ruf Tato sehingga saldo Piutang Berkurang sebesar Rp32.000.000,00 menjadi Rp188.200.000,00 per 31 Desember 2022 atau mengalami penurunan sebesar 14,53%. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan penyisihan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tidak tertagih sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 07 tentang Kualitas Piutang. Adapun Saldo penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tidak tertagih per 31 Desember 2022 sebesar Rp188.220.900,00 sehingga nilai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran netto menjadi sebesar Rp0,00. Rincian bagian lancar per wajib bayar dan perhitungan penyisihan pada **Lampiran 12.1.1**.

5.3.1.1.10.8 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	TA 2022	TA 2021
	5.374.542.080,61	5.374.542.080,61

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp5.374.542.080,61 dan Rp5.374.542.080,61 tidak terdapat mutasi penambahan piutang selama periode Tahun 2022. Bagian Lancar TGR dilakukan penyisihan atas Bagian Lancar TGR tidak tertagih sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021. Adapun Saldo penyisihan Bagian Lancar TGR tidak tertagih per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.374.542.080,61 sehingga nilai Bagian Lancar TGR neto menjadi sebesar Rp0,00. Rincian Bagian Lancar TGR dan perhitungan penyisihan pada **Lampiran 12.1.2**.

5.3.1.1.10.9 Piutang Uang Muka	TA 2022	TA 2021
	0,00	226.319.635,80

Piutang uang muka sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp226.319.635,80 bila dibandingkan dengan Piutang uang muka TA 2021 sebesar Rp226.319.635,80 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%. Nilai piutang tersebut telah dikembalikan sebagian ke kas daerah sebesar Rp226.320.000,00 sesuai nomor STS 32/K/2022 pada tanggal 5 Januari 2022. Hal ini terjadi karena CV.Sumber Sarana Mas Abadi belum mengembalikan seluruh uang muka kerja paket pekerjaan peningkatan jalan kabupaten ruas Limbo-Onemalangka sesuai SP2D nomor 1696/SP2D-LS/VII/PUTR 2022, tanggal 16 Juli 2022. Rincian Piutang Uang Muka dan perhitungan penyisihan pada **Lampiran 12.2**

5.3.1.1.10.10 Piutang Lainnya	TA 2022	TA 2021
	6.462.273.007,25	6.673.883.152,25

Piutang Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.462.273.007,25 mengalami penurunan sebesar (Rp211.610.145,00) bila dibandingkan dengan Piutang Lainnya TA 2021 sebesar Rp6.673.881.652,25. dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.181.



Tabel 5.181 Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Pemberian bantuan cicilan kendaraan roda dua bagi PNS	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00
2	Piutang CV Jasa Utama	18.887.000,00	18.887.000,00	0,00
3	Piutang PAD Lain-lain yang Sah (Pemakaian Asbuton)	816.480.248,58	816.480.248,58	0,00
4	Bagian Lancar Piutang Bantuan Modal kepada Koperasi Kontu Toje'	179.000.000,00	179.000.000,00	0,00
5	Piutang Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi kepada Koperasi PUSKODISPAN	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
6	Piutang Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi kepada Koperasi Desa	1.541.109.951,00	1.541.109.951,00	0,00
7	Piutang Modal Koperasi Pendistribusian dan Penyediaan sarana Panen di Jamepa	188.500.000,00	188.500.000,00	0,00
8	Piutang Bunga Dana Pinjaman Koperasi	51.525.000,00	51.525.000,00	0,00
9	Piutang Bunga Dana Bergulir UMKM	9.622.541,67	9.622.541,67	0,00
10	Pinjaman Uang Muka Perumahan bagi PNS	193.027.200,00	198.631.000,00	(2,82)
11	Piutang Dana Pemberdayaan Masyarakat	1.554.801.566,00	1.760.807.911,00	(11,70)
12	Tagihan Pengembalian TKI dan BPO Pimpinan & Anggota DPRD	1.005.679.500,00	1.005.679.500,00	0,00
Jumlah Piutang Lainnya		6.462.273.007,25	6.673.883.152,25	(3,71)
15	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(6.462.273.007,25)	(6.649.014.122,25)	(2,81)
Jumlah Piutang Lainnya Bersih		0,00	24.869.030,00	(100,00)

Daftar Piutang Lainnya dan perhitungan penyisihan pada *Lampiran 12.3*

5.3.1.1.10.10.1 Pemberian Bantuan Cicilan Kendaraan Roda Dua bagi PNS

Nilai Pemberian Bantuan Cicilan Kendaraan Roda Dua bagi PNS sebesar Rp3.640.000,00 merupakan saldo per 31 Desember 2021 dan selama Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat mutasi pelunasan, sehingga nilai per 31 Desember 2022 menjadi Rp0,00. Rinciannya dapat dilihat pada *Lampiran 12.3.1*.



5.3.1.1.10.10.2 Piutang CV Jasa Utama

Piutang pada CV Jasa Utama sebesar Rp18.887.000,00 merupakan Belanja Modal pada TA 2011 yang sebelumnya telah direalisasi, dan menjadi double realisasi sehingga harus dikembalikan kepada Pemda. Sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat mutasi atas piutang ini.

5.3.1.1.10.10.3 Piutang PAD Lain-lain yang Sah (Pemakaian Asbuton)

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp816.480.248,58 merupakan piutang atas pemakaian Aspal Buton yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum. Pada Tahun 2022 tidak terdapat penyetoran sehingga saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp816.480.248,58. Rinciannya dapat dilihat pada *Lampiran 12.3.2*.

5.3.1.1.10.10.4 Bagian Lancar Piutang Bantuan Modal kepada Koperasi Kontu Toje'

Bagian Lancar Pinjaman Dana Koperasi untuk Koperasi Primer–KontuToje' sebesar Rp180.000.000,00 merupakan bagian dari jumlah piutang Rp225.000.000,00 yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan berikutnya sebesar Rp45.000.000,00. Piutang ini merupakan implementasi Peraturan Bupati Nomor 349 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Modal Koperasi. Sampai dengan 31 Desember 2022 pengembalian atas pinjaman tersebut sebesar angsuran pokok senilai total Rp1.000.000,00. sehingga saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp179.000.000,00. Rinciannya dapat dilihat pada *Lampiran 12.3.4*.

5.3.1.1.10.10.5 Piutang Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi kepada Koperasi PUSKODISPAN

Bagian Lancar Pinjaman Dana Koperasi untuk Koperasi PUSKODISPAN sebesar Rp900.000.000,00 merupakan bagian dari jumlah piutang Rp1.000.000.000,00 yang pada Tahun 2014 terdapat pelunasan pokok sebesar Rp100.000.000,00. Piutang ini merupakan hasil reklasifikasi dari Aset Lainnya-Aset Lain-Lain pada Tahun 2015, karena menurut Peraturan Bupati Nomor 509 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi, jumlah tersebut telah jatuh tempo. Dalam Tahun 2022 tidak terdapat mutasi atas piutang tersebut. Rinciannya dapat dilihat pada *Lampiran 12.3.5*.

5.3.1.1.10.10.6 Piutang Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi kepada Koperasi Desa

Piutang Dana Pengembangan Modal Usaha Bagi Koperasi Tingkat Desa/Kelurahan sebesar Rp1.541.109.951,00 merupakan bagian dari jumlah piutang sebesar Rp1.825.000.000,00 yang seluruhnya telah jatuh tempo. Piutang ini merupakan implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2007. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 57a Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Modal Usaha Koperasi Tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Selayar.

Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.541.109.951,00 dan selama Tahun 2022 terdapat mutasi pelunasan atas pokok piutang sebesar Rp500.000,00 dari saldo 2021 sebesar Rp1.541.609.951,00. Rinciannya dapat dilihat pada *Lampiran 12.3.6*.



5.3.1.1.10.10.7 Piutang Modal Koperasi Pendistribusian dan Penyediaan Sarana Panen di Jampea

Bantuan modal koperasi dalam rangka pemasaran dan penyediaan sarana produksi di Jampea per 31 Desember 2021 sebesar Rp168.500.000,00. Pada Tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp20.000.000,00 yang merupakan piutang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya sehingga piutang yang harus dilunasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp188.500.000,00. Piutang ini merupakan hasil reklasifikasi dari Aset Lainnya-Aset Lain-Lain, karena berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Koperasi Dalam Rangka Pemasaran dan Penyediaan Sarana Produksi di Pulau Jampea, jumlah tersebut telah jatuh tempo. Rinciannya dapat dilihat pada *Lampiran 12.3.7*.

5.3.1.1.10.10.8 Piutang Bunga Dana Pinjaman Koperasi

Piutang bunga dana pinjaman koperasi sebesar Rp51.525.000,00 merupakan bunga atas bagian lancar dari empat jenis pinjaman koperasi dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.182.

Tabel 5.182 Rincian Piutang Bunga Dana Pinjaman Koperasi per 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Pinjaman Dana Koperasi untuk Koperasi Primer - Kontu Toje' sesuai Perbup No. 349 Tahun 2009	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00
2	Pinjaman Dana Peningkatan & Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi PUSKODISPAN sesuai Perbup No. 509 tahun 2008	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00
3	Pinjaman Dana Peningkatan & Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi sesuai Perbup No. 14 Tahun 2007 Jo. Perbup No. 57 Tahun 2009	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00
4	Bantuan Modal Koperasi dalam rangka Pemasaran dan Penyediaan Sarana Produksi Beras di Jampea sesuai Perbup No.20 Tahun 2010	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
	Jumlah Piutang Bunga Dana Pinjaman Koperasi	51.525.000,00	51.525.000,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Bunga Dana Pinjaman Koperasi	51.525.000,00	51.525.000,00	0,00
	Jumlah Piutang Bunga Dana Pinjaman Koperasi Bersih	0,00	0,00	0,00

5.3.1.1.10.10.9 Piutang Bunga Dana Bergulir UMKM

Piutang Bunga Dana Bergulir UMKM yang disajikan merupakan Bunga Dana Bergulir UMKM yang menjadi hak Pemkab Kepulauan Selayar yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ Bunga Dana Bergulir UMKM secara keseluruhan, dalam tahun 2022 tidak terdapat mutasi penambahan atau pengurangan sehingga saldo akhir sebesar Rp9.622.541,67. Saldo Piutang Bunga atas Dana Bergulir UMKM per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.622.541,67 Rinciannya dapat dilihat pada *Lampiran 12.3.8*.



5.3.1.1.10.10.10 Pinjaman Uang Muka Perumahan bagi PNS

Pinjaman Uang Muka Perumahan PNS sebesar Rp193.027.200,00 merupakan hasil reklasifikasi dari Aset Lainnya-Pinjaman Uang Muka Perumahan karena sesuai Keputusan Bupati Selayar Nomor 499 Tahun 2007 tentang Pemberian Uang Muka Perumahan Pesona Selayar *Regency* kepada Pegawai Negeri Sipil telah jatuh tempo per 31 Desember 2022 telah jatuh tempo.

Saldo Piutang Pinjaman Uang Muka Perumahan PNS per 31 Desember 2021 sebesar Rp198.631.000,00. Atas saldo tersebut terdapat mutasi kurang atas pelunasan sebesar Rp5.603.800,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp193.027.200,00. Rinciannya dapat dilihat pada *Lampiran 12.3.3*.

5.3.1.1.10.10.11 Piutang Dana Pemberdayaan Masyarakat

Piutang Dana Pemberdayaan Masyarakat per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.760.807.911,00. Selama Tahun 2022 terdapat pengurangan berupa pelunasan sebesar Rp206.006.345,00 ke rekening Kas Daerah. Sehingga saldo per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp1.554.801.566,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada *Lampiran 12.3.9*.

5.3.1.1.10.10.12 Tagihan Pengembalian TKI dan BPO Pimpinan dan Anggota DPRD

Tagihan Pengembalian TKI dan BPO Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp1.005.679.500,00 terdiri dari Tagihan TKI sebesar Rp817.183.500,00 dan Tagihan BPO sebesar Rp188.496.000,00. Pada Tahun 2022 tidak terdapat pengembalian atas piutang TKI dan BPO. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 12.3.10*

Adapun rincian penyisihan Piutang Lainnya berdasarkan kualitas piutang adalah sebagai berikut:

	TA 2022	TA 2021
5.3.1.1.11 Penyisihan Piutang	(13.777.184.097,01)	(13.710.684.867,28)

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar (13.777.184.097,01) sedangkan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar (13.710.684.867,28) terdapat peningkatan Penyisihan Piutang sebesar (66.499.229,73) atau 0,49%. Penyisihan Piutang dicatat sesuai dengan *aging schedule* berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.183.

Tabel 5.183 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Piutang Pajak Daerah			
	a. Piutang Pajak Restoran	(46.500,00)	(16.325,00)	184,84
	b. Piutang Pajak Air Bawah Tanah	(85.500,00)	(22.725,00)	276,24
	c. Piutang Pajak Reklame	(14.430.000,00)	(14.430.000,00)	0,00
	d. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(202.642.634,00)	(202.428.789,00)	0,11
	e. Piutang PPJ	-	-	0,00
	f. Piutang PBB-P2	(1.277.435.670,20)	(1.018.797.399,36)	25,39
2	Piutang Retribusi			



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
	a. Piutang Retribusi Pasar	(24.222.500,00)	(24.222.500,00)	0,00
	b. Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	(107.505.000,00)	(106.400.000,00)	1,04
	c. Piutang Retribusi IMB	(8.712.400,00)	(1.912.500,00)	355,55
	d. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	-	-	
	e. Piutang Retribusi Mobil Refrigerasi	(22.000.000,00)	(22.000.000,00)	0,00
	f. Piutang Retribusi Sewa Pabrik Es	(1.000.000,00)		100,00
	g. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	(10.960.000,00)	(2.960.000,00)	270,27
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
	a. Piutang Non Kapitasi	(1.946.400,00)	(968.500,00)	100,97
	b. Piutang BLUD	(10.921.130,29)	(8.108.122,50)	34,69
	c. Piutang Bunga Deposito	-	(614.246,54)	0,00
	d. Piutang Pemanfaatan KM. Banawa	-	(30.000,00)	0,00
	e. Piutang Kurang Bayar Pelelangan Kendaraan Dinas	(12,50)	-	100,00
	f. Piutang Bunga atas TDF	(2.577,73)	-	100,00
4	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya			
	Piutang Bagi Hasil	(70.237.784,44)	(62.865.058,84)	11,73
5	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			
	a. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran-Dum Rumah Dinas	-	-	
	b. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran-Dum Kendaraan Dinas	(188.220.900,00)	(220.220.900,00)	(14,53)
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(5.374.542.080,61)	(5.374.542.080,61)	0,00
7.	Piutang Uang Muka	-	(1.131.598,18)	0,00
8.	Piutang Lainnya			
	a. Pemberian bantuan cicilan kendaraan roda dua bagi PNS	(3.640.000,00)	(3.640.000,00)	0,00
	b. Piutang CV Jasa Utama	(18.887.000,00)	(18.887.000,00)	0,00
	c. Piutang PAD Lain-lain yang Sah (Pemakaian Asbuton)	(816.480.248,58)	(816.480.248,58)	0,00
	d. Piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan (Dinas PU) CV Wendra	-	-	
	e. Piutang Jaminan Uang Muka CV Aneka Cipta Sarana (Dinas PU)	-	-	
	f. Bagian Lancar Piutang Bantuan Modal kepada Koperasi Kontu Toje'	(179.000.000,00)	(179.000.000,00)	0,00
	g. Piutang Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi kepada Koperasi PUSKODISPAN	(900.000.000,00)	(900.000.000,00)	0,00
	h. Piutang Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi kepada Koperasi Desa	(1.541.109.951,00)	(1.541.109.951,00)	0,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
i.	Piutang Modal Koperasi Pendistribusian dan Penyediaan Sarana Panen di Jampea	(188.500.000,00)	(188.500.000,00)	0,00
j.	Piutang Bunga Dana Pinjaman Koperasi			
	Pinjaman Dana Koperasi untuk Koperasi Primer - Kontu Toje' sesuai Perbup No. 349 tahun 2009	(2.475.000,00)	(2.475.000,00)	0,00
	Pinjaman Dana Peningkatan & Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi PUSKODISPAN sesuai Perbup No. 509 tahun 2008	(36.500.000,00)	(36.500.000,00)	0,00
	Pinjaman Dana Peningkatan & Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi sesuai Perbup No. 14 tahun 2007 Jo. Perbup No. 57 Tahun 2009	(7.050.000,00)	(7.050.000,00)	0,00
	Bantuan Modal Koperasi dalam rangka Pemasaran dan Penyediaan Sarana Produksi Beras di Jampea sesuai Perbup No.20 Tahun 2010	(5.500.000,00)	(5.500.000,00)	0,00
k.	Piutang Bunga Dana Bergulir UMKM	(9.622.541,67)	(9.622.541,67)	0,00
l.	Pinjaman Uang Muka Perumahan bagi PNS	(193.027.200,00)	(173.761.970,00)	11,09
m.	Piutang Dana Pemberdayaan Masyarakat	(1.554.801.566,00)	(1.760.807.911,00)	(11,70)
n.	Tagihan Pengembalian TKI dan BPO Pimpinan & Anggota DPRD	(1.005.679.500,00)	(1.005.679.500,00)	0,00
o.	Piutang Lainnya (Subsidi Penerbangan)	-	-	
p.	Piutang Bantuan Kesehatan Gratis Triwulan IV	-	-	
Jumlah Penyisihan Piutang		(13.777.184.097,01)	(13.710.684.867,28)	0,49

Rincian klasifikasi umur piutang dan penyisihan untuk masing-masing klasifikasi umur piutang, sesuai dengan kebijakan akuntansi dapat dilihat pada **Lampiran 8.1** sampai dengan **Lampiran 12.3.11.5**.

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.3.1.1.12 Persediaan	27.366.926.869,43	23.837.837.927,83

Persediaan barang pakai habis/material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Persediaan barang pakai habis/material terdiri atas Obat-obatan, Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak, Alat Listrik, Lain-lain, dan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai dan diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai yang dicantumkan ke dalam Neraca daerah.

Persediaan barang pakai habis dan tak pakai habis/material dan benda berharga sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp27.366.926.869,43 Jika dibandingkan dengan Persediaan TA 2021 sebesar Rp23.837.837.927,83 maka Persediaan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.529.088.941,60 atau 14,80%. Rincian Persediaan dapat dilihat pada tabel 5.184.



Tabel 5.184 Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
A	Persediaan Bahan Habis Pakai			
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	204.497.264,67	185.196.155,00	10,42
2	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	133.236.438,00	141.452.199,00	(5,81)
3	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar. Battery Kering)	83.818.550,00	89.267.875,00	(6,10)
4	Persediaan Perangko. Materai Dan Benda Pos Lainnya	-	-	-
5	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	41.783.725,00	17.391.200,00	140,26
6	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	17.248.000,00	38.360.000,00	(55,04)
7	Persediaan Isi Tabung Gas	17.505.264,00	-	100,00
B	Persediaan Bahan/Material			
8	Persediaan Bahan Baku Bangunan	175.397.250,00	175.397.250,00	-
9	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-
10	Persediaan Bahan Obat-obatan	14.663.304.328,36	13.720.931.794,83	6,87
11	Persediaan Bahan Makanan Pokok	17.330.750,00	21.384.000,00	(18,95)
12	Persediaan Suku Cadang	-	-	-
C	Persediaan Barang Lainnya			
13	Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	11.982.880.299,40	9.448.457.454,00	26,82
14	Persediaan Barang Lainnya	29.925.000,00	-	100,00
Jumlah Persediaan		27.366.926.869,43	23.837.837.927,83	14,80

Dalam tahun anggaran 2022 terdapat persediaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat pada Dinas PUTR berupa gedung dan 10 jaringan SPAM, gedung Polsek Buki, Gedung Asrama Polsek Bontosikuyu Dinas P3AP2KB berupa alat kontrasepsi, Dinas Lingkungan Hidup berupa bibit tanaman, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa buku koleksi perpustakaan untuk Sekolah Swasta, dan Dinas Perikanan berupa sampan fiber dan mesin, baling-baling, Dinas Perhubungan berupa alat listrik.

Saldo akhir persediaan tersebut tidak termasuk persediaan yang sudah kadaluarsa/rusak sebesar Rp2.163.697.143,15 berupa obat-obatan yang ada di Dinas Kesehatan sebesar Rp1.800.198.687,23 dan di RSUD K.H. Hayyung sebesar Rp363.498.455,92 yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar Rp861.601.718,00 atau 47,86% dan sebesar Rp60.001.468,75 atau 16,51% selama Tahun 2022. Dalam tahun 2022 belum pernah



dilakukan pemusnahan obat-obatan kadaluarsa baik oleh Dinas Kesehatan maupun RSUD KH Hayyung. Rincian persediaan per OPD dapat dilihat pada *Lampiran 14.1 s.d.14.2*.

	TA 2022	TA 2021
5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang	53.569.834.782,34	62.572.592.688,81

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan investasi permanen lainnya.

Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp53.569.834.782,34 dan Rp62.572.592.688,81. Dalam tahun anggaran 2022 tidak terdapat realisasi penambahan penyertaan modal yang dapat dilihat pada tabel 5.185

Tabel 5.185 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Investasi Non permanen	0.00	0.00	0,00
2	Investasi Permanen	53.569.834.782,34	62.572.592.688,81	(14,39)
Jumlah Investasi Jangka Panjang		53.569.834.782,34	62.572.592.688,81	(14,39)

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Tidak terdapat Dana Bergulir per tanggal Neraca.

5.3.1.2.1 Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Penilaian investasi dengan metode biaya (*cost method*) yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Penilaian investasi dengan metode ekuitas (*equity method*) yaitu investasi dicatat sebesar harga perolehannya untuk kemudian didebit atau dikredit dengan bagian laba atau rugi perusahaan anak secara proporsional dan deviden yang diterima dicatat mengurangi perkiraan investasi yang bersangkutan, sedangkan dengan *cost method* investasi dicatat sebesar harga perolehannya. deviden yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Perkiraan investasi jangka panjang akan dikredit dalam hal terdapat penerimaan deviden yang merupakan pembagian keuntungan atas periode sebelum penyertaan tersebut dilakukan atau jika perusahaan anak menderita kerugian yang sangat material yang menyebabkan penurunan nilai aktiva.

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp53.569.834.782,34 uraian dapat dilihat pada tabel 5.186.



Tabel 5.186 Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2021	Mutasi 2022				Saldo 2022	Koreksi		Saldo 2022 Audit
			Tambah		Kurang			Tambah	Kurang	
			Penyertaan Modal	Laba	(Penyetoran Dividen)	(Rugi)				
1	PT Bank Sulselbar	28.330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.330.000.000,00	0,00		28.330.000.000,00
2	PDAM Selayar	12.066.394.220,72	0,00	0,00	0,00	(647.464.379,31)	11.418.929.841,41	112.830.119,00	1.299.796.455,00	10.231.963.505,41
3	PD Berdikari	7.621.165.866,00	0,00	0,00	0,00	(76.742.737,00)	7.544.423.129,00		5.645.365.038,00	1.899.058.091,00
4	PT BPR Pesisir Tanadoang	12.055.032.602,09	0,00	1.132.120.525,60	(667.776.693,76)	0,00	12.519.376.434,00		1.910.563.248,00	10.608.813.186,00
5	PT SUC	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00			2.500.000.000,00
Jumlah Investasi Permanen		62.572.592.688,81	0,00	1.132.120.525,60	(667.776.693,76)	(724.207.116,31)	63.648.282.791,86	112.830.119,00	8.855.724.741,00	53.569.834.782,34

1) Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar

Nilai penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp28.330.000.000,00 sebanyak 27.330 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 per lembar saham. Terdapat penambahan penyertaan modal dalam tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penambahan Modal Disetor Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas PT. Bank Sulselbar. Pada TA 2020 berdasarkan BA RUPS Luar Biasa No.2 tanggal 2 Desember 2020, terdapat pengesahan komposisi modal disetor sebesar 62.349 lembar saham atau Rp62.349.000.000,00. Pengesahan komposisi baru dalam TA 2020 tersebut karena adanya atribusi cadangan umum menjadi modal disetor sebesar Rp35.019.000.000,00. Atas perubahan komposisi ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan sampai dengan tanggal neraca belum melakukan pengesahan dalam bentuk penetapan tambahan penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar melalui Peraturan Kepala Daerah.

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 2,93% sehingga metode yang digunakan dalam penilaian investasi menggunakan metode biaya.

2) Penyertaan Modal pada PDAM Kepulauan Selayar

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada PDAM Selayar per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.066.394.220,72.

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada PDAM Selayar adalah 100% sehingga penyajiannya menggunakan metode ekuitas. Salah satu konsekuensi penerapan metode ekuitas adalah nilai investasinya berpedoman dari laba/rugi perusahaan/BUMD. Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Selayar per 31 Desember 2022 diketahui bahwa rugi bersih PDAM Selayar Tahun 2022 mencapai Rp647.464.379,31 selama Tahun 2022 PDAM Selayar tidak menyetorkan dividen atas operasi Tahun 2021. Dalam tahun 2022 PDAM Selayar tidak mendapatkan penambahan penyertaan. Atas rugi bersih tersebut telah dilakukan audit oleh KAP Ardaniah Abbas, dan telah dilakukan penyesuaian sehingga nilai penyertaan modal pada PDAM per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp11.418.929.841,41 yang disajikan di Neraca dengan perhitungan dapat dilihat pada tabel 5.187.



Tabel 5.187 Rincian Nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada PDAM Selayar per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai	
	2022	2021
Penyertaan Modal Pemkab Kepulauan Selayar per 31-12-2021	12.066.394.220,72	12.635.384.486,00
Laba/(Rugi) Bersih TA 2022 (menurut LK PDAM)	(647.464.379,31)	(568.990.265,28)
Penyetoran dividen atas operasi Tahun 2021 ke Kas Daerah	(0,00)	(0,00)
Tambahan penyertaan modal T.A. 2022	0,00	0,00
Koreksi tambah	112.830.119,00	
Koreksi Kurang	(1.299.796.455,00)	
Persentase	15,20	4,50
Jumlah Penyertaan Modal Pemkab Kepulauan Selayar per 31-12-2022	10.231.963.505,41	12.066.394.220,72

Terdapat perbedaan antara pencatatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pencatatan nilai ekuitas PDAM. Atas perbedaan tersebut telah dilakukan koreksi dan penyesuaian atas nilai penyertaan modal pemda Kepulauan Selayar dengan penambahan sebesar Rp112.830.119,00 dan pengurangan sebesar Rp1.299.796.455,00. Pengurangan tersebut karena adanya penyerahan aset tetap sebesar Rp2.942.289.010,00, masing-masing sesuai BAST Nomor :1/2015/PU tanggal 5 Januari 2015 sebesar Rp2.143.143.640,00 dan BAST Barang milik Daerah Nomor : 16/BA-STHB/CK-AB/I/2015/PUTR, tanggal 25 Januari 2018 sebesar Rp799.145.370,00. aset tetap tersebut belum ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal dan masih dicatat di asset lainnya sampai tanggal pelaporan. Atas koreksi tersebut pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan segera mengesahkan dan melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah.

3) Penyertaan Modal pada PD Berdikari

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada PD Berdikari per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.544.423.129,00. Dalam TA 2022 tidak terdapat penambahan penyertaan modal. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2022 *Unaudited* PD Berdikari oleh KAP Adi dan Deki tercatat mengalami rugi bersih sebesar Rp76.742.737,00 sehingga dilakukan penyesuaian atas nilai penyertaan modal dengan perhitungan dapat dilihat pada tabel 5.188.

Tabel 5.188 Rincian Nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada PD Berdikari per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai	
	2022	2021
Penyertaan Modal per 31 Desember 2021	7.621.165.866,00	7.836.109.269,00
Laba/(Rugi) Bersih TA 2022(menurut LK PD Berdikari)	(76.742.737,00)	(214.943.403,00)
Tambahan Penyertaan Modal T.A. 2022	0,00	0,00
Koreksi tambah	0,00	
Koreksi Kurang	(5.645.365.038,00)	



(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai	
	2022	2021
Persentase	75,08	2,74
Jumlah Penyertaan Modal per 31 Desember 2022	1.899.058.091,00	7.621.165.866,00

Terdapat perbedaan antara pencatatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pencatatan nilai ekuitas PD Berdikari. Atas perbedaan tersebut telah dilakukan koreksi dan penyesuaian atas nilai penyertaan modal pemda Kepulauan Selayar dengan pengurangan sebesar Rp5.645.365.038,00. Adapun rincian koreksi tersebut sebagai berikut:

- Koreksi kurang atas pengakuan *goodwill* PT Transnusa sebesar Rp2.500.000.000,00.
- Koreksi kurang atas pengakuan partisipasi masyarakat sebesar Rp1.516.574.700,00.
- Koreksi kurang atas akumulasi kerugian sejak tahun 2014 s.d. 2022 sebesar Rp1.628.790.338,00

Atas koreksi tersebut pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan segera mengesahkan dan melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah.

- Penyertaan Modal pada PT BPR Pesisir Tanadoang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada PT BPR Pesisir Tanadoang per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.854.929.821,45 Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada PT BPR Pesisir Tanadoang adalah 76% sehingga penyajiannya menggunakan metode ekuitas. Salah satu konsekuensi penerapan metode ekuitas adalah nilai investasinya berpedoman dari laba/rugi perusahaan/BUMD. Berdasarkan Laporan Keuangan PT BPR Pesisir Tanadoang Tahun 2022 *unaudited* diketahui bahwa laba bersih PT BPR Pesisir Tanadoang sebesar Rp1.577.428.627,00 berdasarkan persentase kepemilikan bagian laba (*dividen*) yang seharusnya dibagikan untuk Pemkab Kepulauan Selayar hanya mencapai Rp1.132.120.525,60 yang disajikan di Neraca dengan perhitungan dapat dilihat pada tabel 5.189.

Tabel 5.189 Rincian Nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada PT BPR Pesisir Tanadoang per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai	
	2022	2021
Penyertaan Modal per 31/12/2021	12.055.032.602,09	10.322.420.054,30
Dividen TA 2022 yang Seharusnya Dibagikan ke Pemda Kep. Selayar 76% X Laba bersih (LK BPR Pesisir Tanadoang)	1.132.120.525,60	1.151.715.409,27
Penyetoran Dividen atas Operasi Tahun 2021 ke Kas Daerah	(667.776.693,76)	(419.102.861,48)
Tambahan Penyertaan Modal T.A. 2022	0,00	1.000.000.000,00
Koreksi tambah	0,00	
Koreksi Kurang	(1.910.563.248,00)	
Persentase	12,00	16,78
Jumlah Penyertaan Modal per 31 Desember 2022	10.608.813.186,00	12.055.032.602,09

Dalam tahun anggaran 2022 diketahui adanya penambahan penyertaan modal sebesar



Rp1.000.000.000,00, berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penambahan Modal Disetor Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pesisir Tanah Doang.

Terdapat perbedaan antara pencatatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pencatatan nilai ekuitas BPR Pesisir Tanadoang. Atas perbedaan tersebut telah dilakukan koreksi dan penyesuaian atas nilai penyertaan modal pemda Kepulauan Selayar dengan pengurangan sebesar Rp1.910.563.248,00. Sejak TA 2017 s.d. 2022 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum mencatat penambahan dan pengurangan investasi karena adanya akumulasi pembagian laba ditahan berdasarkan Permendagri 94 tahun 2017 terdiri dari jasa produksi, tantiem, dana kesejahteraan dan dana CSR.

5) Penyertaan Modal pada PT Selayar Utama Corporation (SUC)

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada PT SUC per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.500.000.000,00.

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada PT SUC adalah 70% sehingga penyajiannya menggunakan metode ekuitas. Salah satu konsekuensi penerapan metode ekuitas adalah nilai investasinya berpedoman dari laba/rugi perusahaan/BUMD.

Namun metode penyajian tersebut tidak dapat diterapkan karena:

- a) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga namun permohonan tersebut ditolak dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum mengajukan eksekusi perdata ke Pengadilan Negeri. Atas hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan hasil dari kasasi tersebut MA menguatkan putusan Pengadilan Niaga.
 Pada bulan Desember 2015, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengajukan eksekusi terhadap putusan perdata ke Pengadilan Negeri. Sampai saat ini, belum terdapat putusan dari Pengadilan Negeri terkait permohonan eksekusi terhadap putusan perdata tersebut, sehingga RUPS dan proses likuidasi PT SUC masih belum dapat dilaksanakan.
- b) Sampai dengan Tahun 2022, tidak pernah diperoleh Laporan Keuangan PT SUC dan kondisi PT SUC yang saat ini tidak lagi beraktivitas.
- c) Berdasarkan Notulen RUPS Luar Biasa PT SUC tanggal 11 Mei 2022 telah menetapkan pembubaran PT Selayar Utama Corporation dan menyatakan keputusan rapat tersebut dihadapan notaris H. Muh. Ridwan Zainuddin, SH, MH.
- d) Dalam tahun 2023 telah terbit surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU-AH.01.03-00020, perihal berakhirnya status badan hukum PT. Selayar Utama (Dalam Likuidasi), tanggal 16 Januari 2023.

	TA 2022	TA 2021
5.3.1.3 Aset Tetap	1.733.737.692.338,21	1.886.305.566.021,27

Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.733.737.692.338,21 dan Rp1.886.305.566.021,27. Dalam TA 2022 aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp152.567.873.683,07 atau sebesar 8,09%. Aset tetap



dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, yaitu biaya administrasi, biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya kepanitiaan.

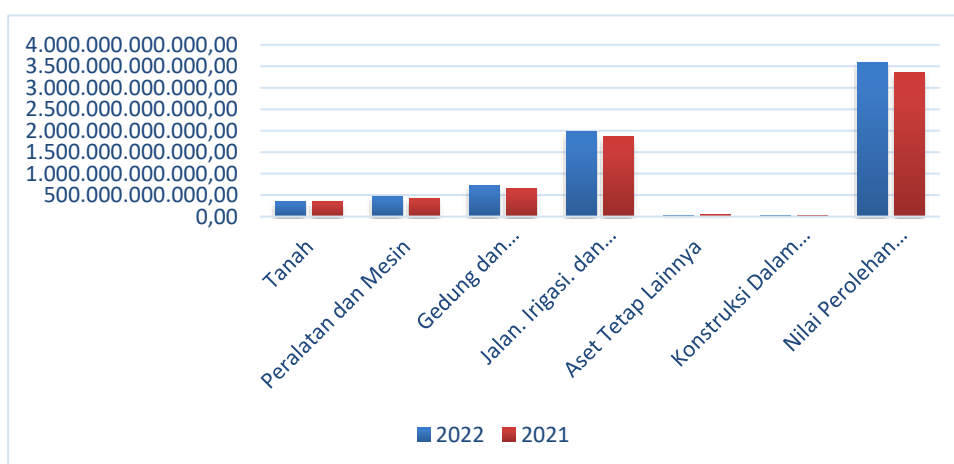
Kebijakan akuntansi tentang penyusutan dan *Capitalization Threshold* telah diterapkan sejak Laporan Keuangan per 31 Desember 2021. Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap maka harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya. Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel 5.190.

Tabel 5.190 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Tanah	362.388.821.496,00	361.283.407.696,00	0,31
2	Peralatan dan Mesin	472.351.900.693,78	426.987.969.792,78	10,62
3	Gedung dan Bangunan	724.829.736.480,18	664.277.469.037,48	9,12
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.973.516.457.935,99	1.858.694.144.420,67	6,18
5	Aset Tetap Lainnya	33.669.638.596,00	39.849.519.366,00	(15,51)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.334.858.407,31	14.134.766.560,18	93,39
	Nilai Perolehan Aset Tetap	3.594.091.413.609,26	3.365.227.276.873,10	6,80
7	Akumulasi Penyusutan	(1.860.353.721.271,05)	(1.478.921.710.851,83)	25,79
	Nilai Buku Aset Tetap	1.733.737.692.338,21	1.886.305.566.021,28	(8,09)

Gambar 5.3.1.3 Komposisi Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021





Rincian mutasi aset tetap pada **Lampiran 15.1**.

Sehubungan dengan penerapan *Capitalization Threshold* maka terdapat daftar *extracomptable* sebagai daftar yang memuat aset tetap dibawah nilai *Capitalization Threshold*. Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 ini terdapat sejumlah Rp14.716.987.864,50 aset tetap dalam daftar *extracomptable* yang menjadi pengurang aset tetap. Rincian aset *extracomptable* per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 15.2**.

Penjelasan masing-masing aset tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

5.3.1.3.1	Tanah	TA 2022	TA 2021
		362.388.821.496,00	361.283.407.696,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp362.388.821.496,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.105.413.800,00 (0,31%) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp361.283.407.696,00.

Perhitungan mutasi Aset Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (<i>unaudited</i>)	361.283.407.696,00
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	(0,00)
Saldo per 1-1-2022	361.283.407.696,00
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal	
▪ Realisasi BM-Tanah	1.886.851.800,00
▪ Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00
▪ Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022	(0,00)
- Penetapan nilai tanah di bawah jalan	0,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	0,00
- Mutasi antar OPD	425.000.000,00
Jumlah	2.311.851.800,00
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke AT KDP	(0,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(425.000.000,00)
- Koreksi Catat	(781.438.000)
- Reklasifikasi ke beban jasa	(0,00)
Jumlah	(425.000.000,00)
Saldo per 31-12-2022	362.388.821.496,00

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2022 sebesar Rp1.886.851.800,00. Rincian penambahan AT-Tanah dapat dilihat pada tabel 5.191.



Tabel 5.191 Rincian Penambahan AT-Tanah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pengadaan Tanah untuk lokasi Rumah Sakit Pratama Pasilambena pada Dinas Kesehatan seluas 45.000 m ²	351.907.200,00
2	Pembebasan Lahan Rumah Sakit Pratama Jamepa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seluas 7.397 m ²	431.810.000,00
3	Pengadaan Tanah Persil Dusun Bonelambere pada Dinas Perhubungan	888.160.600,00
4	Pengadaan Tanah Bangunan Industri pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	214.974.000,00
Jumlah		1.886.851.800,00

Dokumen tanah milik pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2022 terdapat *penambahan* dokumen sertifikat sebanyak 2 bidang tanah yang merupakan mutasi dari 2 dokumen akta hibah yang bersumber dari hibah masyarakat untuk lokasi SD Inpres Benteng Jamepa dan bersumber dari Hibah Kemenkses untuk lokasi Kantor Dinas Capil dan Gudang Farmasi. Dalam tahun 2022 terdapat 52 sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang belum tercatat dalam KIB A, atas hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam tahun 2023 akan segera melakukan penilaian atas tanah tersebut. Rincian Mutasi Bukti Kepemilikan AT-Tanah dapat dilihat pada tabel 5.192.

Tabel 5.192 Rincian Mutasi Bukti Kepemilikan AT-Tanah Tahun 2022

(dalam bidang tanah)

No	Dokumen	2021	Mutasi 2022		2022
			Tambah	Kurang	
1	Sertifikat	337	2		339
2	Akta Jual Beli/akta hibah	218		2	216
3	Tanpa Dokumen	522			522
Jumlah		1077	2	2	1077

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan aset tanah per OPD dapat dilihat pada *Lampiran 15.3*.

5.3.1.3.2

Peralatan dan Mesin

TA 2022	TA 2021
472.351.900.693,78	426.987.969.792,78

Peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp472.351.900.693,78 dan Tahun 2021 sebesar Rp426.987.969.792,78. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp47.706.429.163,00 (10,62%) dibandingkan tahun sebelumnya.

Perhitungan mutasi Aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (<i>audited</i>)	426.987.969.792,78
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan (koreksi kurang catat nilai perolehan)	0,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

- Pengurangan (koreksi lebih catat nilai perolehan)	(0,00)
Saldo per 1-1-2022	426.987.969.792,78
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal	
▪ Realisasi BM-Peralatan dan Mesin	40.530.407.319,00
▪ Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya	618.480.560,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	3.766.642.283,00
- Reklasifikasi dari Belanja BTT	60.300.000,00
- Reklasifikasi dari Belanja Hibah	15.000.000,00
- Reklasifikasi dari AT-Gedung dan Bangunan	3.300.336.492,00
- Reklasifikasi dari AT-JIJ	0,00
- Reklasifikasi antar rincian Peralatan dan Mesin	440.865.000,00
- Reklasifikasi dari ATL	33.000.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	0,00
- Pendapatan Hibah	2.214.146.468,00
- Mutasi antar OPD	1.973.355.600,00
- Koreksi Catat	17.858.500,00
Jumlah	52.970.392.222,00
Pengurangan:	
- Hibah ke masyarakat	(0,00)
- Penjualan (<i>dum</i>)	(0,00)
- Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa	(0,00)
- Reklasifikasi ke AT-Gedung dan Bangunan	(54.215.000)
- Reklasifikasi ke AT-JIJ	(37.975.000,00)
- Reklasifikasi ke ATL	(0,00)
- Reklasifikasi ke AT KDP	(942.110.000,00)
- Reklasifikasi ke ATB	(169.990.000,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya RB	(3.458.936.580)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya P3D	(0,00)
- Reklasifikasi antar rincian Peralatan dan Mesin	(440.865.000,00)
- Beban Barang dan Jasa	(9.655.000,00)
- Mutasi antar OPD	(1.973.355.600,00)
- Koreksi Catat	(519.359.141,00)
Jumlah	(7.606.461.321,00)
Saldo per 31-12-2022	472.351.900.693,78
Akumulasi Penyusutan	(329.366.033.510,02)
Nilai Buku per 31-12-2022	142.985.867.183,76

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa sebesar Rp3.766.642.283,00 berupa :
 - a) Pengadaan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp1.757.709.275,00, Alat studio dan Komunikasi sebesar Rp31.560.000,00, Alat Kedokteran dan kesehatan sebesar Rp315.000,00, Alat Laboratorium sebesar Rp120.066.897,00, Komputer sebesar Rp1.639.597.600,00, Alat keselamatan kerja sebesar Rp96.900.000,00, Peralatan Olahraga sebesar Rp106.168.513,00 pada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga;



- b) Pengadaan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp4.000.000,00 pada RSUD KH Hayyung;
- c) Pengadaan Alat rumah tangga sebesar Rp10.324.998,00 pada Kelurahan Bontobangun.
- 2) Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga berupa Alat Bengkel dan Alat ukur sebesar Rp60.300.000,00 pada BPBD.
- 3) Reklasifikasi dari belanja Hibah sebesar Rp15.000.000,00 merupakan hibah Alat Studio dan Komunikasi pada Kelurahan Benteng
- 4) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.300.336.492,00 dari:
 - a) Berupa alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp911.722.420,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b) Berupa Alat-alat Besar sebesar Rp92.314.960,00, Alat bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp257.704.960,00, Alat Laboratorium sebesar Rp25.368.100,00, dan Peralatan Proses/Produksi Sebesar Rp1.021.200,00 pada Dinas Perikanan;
 - c) Berupa alat angkutan sebesar Rp710.400.000,00, alat pertanian sebesar Rp120.600.000,00, alat kantor dan rumah tangga Rp220.320.000,00, pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - d) Berupa alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp1.166.886.840,00, Alat Komputer sebesar Rp3.110.000,00 Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - e) Berupa alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp13.584.420,00, Alat studio dan komunikasi sebesar Rp7.327.392,00 dan Komputer sebesar Rp12.464.000,00 pada Kelurahan Benteng Utara;
 - f) Rambu-rambu sebesar Rp248.540.000,00 pada Dinas Perhubungan.
 - g) Berupa Mesin Proses sebesar Rp45.000.000,00
- 5) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp33.000.000,00 pada Sekretariat Daerah
- 6) Pendapatan Hibah sebesar Rp2.350.796.468,00 berupa :
 - a) Alat besar sebesar Rp32.610.000,00, Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp268.600.000,00, Komputer sebesar Rp364.544.000,00, Alat keselamatan kerja sebesar Rp194.920.000,00 pada BPBD;
 - b) Alat Angkutan sebesar Rp136.650.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - c) Alat Angkutan sebesar Rp501.321.500,00, Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp6.200.000,00, Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp9.997.250,00, Komputer sebesar Rp84.753.000,00 pada Dinas Perpustakaan;
 - d) Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp231.209.050,00, Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp81.814.500,00, Komputer sebesar Rp206.975.168,00 pada Sekretariat Daerah;
 - e) Alat Laboratorium sebesar Rp181.785.000,00, Komputer sebesar Rp27.785.000,00 pada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga.
- 7) Koreksi catat sebesar Rp17.858.500,00 berupa computer pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 8) Reklasifikasi ke gedung dan bangunan sebesar Rp9.215.000,00 berupa Bangunan Gedung pada Dinas Kesehatan;
- 9) Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan Irigasi dan Irigasi Jaringan sebesar Rp37.975.000,00 berupa bangunan air sebesar Rp27.985.000,00, Jaringan sebesar Rp9.990.000,00 pada Dinas Kesehatan;



- 10) Reklasifikasi ke AT-KDP sebesar Rp942.110.000,00 berupa Alat Kedokteran sebesar Rp200.810.000,00 dan Alat Laboratorium sebesar Rp741.300.000,00 pada Dinas Kesehatan;
- 11) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp169.990.000,00 pada Sekretariat Daerah;
- 12) Reklasifikasi ke Aset Lainnya RB sebesar Rp3.458.936.580,00 berupa:
 - a) Alat Besar sebesar Rp35.000.000,00, Alat Angkutan sebesar Rp154.360.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - b) Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp95.440.000,00, Alat Angkutan sebesar Rp136.430.000,00, Komputer sebesar Rp18.000.000,00 pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - c) Komputer sebesar Rp8.600.000,00, Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp18.118.318,00 pada Kelurahan Putabangun;
 - d) Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp4.550.000,00, Komputer sebesar Rp4.500.000,00;
 - e) Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp4.000.000,00, Komputer sebesar Rp36.000.000,00 pada Kecamatan Bontoharu.
 - f) Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp84.000.500,00 pada Kecamatan Benteng, Dinas Pertanian, Kecamatan Bontoharu dan Dinas Pekerjaan Umum
 - g) Alat Angkutan Penumpang sebesar Rp324.895.010,00 pada Sekretariat DPRD, Dinas Perikanan dan Dinas Pekerjaan Umum
 - h) Alat Besar sebesar Rp2.268.564.752,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup
 - i) Komputer sebesar Rp222.070.000,00 pada Kecamatan Pasimarannu dan Dinas Pekerjaan Umum
 - j) Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp43.408.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum
 - k) Alat Studio Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp1.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum
- 13) Reklasifikasi ke Beban Barang Jasa sebesar Rp9.655.000,00 berupa Alat Kedokteran pada Dinas Kesehatan.
- 14) Koreksi Catat sebesar Rp519.359.141,00 merupakan barang yang tidak termasuk dalam kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Tabel 5.193 Rincian Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Alat-alat Besar	16.050.617.341,00	18.229.257.133,00	(11,95)
2	Alat-alat Angkutan	106.586.612.999,00	104.635.972.109,00	1,86
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	12.283.943.555,00	11.871.347.555,00	3,48
4	Alat-alat Pertanian	2.484.019.000,00	2.363.419.000,00	5,10
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	78.164.033.545,82	70.998.182.132,82	10,09
6	Alat Studio dan Komunikasi & Pemancar	13.901.916.603,00	12.261.272.974,00	13,38
7	Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	128.046.387.419,00	102.581.391.763,00	24,82
8	Alat-alat Laboratorium	49.949.003.038,30	45.789.997.732,30	9,08
9	Komputer	57.936.586.243,66	52.688.227.239,66	9,96
10	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	14.877.500,00	14.877.500,00	0,00
11	Alat Bantu Eksplorasi	238.678.000,00	238.678.000,00	0,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
12	Alat Keselamatan Kerja	4.009.815.406,00	3.627.913.724,00	10,53
13	Peralatan Proses/Produksi	704.371.087,00	56.909.887,00	1137,70
14	Rambu – Rambu	348.450.000,00	99.910.000,00	248,76
15	Peralatan Olah Raga	1.632.588.956,00	1.530.613.043,00	6,66
Jumlah Peralatan dan Mesin		472.351.900.693,78	426.987.969.792,78	10,62

Rincian mutasi per rincian aset peralatan dan mesin dapat dilihat pada **Lampiran 15.4.1**. Rincian mutasi aset peralatan dan mesin per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 15.4.2**. Sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki aset berupa kendaraan sebanyak 1.784 unit, dengan sejumlah 1.276 kendaraan yang telah didukung dengan bukti kepemilikan (diluar gerobak dan alat angkutan apung). Dari 1.784 unit kendaraan tersebut, sebanyak 459 unit belum didukung dengan bukti kepemilikan. Dalam aset peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat aset yang digunakan/dipinjam pakai oleh instansi vertikal, yaitu Kodim 1415 Kep. Selayar, Polres Kep. Selayar, Kejaksaan Negeri Kep. Selayar dan Pengadilan Negeri Kep. Selayar berupa empat kendaraan bermotor roda empat dengan rincian pada **Lampiran 15.4.3**.

	TA 2022	TA 2021
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	724.829.736.480,18	664.277.469.037,48

Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp724.829.736.480,18 dan Tahun 2021 sebesar Rp664.277.469.037,48. Saldo Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp60.552.267.442,70 (9,12%) dibandingkan tahun sebelumnya.

Perhitungan mutasi aset Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (<i>audited</i>)	664.277.469.037,48
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan (koreksi kurang catat nilai perolehan)	0,00
- Pengurangan (koreksi lebih catat nilai perolehan)	(0,00)
Saldo per 1-1-2022	664.277.469.037,48
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal	
▪ Realisasi BM-Gedung dan Bangunan	74.323.315.084,00
▪ Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya 2021 atas retensi	(0,00)
▪ Reklasifikasi ke AT-KDP	0,00
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	146.730.000,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya 2022	6.140.647.137,45
- Hibah	1.560.101.500,00
- Reklasifikasi dari AT-Tanah	0,00
- Reklasifikasi dari AT-Peralatan dan Mesin	54.215.000,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

- Reklasifikasi dari AT-Jalan. Irigasi dan Jaringan	142.078.000,00
- Reklasifikasi dari AT-Lainnya	0,00
- Reklasifikasi dari AT-KDP	3.369.176.394,10
- Reklasifikasi antar rincian GB	1.351.373.860,00
- Mutasi antar OPD	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	0,00
- Koreksi Catat	0,00
Jumlah	87.087.636.975,55
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke AT-Tanah	(0,00)
- Reklasifikasi ke AT-Peralatan dan Mesin	(3.300.336.492,00)
- Reklasifikasi ke AT-Jalan. Irigasi dan Jaringan	(3.594.426.689,00)
- Reklasifikasi ke AT-Lainnya	(53.500.000,00)
- Reklasifikasi ke AT-KDP	(16.083.040.615,85)
- Reklasifikasi antar rincian AT-GB	(1.351.373.860,00)
- Reklasifikasi ke beban barang jasa	(79.402.000,00)
- Utang Jangka Pendek Lainnya	(1.410.455.882,95)
- Mutasi antar OPD	(0,00)
- Hibah	(102.680.000,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	(560.153.992,00)
- Koreksi Catat	(1,05)
Jumlah	(25.888.929.532,85)
Saldo per 31-12-2022	724.829.736.480,18
Akumulasi Penyusutan	(169.183.442.575,10)
Nilai Buku per 31-12-2022	555.646.293.905,08

Mutasi tersebut antara lain berupa:

- 1) Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp146.730.000 berupa Pengadaan Bangunan dan Gedung pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp116.730.000,00 dan pada Rumah Sakit umum Daerah sebesar Rp30.000.000,00.
- 2) Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya atas retensi Tahun 2022 sebesar Rp6.140.647.137,45;
- 3) Hibah sebesar Rp1.560.101.500,00 berupa bangunan gedung pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.560.000.000,00 dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga sebesar Rp101.500,00;
- 4) Reklasifikasi dari AT- Peralatan dan Mesin, sebesar Rp9.215.000,00 berupa alat kedokteran dan kesehatan pada Dinas Kesehatan.
- 5) Reklasifikasi dari AT-Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp142.078.000,00 berupa Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Kelurahan Batangmata.
- 6) Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.369.176.394,10 pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp3.360.486.394,10 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.690.000,00.
- 7) Reklasifikasi ke AT-Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.653.896.492,00 berupa:
 - a) Alat Besar sebesar Rp92.314.960,00, Alat bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp257.704.000,00, Alat Laboratorium sebesar Rp25.368.100,00, Alat Proses/Produksi Sebesar Rp1.021.200,00 pada Dinas Perikanan;



- b) Alat-alat angkutan sebesar Rp710.400.000,00, Alat Pertanian sebesar Rp120.600.000,00, Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp220.320.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
- c) Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp911.722.420,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- d) Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp21.260.000,00 dan Alat Komputer sebesar Rp3.110.000,00 pada Dinas Pariwisata;
- e) Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp13.584.420,00, Alat studio dan Komunikasi sebesar Rp7.327.392,00, Alat Komputer sebesar Rp12.464.000,00 pada Kelurahan Benteng Utara;
- f) Alat-alat kedokteran sebesar Rp8160.000,00 pada Dinas Kesehatan;
- g) Rambu-rambu sebesar Rp248.540.000,00 pada Dinas Perhubungan.
- h) Mesin Proses sebesar Rp646.440.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup
- 8) Reklasifikasi ke AT-JIJ sebesar Rp3.594.426.689,00 berupa;
 - a) Jalan dan Jembatan sebesar Rp19.827.750,00 dan jaringan sebesar Rp1.272.000,00 pada Dinas Pariwisata;
 - b) Jalan dan Jembatan sebesar Rp148.766.000,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi usaha kecil dan menengah;
 - c) Bangunan Air sebesar Rp1.039.887.850,00 pada Dinas Perhubungan;
 - d) Bangunan Air sebesar Rp88.500.000,00 pada Kelurahan Batangmata Sapo;
 - e) Instalasi sebesar Rp2.210.342.539,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f) Instalasi sebesar Rp87.102.550,00 dan Jaringan sebesar Rp1.071.900,00 pada Dinas Perikanan;
- 9) Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp53.500.000,00 pada Dinas Pariwisata;
- 10) Reklasifikasi ke AT-KDP sebesar Rp16.083.040.615,85 berupa;
 - a) Bangunan Gedung sebesar Rp13.204.706.918,45 pada Dinas Kesehatan;
 - b) Bangunan Gedung sebesar Rp2.435.557.247,40 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c) Bangunan Gedung sebesar Rp229.900.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d) Bangunan Gedung sebesar Rp212.876.450,00 pada Sekretariat Daerah.
- 11) Reklasifikasi ke Beban Barang Jasa sebesar Rp79.402.000,00 berupa Bangunan Gedung pada Dinas Kesehatan sebesar Rp64.877.000,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp14.525.000,00;
- 12) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp1.410.455.882,95;
- 13) Hibah Bangunan Gedung sebesar Rp102.680.000,00 pada Kelurahan Putabangun.
- 14) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp560.153.992,00 berupa Bangunan Gedung pada Sekretariat Daerah;
- 15) Koreksi catat sebesar Rp1,05 pada Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olah Raga.

Tabel 5.194 Rincian Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Bangunan Gedung	699.987.968.788,18	641.765.916.921,48	9,07
2	Bangunan Monumen	10.875.197.765,00	10.875.197.765,00	0,00
3	Bangunan Menara	284.722.140,00	284.722.140,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	13.681.847.787,00	11.351.632.211,00	20,53
Jumlah Aset Gedung dan Bangunan		724.829.736.480,18	664.277.469.037,48	9,12



Rincian mutasi per rincian aset gedung dan bangunan dapat dilihat pada *Lampiran 15.5.1*.
Rincian mutasi aset gedung dan bangunan per OPD dapat dilihat pada *Lampiran 15.5.2*.

	TA 2022	TA 2021
5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.973.516.457.935,99	1.858.694.144.420,67

Jalan, Irigasi, dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp1.973.516.457.935,99 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.858.694.144.420,67. Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan mengalami peningkatan sebesar Rp14.822.313.515,32 (6,18%) dibandingkan tahun sebelumnya.

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan tersebut tidak termasuk tanah di bawah jalan sesuai dengan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Perhitungan mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (*audited*) 1.858.694.144.420,67

Koreksi Saldo Awal:

- Penambahan (koreksi kurang catat nilai perolehan)	0,00
- Pengurangan (koreksi lebih catat nilai perolehan)	0,00

Saldo per 1-1-2022 1.858.694.144.420,67

Mutasi Tahun 2022

Penambahan:

- Realisasi Belanja Modal	
▪ Realisasi BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.055.523.650,00
▪ Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya 2021 atas retensi	(2.799.035.427,90)
▪ Reklasifikasi dari AT-KDP	691.003.600,22
- Utang Jangka Pendek Lainnya 2022 atas retensi	3.407.309.032,00
- Hibah	33.861.837.570,00
- Reklasifikasi dari Belanja Hibah	1.500.000,00
- Reklasifikasi dari AT-Peralatan dan Mesin	37.975.000,00
- Reklasifikasi dari Kelompok Belanja Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari AT-Gedung dan Bangunan	3.594.426.689,00
- Mutasi antar OPD	0,00
- Reklasifikasi dari AL- Aset Tidak Berwujud	697.980.000,00
- Reklasifikasi antar rincian AT JIJ	554.288.674,00
Jumlah	118.102.808.787,32

Pengurangan:

- Reklasifikasi ke AT-Peralatan dan Mesin	(0,00)
- Reklasifikasi ke AT-GB	(142.078.000,00)
- Reklasifikasi ke AT-Lainnya	(0,00)
- Reklasifikasi ke AT-KDP	(2.582.128.598,00)
- Reklasifikasi ke Persediaan	(0,00)
- Reklasifikasi ke Beban Barang Jasa	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)



- Reklasifikasi antar rincian AT JIJ	(554.288.674,00)
- Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(0,00)
- Koreksi catat	(2.000.000,00)
	Jumlah (3.280.495.272,00)
Saldo per 31-12-2022	1.973.516.457.935,99
Akumulasi Penyusutan	(1.361.682.139.303,93)
Nilai Buku per 31-12-2022	611.834.318.632,06

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran utang jangka pendek lainnya 2021 atas retensi sebesar Rp2.799.035.427,90
- 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp691.003.600,22 berupa ;
 - a. Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp605.898.517,00 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp76.907.800,00.
 - b. Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.197.283,22.
- 3) Pembayaran utang jangka pendek lainnya 2022 atas retensi sebesar Rp3.407.309.032,00
- 4) Hibah sebesar Rp33.861.837.570,00 pada Dinas Perhubungan
- 5) Reklasifikasi dari Belanja Hibah sebesar Rp1.500.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- 6) Reklasifikasi dari AT-Peralatan dan Mesin sebesar Rp37.975.000,00 berupa Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- 7) Reklasifikasi dari AL- Aset tidak Berwujud sebesar Rp697.980.000,00 berupa Jaringan Telepon diatas tanah pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 8) Reklasifikasi dari AT-Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.594.426.689,00 berupa :
 - a. Bangunan Gedung sebesar Rp2.210.342.539,00, pada RSUD;
 - b. Bangunan Gedung sebesar Rp1.039.887.850,00 pada Dinas Perhubungan;
 - c. Bangunan Gedung sebesar Rp87.102.550,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. Bangunan Gedung sebesar Rp19.827.750,00 pada Dinas Pariwisata.
 - e. Bangunan Gedung sebesar Rp148.766.000,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - f. Bangunan Gedung sebesar Rp88.500.000,00 pada Kelurahan Batangmata Sapo.
- 9) Reklasifikasi ke AT-Gedung dan Bangunan sebesar Rp142.078.000,00 berupa Tugu titik control/pasti pada Kelurahan Batangmata.
- 10) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.582.128.598,00 berupa ;
 - a. Jalan dan Jembatan sebesar Rp1.259.321.598,00 pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang sebesar Rp1.231.451.598,00 dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp27.870.000,00.
 - b. Bangunan Air sebesar Rp1.322.807.000,00 pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang sebesar Rp1.312.817.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp9.990.000,00.
- 11) Koreksi catat sebesar Rp2.000.000,00 merupakan barang yang tidak memenuhi kriteria sebagai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 5.195 Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
----	--------	------	------	---



(dalam Rupiah)

1	Jalan dan Jembatan	1.457.366.998.515,88	1.373.412.597.913,78	6,11
2	Bangunan Air/Irigasi	365.473.600.700,88	342.027.827.713,88	6,85
3	Instalasi	43.858.438.506,12	41.045.334.459,12	6,85
4	Jaringan	106.817.420.213,11	102.208.384.333,89	4,51
Jumlah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.973.516.457.935,99	1.858.694.144.420,67	6,18

Rincian mutasi per rincian aset jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 15.6.1.**

Rincian mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 15.6.2.**

	TA 2022	TA 2021
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	33.669.638.596,00	39.849.519.366,00

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp33.669.638.596,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp39.849.519.366,00. Saldo Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp6.179.880.770,00 ((15,51)%) dibandingkan tahun sebelumnya.

Perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (<i>audited</i>)	39.849.519.366,000
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2022	39.849.519.366,000
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal	
▪ Realisasi BM-AT Lainnya	208.052.500,00
▪ Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya 2021	0,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0,00
- Kelahiran Hewan Ternak/naik kategori	449.540.000,00
- Reklasifikasi dari AT Peralatan dan Mesin	0,00
- Reklasifikasi dari AT- Gedung dan Bangunan	53.500.000,00
- Reklasifikasi dari AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
- Reklasifikasi antar Rincian ATL	0,00
- Hibah	44.996.985,00
- Mutasi antar OPD	0,00
Jumlah	756.089.485,00
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke AT-Peralatan dan Mesin	(33.000.000,00)
- Reklasifikasi ke AT-Gedung dan Bangunan	(0,00)
- Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	(0,00)
- Kematian Hewan Ternak	(504.900.000,00)
- Koreksi Catat	(6.228.017.755,00)



- Reklasifikasi antar rincian ATL	(0,00)
- Mutasi antar OPD	(0,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya (RB)	(170.052.500,00)
Jumlah	<u>(6.935.970.255,00)</u>
Saldo per 31-12-2022	33.669.638.596,00
Akumulasi Penyusutan	<u>(122.105.882,00)</u>
Nilai Buku per 31-12-2022	<u><u>33.547.532.714,00</u></u>

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

Koreksi catat sebesar Rp6.228.017.755,00 merupakan barang yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.204.095.622,00 dan Sekreatariat Daerah sebesar Rp23.922.133,00.

Tabel 5.196 Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Buku dan Perpustakaan	23.014.604.921,00	29.139.125.691,00	(21,02)
2	Barang Bercorak Kebudayaan	3.548.110.038,00	3.548.110.038,00	0,00
	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan	(122.105.882,00)	(121.532.000,00)	0,47
	Barang Bercorak Kebudayaan Netto	3.426.004.156,00	3.426.578.038,00	0,02
3	Hewan	4.875.180.000,00	4.930.540.000,00	(1,12)
4	Tanaman	1.088.992.335,00	1.088.992.335,00	0,00
5	Aset Tetap Renovasi	1.142.751.302,00	1.142.751.302,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	33.669.638.596,00	39.849.519.366,00	(15,51)

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Identifikasi Ternak Sapi Pulau Tanamala Nomor 498/BA-SAPI/TM/IV/2019/DISTANKP. diketahui jumlah total populasi ternak Sapi Bali sebanyak 606 per 31 Desember 2019 atas jumlah populasi tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum melakukan koreksi atas nilai saldo awal sebesar Rp5.072.980.000.00. atas nilai tersebut tidak dilakukan penyesuaian harga ternak dengan standar harga kabupaten karena adanya prinsip nilai perolehan. Selama Tahun 2021 dan 2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melakukan pengidentifikasian ternak sapi. Dalam tahun 2021 diketahui jumlah populasi hewan ternak sapi ras Bali berjumlah total sebanyak 638 ekor dengan nilai saldo akhir aset tetap lainnya berupa hewan dan ternak sapi bali sebesar Rp4.930.540.000,00 per 31 Desember 2021. Untuk tahun 2022 berdasarkan Data Populasi Sapi Tanamalala 2022 penjelasan mutasi populasi selama Tahun 2022 sebagai berikut : terdapat penambahan jumlah populasi karena kelahiran sebanyak 43 ekor berdasarkan BA kelahiran tanggal 31 Desember 2022 dan pengurangan jumlah populasi karena kematian sebanyak 57 ekor berdasarkan BA kematian tanggal 31 Desember 2022 sehingga total sebanyak 624 ekor dengan nilai saldo akhir aset tetap lainnya berupa hewan sapi bali sebesar Rp4.875.180.000,00 per 31 Desember 2022. Rincian Mutasi Populasi Ternak Sapi Bali dapat dilihat pada tabel 5.197.



Tabel 5.197 Rincian Mutasi Populasi Ternak Sapi Bali per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam satuan ekor)

No	Kategori	2021	mutasi 2022				Saldo Akhir
			Lahir	Mati	Naik Kategori		
					(+)	(-)	
1	Pejantan	94	0	15	19	0	98
2	Induk	272	0	21	11	0	262
3	Jantan Bakalan	75	0	7	28	19	77
4	Dara	63	0	9	15	11	58
5	Anak Jantan	81	29	3	0	28	79
6	Anak Betina	53	14	2	0	15	50
Jumlah		638	43	57	73	73	624

Rincian mutasi aset tetap lainnya per rincian dapat dilihat pada *Lampiran 15.7.1*.
Rincian mutasi aset tetap lainnya per OPD dapat di lihat pada *Lampiran 15.7.2*.

	TA 2022	TA 2021
5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.334.858.407,31	14.134.766.560,18

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

KDP adalah bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih dalam pembangunan/penyelesaian fisik sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp27.334.858.407,31 dan Tahun 2021 sebesar Rp14.134.766.560,18. Saldo KDP mengalami peningkatan sebesar Rp2.412.037.372,40 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengakuan aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan dari KDP. apabila aset tersebut sudah diselesaikan 100% dengan penyerahan berita acara pertama atau PHO. dan secara substansi sudah dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Perhitungan mutasi KDP adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (<i>audited</i>)	14.134.766.560,18
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Reklasifikasi dari BM-Gedung dan Bangunan	16.053.040.615,85
- Reklasifikasi dari BM-Peralatan dan Mesin	942.110.000,00
- Reklasifikasi dari BM-Jalan Irigasi dan Jaringan	2.582.128.598,00
- Utang jangka pendek lainnya Tahun 2022	88.549.875,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00
Jumlah	19.695.829.088,85
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke AT-Gedung dan Bangunan	(3.369.176.394,10)
- Reklasifikasi ke AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	(691.003.600,22)
- Reklasifikasi ke Persediaan	(2.435.557.247,40)
Jumlah	(6.495.737.241,72)
Saldo per 31-12-2022	27.334.858.407,31



Tabel 5.198 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Tanah	43.857.000,00	43.857.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	147.291.050,00	0,00	100,00
3	Gedung dan Bangunan	17.934.511.018,55	8.819.606.111,60	103,35
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	9.209.199.338,76	5.271.303.448,58	74,70
Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan		27.334.858.407,31	14.134.766.560,18	93,39

Rincian mutasi KDP per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 15.8.1**.

Rincian konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 15.8.2**.

Nilai KDP Tanah sebesar Rp43.857.000,00 merupakan biaya appraisal lokasi sarana dan prasarana air bersih di desa Lantibongan Kecamatan Bontosikuyu. Dalam tahun anggaran 2022 telah dianggarkan kembali pembangunan fisik penyelesaian KDP pada Dinas Perhubungan berupa DED pelabuhan pelensengan pada 3 wilayah Kecamatan Kepulauan.

	TA 2022	TA 2021
5.3.1.3.6 Akumulasi Penyusutan	(1.860.353.721.271,05)	(1.478.921.710.851,83)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan kebijakan akuntansi untuk penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus dan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, penyusutan dilaksanakan berdasarkan bulanan. Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.860.353.721.271,05) dan Tahun 2021 sebesar (Rp1.478.921.710.851,83). Rincian Akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada tabel 5.199.

Tabel 5.199 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(329.366.033.510,02)	(285.912.456.152,28)	15,20
3	Gedung dan Bangunan	(169.183.442.575,10)	(109.379.741.986,60)	54,68
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	(1.361.682.139.303,93)	(1.083.507.980.712,95)	25,67
5	Aset Tetap Lainnya	(122.105.882,00)	(121.532.000,00)	0,47
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan		(1.860.353.721.271,05)	(1.478.921.710.851,83)	25,79

Rincian akumulasi penyusutan per jenis aset tetap dapat dilihat pada **Lampiran 15.9.1**.

Rincian akumulasi penyusutan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 15.9.2**.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas. maka nilai buku aset tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 5.200.

Tabel 5.200 Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Tanah	362.388.821.496,00	361.283.407.696,00	0,31



(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
2	Peralatan dan Mesin	142.985.867.183,76	141.075.513.640,50	1,35
3	Gedung dan Bangunan	555.646.293.905,08	554.897.727.050,88	0,13
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	612.684.338.632,06	775.186.163.707,72	(20,96)
5	Aset Tetap Lainnya	33.547.532.714,00	39.727.987.366,00	(15,56)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.334.858.407,31	14.134.766.560,18	93,39
Jumlah Nilai Buku Aset Tetap		1.734.587.712.338,21	1.886.305.566.021,28	(8,04)

5.3.1.4

Aset Lainnya

TA 2022	TA 2021
56.838.762.143,00	53.293.687.857,36

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp56.838.762.143,00 dan Rp53.293.687.857,36. Saldo Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp3.545.074.285,64 atau sebesar 6,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel 5.201

Tabel 5.201 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
2	Aset Tak Berwujud	3.559.440.100,00	3.019.277.600,00	17,89
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.663.373.855,01)	(2.477.154.331,68)	7,52
	Aset Tak Berwujud Netto	896.066.244,99	542.123.268,32	65,29
3	Aset Lain-lain	147.686.488.003,91	143.667.397.431,91	2,80
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(93.869.489.422,88)	(90.915.832.842,88)	3,25
	Aset Lain-lain Netto	53.816.998.581,03	52.751.564.589,03	2,02
4	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.125.697.317,00	0,00	100,00
Jumlah Aset Lainnya		56.838.762.143,00	53.293.687.857,36	6,65

5.3.1.4.1

Tagihan Jangka Panjang

TA 2022	TA 2021
0,00	0,00

Tidak terdapat Tagihan Jangka Panjang per tanggal neraca.

5.3.1.4.2

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

TA 2022	TA 2021
0,00	0,00

Tidak terdapat Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal neraca.



	TA 2022	TA 2021
5.3.1.4.3 Aset Tak Berwujud	3.559.440.100,00	3.019.277.600,00

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.559.440.100,00 dan Rp3.019.277.600,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp540.162.500,00 atau 17,89%. Aset Tak Berwujud adalah aset berupa perangkat lunak (*software*) atau aplikasi yang ada pada OPD terkait. untuk menunjang kelancaran dalam mengoptimalkan dan mempermudah kerja untuk menghindari *trouble error*.

Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.663.373.855,02 dan Rp2.477.154.331,68 mengalami peningkatan sebesar Rp186.219.523,33 atau 7,52%.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan kebijakan akuntansi untuk Amortisasi Aset Tak Berwujud melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah pada Kebijakan Akuntansi Nomor 22 Akuntansi Penyusutan dan Amortisasi. Tata cara Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan amortisasi atas aset tak berwujud secara merata setiap semester.

Saldo per 31-12-2021 (<i>audited</i>)	3.019.277.600,00
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2022	3.019.277.600,00
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal	1.858.532.500,00
- Reklasifikasi dari AT-Peralatan dan Mesin	169.990.000,00
- Hibah	59.640.000,00
Jumlah	2.088.162.500,00
Pengurangan:	
- Reklasifikasi dari AT-JII	1.548.000.000,00
- Mutasi antar OPD	0,00
Jumlah	1.548.000.000,00
Saldo per 31-12-2022	3.559.440.100,00
Akumulasi Amortisasi	(2.663.373.855,01)
Nilai Buku per 31-12-2022	896.066.244,99

Rincian aset tak berwujud dan amortisasinya per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 16.1**.



	TA 2022	TA 2021
5.3.1.4.3 Aset Lain-lain	53.816.998.581,02	52.751.564.589,03

Aset Lain-lain merupakan kumpulan aset tetap yang direklasifikasi dari Peralatan dan Mesin (KIB B). Gedung dan Bangunan (KIB C) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang telah rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan lagi serta Aset Tetap P3D yang belum diserahkan ke Pemerintah Provinsi.

Dalam TA 2022 Aset lain-lain mengalami peningkatan sebesar Rp1.065.433.991,99 atau sebesar 2,02%. Nilai Aset Lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp147.686.488.003,91 dengan penyusutan sebesar Rp(93.869.489.422,89) sehingga nilai buku menjadi sebesar Rp53.816.998.581,02 dan nilai perolehan 2021 sebesar Rp143.667.397.431,91 setelah dikurangi penyusutan sebesar Rp(90.915.832.842,91) sehingga nilai buku menjadi sebesar Rp52.751.564.589,03.

Rincian aset lain-lain per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 16.2**.

Aset Lain-lain tersebut antara lain terdiri dari Aset Tetap dalam kondisi rusak berat, Aset P3D dan Jalan Nasional maupun Jalan Provinsi yang belum diserahkan kepada Pemerintah terkait

Nilai aset lain-lain tersebut belum termasuk kasus kerugian daerah yang masih bersifat informasi kerugian daerah dan masih dalam proses penyelesaian tindaklanjut.

	TA 2022	TA 2021
5.3.1.4.4 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.125.697.317,00	0,00

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility yang dititipkan di Bank Indonesia (BI) untuk Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar sebesar Rp2.125.697.317. Dana *Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)* dimaksud telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Dalam Bentuk Non Tunai serta surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-64/PK/PK.2/2023, perihal Rincian Penyaluran DBH Non Tunai melalui *TDF* Tahun 2022, tanggal 30 Maret 2023.

	TA 2022	TA 2021
5.3.2 Kewajiban	17.639.758.401,40	11.473.885.622,52

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan



dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp17.639.758.401,40 dan Rp11.473.885.622,52 mengalami peningkatan sebesar 6.165.872.778,88 atau 53,74%. Rincian Kewajiban dapat dilihat pada tabel 5.202.

Tabel 5.202 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Kewajiban Jangka Pendek	17.639.758.401,40	11.473.885.622,52	53,74
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		17.639.758.401,40	11.473.885.622,52	53,74

TA 2022

TA 2021

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

17.639.758.401,21

11.473.885.622,52

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo.

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp17.639.758.401,21 dan Rp11.473.885.622,52 mengalami peningkatan sebesar 6.165.872.778,88 atau 53,74%. Rincian Kewajiban Jangka Pendek dapat dilihat pada tabel 5.203.

Tabel 5.203 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	331.364,00	(100,00)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00
3	Utang Beban	6.250.023.408,82	6.184.762.595,64	1,06
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	11.389.734.992,58	5.288.791.662,88	115,36
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		17.639.758.401,40	11.473.885.622,52	53,74

5.3.2.1.1 Utang PFK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Dalam Tahun 2022 terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terkait perhitungan pihak ketiga yang belum disetor seluruhnya ke Rekening Kas Negara, sehingga saldo Utang PFK pada tanggal neraca sebesar Rp0,00. Rincian Utang PFK per Jenis PFK dapat dilihat pada tabel 5.204.

Tabel 5.204 Rincian Utang PFK per Jenis PFK per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Jenis PFK	2022	2021	%
1	PPN	0,00	227.273,00	(100,00)
2	PPh Ps. 21	0,00	70.000,00	(100,00)



(dalam Rupiah)

No	Jenis PFK	2022	2021	%
3	PPh Ps. 22	0,00	34.091,00	(100,00)
4	PPh Ps. 23	0,00	0,00	0,00
Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga		0,00	331.364,00	(100,00)

Tabel 5.205 Rincian Utang PFK per OPD per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	OPD	2022	2021	%
1	Puskesmas Benteng	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Pariwisata	0,00	331.364,00	(100,00)
Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga		0,00	331.364,00	(100,00)

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Tidak terdapat Pendapatan Diterima di Muka per tanggal neraca.

5.3.2.1.3 Utang Beban

Utang Beban berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang Beban dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.

Utang Beban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp6.250.023.408,82 dan Rp6.184.762.595,64 mengalami peningkatan sebesar Rp65.260.813,18 atau 1,06% . Rincian Utang Belanja/Beban dapat dilihat pada tabel 5.206.

Tabel 5.206 Rincian Utang Belanja/Beban per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	%
1	Utang Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00
2	Utang Belanja Barang Jasa	6.259.329.689,82	6.024.046.858,64	3,91
3	Utang Beban Persediaan	0,00	0,00	0,00
4	Utang Belanja Bagi Hasil	0,00	3.102.582,00	(100,00)
5	Utang Belanja Hibah	0,00	157.613.155,00	(100,00)
6	Utang Beban Transfer	423.095.366,83	0,00	(100,00)
Jumlah Utang Belanja/Beban		6.652.279.358,65	6.184.762.595,64	7,56

Rincian utang beban per OPD dapat dilihat pada *Lampiran 17.1*.

5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.389.734.992,58 merupakan utang kepada pihak ketiga antara lain utang dari perhitungan pelaksanaan proyek yang fisiknya melebihi realisasi keuangan.

Perhitungan mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (*audited*) 5.288.791.662,88
Koreksi Saldo:



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

- Penambahan	1.249.511,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2022	5.290.041.173,88
Penambahan:	
- Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022	10.354.986.604,45
- Mutasi antar OPD	0,00
Jumlah	15.645.027.778,33
Pengurangan:	
- Pembayaran kepada pihak ketiga	(4.220.418.710,95)
- Penghapusan	(34.788.754,80)
- Mutasi antar OPD	(0,00)
- Hibah	(85.320,00)
Jumlah	(4.255.292.785,75)
Saldo per 31-12-2022	11.389.734.992,58

Tabel 5.207 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per OPD per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	OPD	2022	2021	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	480.898.018,95	(100,00)
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan olah raga	484.142.525,00	0,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	4.128.832.711,45	800.335.450,00	415,89
3	RSUD	398.047.936,00	564.404.644,10	(29,47)
4	Dinas PU dan Penataan Ruang	4.950.806.263,50	2.879.367.423,20	71,94
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	224.484.100,00	157.080.100,00	42,91
7	Dinas Perhubungan	261.144.300,00	253.644.500,00	2,96
8	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	0,00	6.000.000,00	(100,00)
9	Dinas Perikanan	100.612.600,00	47.880.120,00	110,13
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.664.930,00	12.664.930,00	0,00
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	85.003.675,00	50.610.305,00	67,96
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	72.955.000,00	17.225.000,00	323,54
13	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	18.681.171,63	18.681.171,63	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	412.366.000,00	0,00	100,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAP2KB	20.396.280,00	0,00	100,00
16	Badan Penanggulangan Bencana	119.597.500,00	0,00	100,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	0,00	100,00
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya		11.389.734.992,58	5.288.791.662,88	115,36

Dalam Tahun 2022 telah dilakukan proses penelaahan dan penilaian Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Retensi pada empat OPD dalam rangka penghapusan Utang Retensi berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2017 dan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 577/XII/Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022.



Selanjutnya dalam tahun anggaran 2022 seluruh paket pekerjaan yang terutang atau memiliki retensi telah dianggarkan pada masing-masing OPD.

Rincian utang jangka pendek lainnya per OPD dapat dilihat pada *Lampiran 17.2.1 s.d. 17.2.2.*

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dalam proses penghapusan dapat dilihat dalam *Lampiran 17.2.3.*

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.3.3 Ekuitas	1.962.755.814.119,40	2.097.175.798.400,97

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas sampai dengan periode 31 Desember 2022 Rp1.962.755.814.119,40 dan Tahun 2021 Rp2.097.175.798.400,97. Saldo Ekuitas mengalami penurunan sebesar (Rp134.419.984.281,57) atau 6,41 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Perhitungan Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nilai Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2022	2.097.175.798.400,97
Surplus/Defisit LO pada 31 Desember 2022	139.712.922.932,40
Koreksi Ekuitas	(274.132.907.214,43)
Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022	<u>1.962.755.814.118,94</u>



5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

		TA 2022	TA 2021
5.4.1	Pendapatan-LO	1.064.971.383.239,44	949.535.776.239,63

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.064.971.383.239,44. Rincian Pendapatan –LO dapat dilihat pada tabel 5.208.

Tabel 5.208 Rincian Pendapatan –LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	55.894.022.140,44	55.565.670.356,63
2	Pendapatan Transfer – LO	952.767.460.773,00	843.550.969.583,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	51.801.888.567,00	50.419.136.300,00
Jumlah Pendapatan – LO		1.064.971.383.239,44	949.535.776.239,63

		TA 2022	TA 2021
5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah - LO	55.894.022.140,44	55.565.670.356,63

Akun Pendapatan Asli Daerah - LO ini merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO pada Laporan Operasional untuk periode TA 2022. Pendapatan Asli Daerah - LO pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp55.894.022.140,44, rincian Pendapatan Asli Daerah - LO dapat dilihat pada tabel 5.209.

Tabel 5.209 Rincian PAD – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan Pajak	12.647.867.922,72	9.978.902.245,00
2	Pendapatan Retribusi	2.250.352.270,00	1.939.897.000,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.430.935.833,23	9.343.535.925,27
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.564.866.114,49	34.303.335.186,36
Jumlah Pendapatan Asli Daerah – LO		55.894.022.140,44	55.565.670.356,63

Masing-masing realisasi jenis PAD TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.



5.4.1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

	TA 2022	TA 2021
	12.647.867.922,72	9.978.902.245,00

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh OPD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual. Pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2022 sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2022. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA. Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp12.647.867.922,72 dengan rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO dapat dilihat pada tabel 5.210.

Tabel 5.210 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Pajak Hotel – LO	177.338.361,00	90.948.749,00
2	Pajak Restoran – LO	2.566.945.461,24	2.248.951.041,00
3	Pajak Hiburan – LO	30.351.900,00	36.552.000,00
4	Pajak Reklame – LO	237.831.536,00	236.646.528,00
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	3.572.017.850,00	3.267.234.569,00
6	Pajak Air Tanah – LO	12.450.000,00	9.262.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	1.872.863.453,48	692.797.790,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	2.999.590.656,00	2.393.266.441,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	1.178.478.705,00	1.003.243.127,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO		12.647.867.922,72	9.978.902.245,00

Tabel 5.211 Rincian Pendapatan pajak Hotel – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
	Pajak Hotel-LO	177.338.361,00	90.948.749,00
Jumlah Pendapatan Pajak Hotel - LO		177.338.361,00	90.948.749,00

Tabel 5.212 Rincian Pendapatan Pajak Restoran – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	2.566.945.461,24	2.248.951.041,00
Jumlah Pendapatan Pajak Restoran - LO		2.566.945.461,24	2.248.951.041,00

Tabel 5.213 Rincian Pendapatan Pajak Hiburan – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	30.351.900,00	36.552.000,00
Jumlah Pendapatan Pajak Hiburan - LO		30.351.900,00	36.552.000,00



Tabel 5.214 Rincian Pendapatan Pajak Reklame – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	237.831.536,00	196.972.128,00
	Pajak Reklame Kain-LO	0,00	39.674.400,00
Jumlah Pendapatan Pajak Reklame - LO		237.831.536,00	236.646.528,00

Tabel 5.215 Rincian Pendapatan pajak Penerangan Jalan – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	3.572.017.850,00	3.267.234.569,00
Jumlah Pendapatan Pajak Penerangan Jalan - LO		3.572.017.850,00	3.267.234.569,00

Tabel 5.216 Rincian Pendapatan pajak Air Tanah – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
	Pajak Air Tanah-LO	12.450.000,00	9.262.000,00
Jumlah Pendapatan Pajak Air Tanah - LO		12.450.000,00	9.262.000,00

Tabel 5.217 Rincian Pendapatan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	1.872.863.453,48	692.797.790,00
Jumlah Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya - LO		1.872.863.453,48	692.797.790,00

Tabel 5.218 Rincian Pendapatan Pajak PBBP2 – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
	PBBP2-LO	2.999.590.656,00	2.393.266.441,00
Jumlah Pendapatan PBBP2 - LO		2.999.590.656,00	2.393.266.441,00

Tabel 5.219 Rincian Pendapatan Pajak BPHTB – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	1.178.478.705,00	1.003.243.127,00
Jumlah Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO		1.178.478.705,00	1.003.243.127,00



	TA 2022	TA 2021
5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	2.250.352.270,00	1.939.897.000,00

Pendapatan retribusi daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dipungut dan dikelola oleh OPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.250.352.270,00 dengan rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO dapat dilihat pada tabel 5.220.

Tabel 5.220 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Retribusi Jasa Umum-LO	809.482.000,00	753.787.500,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	1.180.353.170,00	1.066.147.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	260.517.100,00	119.962.500,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO		2.250.352.270,00	1.939.897.000,00

Tabel 5.221 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
Retribusi Jasa Umum-LO			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	23.840.000,00	27.931.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	382.865.000,00	310.240.000,00
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	175.227.000,00	188.900.000,00
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	11.550.000,00	13.900.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	0,00	9.416.000,00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	216.000.000,00	203.400.000,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO		809.482.000,00	753.787.500,00

Tabel 5.222 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
Retribusi Jasa Usaha-LO			
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	136.319.000,00	11.016.000,00
2	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	10.000.000,00	79.050.000,00
3	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	15.930.000,00	8.400.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	75.200.000,00	86.597.000,00
5	Retribusi Pemakaian Alat-LO	12.100.000,00	12.500.000,00
6	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO	183.407.750,00	121.899.500,00
7	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO	99.200.000,00	89.950.000,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
8	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum- LO	5.229.000,00	
9	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	8.469.000,00	20.925.000,00
10	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO		10.554.000,00
11	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	30.725.000,00	54.405.000,00
12	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	603.144.420,00	570.850.500,00
13	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	629.000,00	
Jumlah Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO		1.180.353.170,00	1.066.147.000,00

Tabel 5.223 Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
	Retribusi Perizinan Tertentu-LO		
	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	260.517.100,00	119.962.500,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu -LO		260.517.100,00	119.962.500,00

5.4.1.1.3

Pendapatan HPKD yang Dipisahkan

	TA 2022	TA 2021
Pendapatan HPKD yang Dipisahkan	12.430.935.833,23	9.343.535.925,27

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui BPKPAD dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp12.430.935.833,23 dengan rincian Pendapatan HPKD Yang Dipisahkan – LO dapat dilihat pada tabel 5.224.

Tabel 5.224 Rincian Pendapatan HPKD Yang Dipisahkan – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal		
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	12.430.935.833,23	9.343.535.925,27
Jumlah Pendapatan PHPKD yang dipisahkan-LO		12.430.935.833,23	9.343.535.925,27

5.4.1.1.4

Lain-lain PAD yang Sah

	TA 2022	TA 2021
Lain-lain PAD yang Sah	28.564.866.114,49	34.303.335.186,36

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode TA 2022 dengan realisasi sebesar Rp28.564.866.114,49 dengan rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO dapat dilihat pada tabel 5.225.



Tabel 5.225 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Jasa Giro-LO	1.593.611.412,18	1.476.375.103,00
2	Pendapatan Bunga-LO	515.546,24	122.849.308,00
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	2.803.044.881,87	2.604.200.953,63
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	2.600.789.509,20	7.501.356.290,73
5	Pendapatan dari BLUD-LO	21.566.904.765,00	22.592.553.531,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	6.000.000,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO		28.564.866.114,49	34.303.335.186,36

5.4.1.2

Pendapatan Transfer-LO

	TA 2022	TA 2021
	957.275.472.532,00	843.550.969.583,00

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh BPKPAD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2022 sebesar Rp957.275.472.532,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.226 Rincian Pendapatan Transfer – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	832.390.295.712,00	774.854.869.641,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	73.995.426.000,00	21.085.165.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	50.889.750.820,00	47.610.934.942,00
4	Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya	0	00,00
Jumlah Pendapatan Transfer - LO		957.275.472.532,00	843.550.969.583,00

Masing-masing realisasi jenis Pendapatan Transfer TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.2.1

Transfer Pemerintah Pusat – LO

	TA 2022	TA 2021
	832.390.295.712,00	774.854.869.641,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode Tahun 2022 secara total terealisasi sebesar Rp832.390.295.712,00 dengan rincian Transfer Pemerintah Pusat– LO dapat dilihat pada tabel 5.227.

Tabel 5.227 Rincian Transfer Pemerintah Pusat– LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan		
	DBH PBB-LO	5.080.785.641,00	7.698.756.019,00
	DBH PPh Pasal 21-LO	5.544.651.057,00	5.884.132.789,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
	DBH CHT-LO	198.178.497,00	198.274.049,00
	DBH SDA Minyak Bumi-LO	1.613.884.287,00	1.195.798.568,00
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	9.769.505.740,00	4.794.055.406,00
	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	58.143.446,00	37.515.547,00
	DBH SDA Perikanan-LO	1.958.311.000,00	1.496.660.338,00
	DAU-LO	562.051.400.598,00	560.147.323.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	2.627.952.000,00	550.065.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	2.967.342.100,00	14.971.508.329,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	4.252.803.530,00	3.175.284.850,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	224.897.500,00	
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO	189.000.000,00	304.781.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	0,00	24.861.807.700,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	0,00	21.731.288.512,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	3.530.614.571,00	1.787.918.644,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	21.994.694.238,00	
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	66.871.000,00	
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	475.888.592,00	
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	996.527.796,00	634.861.185,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	0,00	8.408.422.848,00
	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	1.048.570.000,00	1.621.036.000,00
	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	6.409.581.125,00	
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	2.859.131.157,00	2.549.483.750,00
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	2.971.625.095,00	2.131.042.650,00
	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	1.313.509.400,00	1.069.850.000,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	23.506.918.154,00	11.751.124.400,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	3.599.340.820,00	
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	0,00	7.194.784.420,00
	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	7.357.841.276,00	2.719.500.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	57.037.525.584,00	4.156.523.000,00
	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	21.184.204.325,00	
	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi-LO	0,00	511.287.000,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	680.000.000,00	
	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	50.176.135.000,00	52.794.063.000,00
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	994.999.500,00	900.000.000,00
	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	5.695.800.000,00	6.500.462.700,00
	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	3.173.244.000,00	3.232.800.000,00
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	1.648.100.000,00	2.039.500.000,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	694.773.810,00	591.037.756,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	13.035.213.210,00	10.325.753.554,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO	0,00	485.334.000,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas- LO	0,00	847.635.000,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO	0,00	507.805.000,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	1.640.730.463,00	3.085.603.437,00
	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	2.341.961.000,00	
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	0,00	938.186.190,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	1.067.650.100,00	862.318.000,00
	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO	351.990.100,00	161.286.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer - LO		832.390.295.712,00	774.854.869.641,00

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	73.995.426.000,00	21.085.165.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya– Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode TA 2022 sebesar Rp73.995.426.000,00. Dana Desa sejak tahun anggaran 2021 merupakan transfer langsung dari RKUN ke RKU Desa bukan lagi merupakan bagian pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO dapat dilihat pada tabel 5.228.

Tabel 5.228 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO		
1	DID-LO		
	DID-LO	2.950.221.000,00	21.085.165.000,00
		2.950.221.000,00	21.085.165.000,00
2	Dana Desa-LO		
	Dana Desa-LO	71.045.205.000,00	0,00
		71.045.205.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer - LO		73.995.426.000,00	21.085.165.000,00

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	50.889.750.820,00	47.610.934.942,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya untuk periode TA 2022 sebesar Rp50.889.750.820,00 berupa pendapatan bagi hasil pajak dengan Rincian Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO dapat dilihat pada tabel 5.229.



**Tabel 5.229 Rincian Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO
per 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
	Pendapatan Bagi Hasil-LO		
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	7.259.107.995,00	20.270.428.463,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	5.899.806.210,00	3.041.539.641,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	12.629.448.556,00	5.286.152.291,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	66.742.200,00	29.801.219,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	10.585.139.456,00	7.893.013.328,00
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO	14.449.506.403,00	11.090.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer - LO	50.889.750.820,00	47.610.934.942,00

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah **TA 2022** 51.801.888.567,00 **TA 2021** 50.419.136.300,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah ini pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp51.801.888.567,00. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO dapat dilihat pada tabel 5.230

**Tabel 5.230 Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO
per 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan Hibah – LO	37.927.930.623,00	12.813.889.000,00
2	Pendapatan Lainnya	13.873.957.944,00	37.605.247.300,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	51.801.888.567,00	50.419.136.300,00

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO **TA 2022** 37.927.930.623,00 **TA 2021** 12.813.889.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah untuk periodeTA 2022 sebesar Rp37.927.930.623,00 dengan rincian Pendapatan Hibah - LO dapat dilihat pada tabel 5.231.

Tabel 5.231 Rincian Pendapatan Hibah - LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO		
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	37.732.891.403,00	12.346.175.750,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO		
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	194.920.000,00	0,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO		



(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	467.713.250,00
	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	119.220,00	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah - LO		37.927.930.623,00	12.813.889.000,00

- 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah –LO senilai Rp37.732.891.403,00 terdiri dari:
 - a) Pendapatan Hibah peralatan TIK dari Kemendikbud sebesar Rp181.785.000,00 berupa Alat Laboratorium;
 - b) Pendapatan Hibah dari BKKBN berupa persediaan alat kontrasepsi dan obat kontrasepsi pada Dinas P3AP2KB sebesar Rp236.607.380,00.
 - c) Pendapatan Hibah dari Kementerian Perhubungan atas Pelabuhan Penyeberangan Pamatata sebesar Rp33.861.837.570,00
 - d) Pendapatan Hibah dari Perpunas sebesar Rp661.911.750 berupa Rp602.271.750,00 merupakan Peralatan dan Mesin dan Rp59.640.000,00 merupakan Aplikasi (Digital Library Sistem)
 - e) Pendapatan Hibah dari BNPB sebesar Rp665.754.000,00 berupa Peralatan dan Mesin.
 - f) Pendapatan Hibah dari Kemendikbud atas aset dari Politeknik Negeri Bali sebesar Rp2.124.995.703,00 berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp519.998.718,00, Gedung sebesar Rp1.560.000.000,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp44.996.985,00
- 2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah – LO sebesar Rp194.920.000,00 merupakan Hibah dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan berupa Alat Keselamatan Kerja
- 3) Hibah dari perorangan merupakan Hibah atas utang retensi sebesar Rp119.220,00 masing-masing pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp101.500,00 dan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp17.720,00

		<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.4.1.3.2	Pendapatan Lainnya – LO	13.873.957.944,00	37.605.247.300,00

Realisasi Pendapatan Lainnya–LO untuk periode TA 2022 sebesar Rp13.873.957.944,00 dengan rincian Pendapatan Lainnya – LO dapat dilihat pada tabel 5.232.

Tabel 5.232 Rincian Pendapatan Lainnya - LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO		
	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00	23.737.195.000,00
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP - LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO		
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	13.873.957.944,00	13.868.052.300,00
Jumlah Pendapatan Lainnya - LO		13.873.957.944,00	37.605.247.300,00

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp13.873.957.944,00 untuk 14 Puskesmas.



	TA 2022	TA 2021
5.4.2	921.710.685.362,57	952.902.217.984,29

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pada TA 2022, beban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp921.710.685.362,57 dengan rincian Beban dapat dilihat pada tabel 5.233.

Tabel 5.233 Rincian Beban – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Pegawai – LO	354.916.349.730,52	387.352.865.278,28
2	Beban Persediaan – LO	41.396.251.836,50	39.318.628.650,86
3	Beban Jasa – LO	151.786.431.659,72	164.138.127.631,75
4	Beban Pemeliharaan – LO	13.875.285.592,41	10.043.444.932,60
5	Beban Perjalanan Dinas – LO	58.689.435.523,00	50.782.865.567,00
6	Beban Subsidi	0,00	0,00
7	Beban Hibah	28.835.102.812,00	33.644.351.262,00
8	Beban Bantuan Sosial	8.457.711.300,00	7.333.129.000,00
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	127.885.263.401,50	189.469.073.361,75
10	Beban Penyisihan Piutang	67.630.827,92	283.569.476,77
11	Beban Transfer	135.725.725.488,00	69.458.777.171,00
12	Beban Lain-lain	75.497.191,00	1.077.385.652,28
Jumlah Beban – LO		921.710.685.362,57	952.902.217.984,29

Masing-masing akun Beban - LO dapat diuraikan sebagai berikut:

	TA 2022	TA 2021
5.4.2.1	354.916.349.730,52	387.352.865.278,28

Beban Pegawai - LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2022 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2022. Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp354.916.349.730,52 dengan rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel 5.234.

Tabel 5.234 Rincian Beban Pegawai – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Gaji Pokok ASN	183.135.579.701,00	182.271.549.383,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	15.523.237.251,00	15.400.799.130,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.356.955.904,00	6.497.821.948,00
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	13.210.640.272,00	11.849.487.000,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.616.079.548,00	2.560.270.720,00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	9.927.993.102,00	9.846.092.303,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	211.784.882,00	184.865.895,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.573.244,00	2.597.161,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.084.547.237,00	10.971.529.665,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	409.266.995,00	742.320.127,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.135.870.350,00	751.754.495,00
12	Beban Tunjangan Khusus	5.283.220.900,00	1.666.762.100,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	26.960.859.805,00	44.899.602.611,00
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	315.026.253,00	0,00
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	666.803.455,00	4.855.136.615,00
15	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	50.759.738.536,00	59.959.555.721,00
16	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	38.626.950,00	4.768.520.436,00
17	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	287.052.102,00	195.547.228,00
18	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	55.150.787,00	47.193.233,00
19	Beban Honorarium	5.108.996.340,00	3.892.679.000,00
20	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	385.460.000,00
21	Beban Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	554.505.000,00
22	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	38.526.600,00	35.532.000,00
23	Beban Tunjangan Beras DPRD	49.824.960,00	47.435.100,00
24	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00	47.596.500,00
25	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	804.032.250,00
26	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	77.830.200,00	76.003.200,00
27	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12.606.300,00	12.606.300,00
28	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	3.118.500.000,00
29	Beban Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	787.500.000,00
30	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	0,00	36.967.769,00
31	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.500.831.844,00	2.542.463.834,00
32	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.432.000.000,00	3.471.000.000,00
33	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD		3.360.000,00
34	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	55.586.400,00	54.600.000,00
35	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.636.000,00	6.636.000,00
36	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00
37	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.214.240,00	6.083.280,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
38	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	53.153.988,00	15.465.226,00
39	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.680,00	1.840,00
40	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	4.557.600,00	3.646.080,00
41	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	93.600,00	74.880,00
42	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00	224.640,00
43	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	39.859.169,00	30.178.000,00
44	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	7.914.624,00	7.051.863,00
45	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	180.600.000,00
46	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	269.310.135,28
47	Beban Pegawai BOS	0,00	3.275.848.000,00
48	Beban Pegawai BLUD	11.145.863.111,52	10.117.818.610,00
49	Beban Tunjangan Perumahan – LO	0,00	-
Jumlah Beban Pegawai- LO		354.916.349.730,52	387.352.865.278,28

5.4.2.2

Beban Persediaan – LO

TA 2022	TA 2021
41.396.251.836,50	39.318.628.650,86

Beban Persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp41.396.251.836,50 dengan rincian Beban Persediaan – LO dapat dilihat pada tabel 5.235

Tabel 5.235 Rincian Beban Persediaan – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	158.835.500,00	173.841.700,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	129.909.609,00	230.199.250,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.383.430.265,00	1.604.597.198,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	7.566.500,00	0,00
5	Beban Bahan-Barang dalam Proses	0,00	112.399.200,00
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	69.660.000,00	1.870.130.000,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.000.000,00	22.100.000,00
8	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	20.973.000,00	0,00
9	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	20.750.000,00	12.000.000,00
10	Beban Bahan-Bahan Lainnya	753.989.359,0	562.740.000,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.271.993.298,00	7.225.939.993,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	138.369.000,00	0,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.870.493.346,00	4.071.746.833,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	75.304.000,00	33.554.000,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	13.859.300,00	0,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	425.081.000,00	32.555.000,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	615.017.594,00	757.186.109,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	303.842.125,00	157.446.750,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	45.600.000,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	1.080.000,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	46.500.000,00	20.450.000,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	530.202.021,00	1.418.421.788,00
23	Beban Obat-Obatan-Obat	6.851.124.525,50	2.296.970.950,79
24	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.506.975.866,00	4.827.343.234,07
25	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.961.986.371,00	24.142.545,00
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	133.100.000,00	0,00
27	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.069.085.736,00	544.752.400,00
28	Beban Natura dan Pakan-Pakan	43.427.200,00	20.710.000,00
29	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	21.384.000,00	0,00
30	Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.201.692.000,00	6.921.851.000,00
31	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.545.410.000,00	2.883.996.800,00
32	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	87.696.000,00	213.207.000,00
33	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	368.798.000,00	937.867.500,00
34	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	5.900.000,00	24.550.000,00
35	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	746.508.000,00	802.633.000,00
36	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	239.958.221,00	40.000.000,00
37	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	19.500.000,00	20.250.000,00
38	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	154.600.000,00	238.100.000,00
39	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	112.250.000,00	0,00
40	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	86.500.000,00	266.510.000,00
41	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	15.500.000,00	78.080.000,00
42	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	159.612.500,00
43	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	82.250.000,00	62.000.000,00
44	Beban Pakaian Penyelamatan	10.000.000,00	0,00
45	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	56.330.000,00	0,00
46	Beban Pakaian Adat Daerah	204.600.000,00	89.500.000,00
47	Beban Pakaian Batik Tradisional	21.400.000,00	16.600.000,00
48	Beban Pakaian Olahraga	7.500.000,00	95.900.000,00
49	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	400.593.900,00
50	Beban Pipa-Pipa Fiber Glass	0,00	1.470.000,00
	Jumlah Beban Persediaan – LO	41.396.251.836,50	39.318.628.650,86

5.4.2.3

Beban Jasa – LO

TA 2022	TA 2021
151.786.431.659,72	164.138.127.631,75



Beban Jasa adalah Beban Jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp151.786.431.659,72 dengan rincian Beban Jasa – LO dapat dilihat pada tabel 5.236.

Tabel 5.236 Rincian Beban Jasa – LO per 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator. Pembawa Acara. dan Panitia	3.440.042.000,00	2.325.104.200,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	282.150.000,00	466.690.000,00
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli. Saksi Ahli. dan Beracara	33.200.000,00	81.000.000,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.802.325.000,00	1.168.950.000,00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	12.400.000,00	956.000.000,00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal. Buletin. Majalah. Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.331.300.000,00	1.186.870.000,00
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	10.800.000,00	0,00
8	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	29.600.000,00
9	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	0,00	540.300.000,00
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	5.647.000.000,00	6.833.400.000,00
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	21.677.098.647,00	27.866.716.763,00
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	82.540.600,00	2.500.000,00
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.438.300.000,00	2.554.825.000,00
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman. Ketertiban Umum. dan Perlindungan Masyarakat	1.145.490.000,00	6.046.790.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	133.000.000,00	0,00
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	10.000.000,00	0,00
17	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	1.652.000.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	29.200.000,00	156.261.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Administrasi	16.446.550.000,00	13.892.741.600,00
20	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	865.750.000,00	3.185.700.000,00
21	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.985.320.000,00	4.100.000,00
22	Beban Jasa Tenaga Ahli	432.419.400,00	27.750.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.596.400.000,00	1.353.100.000,00
24	Beban Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	24.000.000,00
25	Beban Jasa Tenaga Supir	1.318.800.000,00	1.217.462.500,00
26	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	47.000.000,00	0,00
27	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	28.500.000,00	44.800.000,00
28	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	33.600.000,00	263.600.000,00
29	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	150.000.000,00	40.800.000,00
30	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	75.950.000,00	20.900.000,00
31	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	867.737.900,00
32	Beban Jasa Pencucian Pakaian. Alat Kesenian dan Kebudayaan. serta Alat Rumah Tangga	19.060.000,00	88.048.000,00
33	Beban Jasa Kalibrasi	0,00	324.542.500,00
34	Beban Jasa Pengolahan Sampah	(49.000.000,00)	199.100.000,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
35	Beban Jasa Iklan/Reklame. Film. dan Pemotretan	1.408.200.000,00	1.417.752.000,00
36	Beban Tagihan Telepon	0,00	26.617.541,00
37	Beban Tagihan Air	240.699.500,00	227.466.270,00
38	Beban Tagihan Listrik	7.119.599.956,00	6.785.468.608,00
39	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	429.200.000,00	197.690.000,00
40	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.453.355.418,00	2.071.610.372,00
41	Beban Paket/Pengiriman	20.175.000,00	13.291.000,00
42	Beban Registrasi/Keanggotaan	30.000.000,00	0,00
43	Beban Pembayaran Pajak. Bea. dan Perizinan	246.292.640,16	128.366.922,00
44	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	10.912.500,00	101.134.375,00
45	Beban Pengolahan Air Limbah	4.200.000,00	0,00
46	Beban Medical Check Up	190.133.400,00	57.700.000,00
47	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	79.990.000,00	1.493.957.152,00
48	Beban Honorarium PNS Lainnya – LO	0,00	8.600.000,00
49	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.344.874.320,00	898.735.692,00
50	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	20.507.518.000,00	25.522.677.000,00
51	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.161.560.100,00	2.063.135.200,00
52	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.708.694,00	0,00
53	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.254.812.332,00	1.100.266.798,00
54	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	408.000.000,00	0,00
55	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	126.878.602,00	126.878.602,00
56	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	3.000.000,00	0,00
57	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	3.000.000,00	0,00
58	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	513.508.666,00	0,00
59	Beban Sewa Peralatan Selam	0,00	19.600.000,00
60	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	24.833,33
61	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	210.993.500,00
62	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	85.000.000,00
63	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	3.000.000,00
64	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.781.913.600,00	2.094.010.886,00
65	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	383.300.000,00	41.400.000,00
66	Beban Sewa Mebel	0,00	63.700.000,00
67	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	56.360.000,00	9.300.000,00
68	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	118.500.000,00
69	Beban Sewa Peralatan Umum	0,00	44.650.000,00
70	Beban Sewa Komputer Jaringan	30.000.000,00	15.000.000,00
71	Beban Sewa Personal Computer	39.900.000,00	0,00
72	Beban Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	0,00	1.200.000,00
73	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	209.500.000,00
74	Beban Sewa Bangunan Gudang	4.500.000,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
75	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	497.572.000,00	171.600.000,00
76	Beban Sewa Alat Musik	28.000.000,00	0,00
77	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	54.000.000,00	0,00
78	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	46.557.500,00
79	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	185.720.000,00
80	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	553.021.000,00	186.890.000,00
81	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	480.000.000,00	0,00
82	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	557.125.000,00	0,00
83	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	15.000.000,00	0,00
84	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	99.550.000,00
85	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	199.272.750,00	131.626.000,00
86	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	99.844.500,00	0,00
87	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Perindustrian dan Perdagangan	74.980.500,00	0,00
88	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan	82.000.000,00	0,00
89	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	0,00	50.000.000,00
90	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kesehatan	31.884.260,00	17.150.000,00
91	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	220.000.000,00	152.000.000,00
92	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	374.365.952,00	367.844.000,00
93	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	0,00	46.200.000,00
94	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	5.500.000,00	8.530.000,00
95	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	106.000.000,00	27.000.000,00
96	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.815.596.184,00	1.244.165.000,00
97	Beban Sosialisasi	3.723.799.917,00	1.759.206.500,00
98	Beban Bimbingan Teknis	835.659.000,00	490.535.000,00
99	Beban Diklat Kepemimpinan	1.244.240.404,00	1.957.936.800,00
100	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	18.200.000,00	0,00
101	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	0,00	8.212.641.530,00
102	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	260.300.000,00	185.503.000,00
103	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	38.050.000,00	102.500.000,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
104	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	9.080.000.000,00	0,00
105	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.838.570.000,00	1.875.996.000,00
106	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	156.000.000,00	1.737.115.000,00
107	Beban Barang dan Jasa BOS	18.912.275.523,00	16.366.366.023,00
108	Beban Barang dan Jasa BLUD	6.535.386.294,56	10.136.879.064,42
Jumlah Beban Jasa – LO		151.786.431.659,72	164.138.127.631,75

5.4.2.4

Beban Pemeliharaan – LO

TA 2022	TA 2021
13.875.285.592,41	10.043.444.932,60

Beban Pemeliharaan adalah Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp13.875.285.592,41 dengan rincian Beban Pemeliharaan – LO dapat dilihat pada tabel 5.237.

Tabel 5.237 Rincian Beban Pemeliharaan – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air	0,00	3.720.000,00
2	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0,00	134.035.000,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	39.875.000,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	84.475.000,00	144.415.300,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	680.961.416,66	0,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.671.801.237,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	659.845.460,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.206.635.740,75	0,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	162.646.580,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	298.098.275,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(1.712.111,00)	0,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	19.796.000,00	0,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	125.645.000,00	0,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	8.142.500,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
15	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	0,00	69.568.000,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	0,00	10.000.000,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	0,00	6.407.902,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	1.776.775.404,67
19	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	1.912.583.852,18
20	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	219.500,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	833.473.680,75
22	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	739.927.250,00
23	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	0,00
24	Beban Jasa KIR	0,00	0,00
25	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00
26	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	0,00
27	Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	0,00	0,00
28	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00	795.226,00
29	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0,00	80.933.000,00
30	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	0,00	2.420.000,00
31	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	0,00	8.362.000,00
32	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	284.053.400,00	112.341.500,00
33	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	72.000.000,00	24.320.000,00
34	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	157.860.000,00	341.366.000,00
35	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.618.000,00	0,00
36	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	9.975.000,00	0,00
37	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	39.022.600,00	0,00
38	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	162.790.000,00	0,00
39	Beban Pemeliharaan Alat Studio. Komunikasi. dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	9.823.800,00
40	Beban Pemeliharaan Alat Studio. Komunikasi. dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	3.900.000,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
41	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	8.970.000,00
42	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	202.190.000,00
43	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	6.750.000,00	4.000.000,00
44	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrolog	1.455.000,00	0,00
45	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	152.926.800,00	263.394.300,00
46	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	165.203.298,00	0,00
47	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	93.404.000,00	106.021.940,00
48	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	122.927.000,00	117.930.000,00
49	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersua	10.025.500,00	0,00
50	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	20.000.000,00	0,00
51	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.173.544.122,00	0,00
52	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	117.025.000,00	0,00
53	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	16.000.000,00
54	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya	0,00	8.150.000,00
55	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0,00	174.528.500,00
56	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	2.781.511.257,00
57	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	6.270.000,00
58	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	0,00	99.000.000,00
59	Beban Pemeliharaan Rumah Dinas	0,00	0,00
60	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	11.500.000,00	0,00
61	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	483.755.517,00	0,00
62	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	473.492.500,00	0,00
63	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	947.500.550,00	0,00
64	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	148.006.800,00	0,00
65	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	100.904.558,00	0,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
66	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	131.090.849,00	0,00
67	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	32.245.000,00	0,00
68	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	0,00	0,00
69	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	0,00	0,00
70	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	0,00	30.977.520,00
71	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan	0,00	9.114.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan - LO		13.875.285.592,41	10.043.444.932,60

	<u>TA 2022</u>	<u>TA2021</u>
5.4.2.5	Beban Perjalanan Dinas – LO	58.689.435.523,00 50.782.865.567,00

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dimana pada Tahun 2022 realisasi Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp58.689.435.523,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel Beban Perjalanan Dinas – LO pada tabel 5.238.

Tabel 5.238 Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	48.167.802.775,00	34.798.990.986,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	43.615.675,00	2.959.948.500,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.061.167.500,00	11.819.205.884,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.100.000,00	
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.170.950.773,00	1.204.720.197,00
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	241.798.800,00	0,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas - LO		58.689.435.523,00	50.782.865.567,00

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.4.2.6	Beban Subsidi – LO	0,00 0,00

Dalam Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat realisasi Beban Subsidi sampai dengan 31 Desember 2022.



		TA 2022	TA 2021
5.4.2.7	Beban Hibah – LO	28.835.102.812,00	33.644.351.262,00

Beban Hibah adalah Beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp28.835.102.812,00. dengan rincian Beban Hibah – LO dapat dilihat pada tabel 5.239.

Tabel 5.239 Rincian Beban Hibah – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.444.408.726,00	1.388.046.050,00
2	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	136.770.645,00	0,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.855.164.845,00	3.772.136.600,00
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	682.338.955,00	0,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.053.182.200,00	9.078.157.183,00
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.655.288.200,00	0,00
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	583.518.625,00	0,00
8	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.763.416.087,00	18.752.600.900,00
9	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.660.000,00	0,00
10	Beban Hibah Barang kepada Koperasi	3.944.000,00	0,00
11	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	653.410.529,00	653.410.529,00
12	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Jumlah Beban Hibah – LO		28.835.102.812,00	33.644.351.262,00

		TA 2022	TA 2021
5.4.2.8	Beban Bantuan Sosial – LO	8.457.711.300,00	7.333.129.000,00

Beban Bantuan Sosial adalah Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp8.457.711.300,00 merupakan Beban Bantuan Sosial Pemerintah kepada Masyarakat untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif, dengan rincian Bantuan Sosial – LO dapat dilihat pada tabel 5.240.

Tabel 5.240 Rincian Bantuan Sosial – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	6.671.100.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.665.953.300,00	7.333.129.000,00



(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	102.228.000,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	18.430.000,00	0,00
Jumlah Beban Bantuan Sosial – LO		8.457.711.300,00	7.333.129.000,00

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.4.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	127.885.263.401,50	189.469.073.361,75

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Beban Amortisasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp128.037.334.801,50 dengan rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO dapat dilihat pada tabel 5.241.

**Tabel 5.241 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO
per 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
A	Beban Penyusutan		
1	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	574.187.929,00	1.056.398.782,86
2	Beban Penyusutan Alat Besar Apung	18.645.833,00	25.750.000,00
3	Beban Penyusutan Alat Bantu	233.507.476,00	136.213.966,66
4	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.364.426.678,00	6.787.063.617,28
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	42.765.626,00	43.357.142,86
6	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor	1.555.505.128,00	1.090.173.091,86
7	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	369.583.391,00	649.479.226,43
8	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	401.190.418,00	373.417.800,00
9	Beban Penyusutan Alat Ukur	408.727.270,00	416.594.851,00
10	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	72.887.750,00	68.325.250,00
11	Beban Penyusutan Alat Kantor	1.994.919.347,00	1.953.554.729,08
12	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	4.662.941.474,00	4.606.177.907,01
13	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	353.354.290,00	314.436.030,78
14	Beban Penyusutan Alat Studio	710.910.771,00	892.336.234,07
15	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	468.029.657,00	566.860.670,86
16	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	202.998.154,00	318.876.600,00
17	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	11.766.967.934,00	13.322.038.541,37
18	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	208.628.988,00	175.240.569,83
19	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	2.956.317.647,00	4.064.032.939,21
20	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir	1.283.027,00	0,00
21	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	1.502.914.796,20	4.000.000,00
22	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	4.101.811,00	56.666,67



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

No	Uraian	2022	2021
23	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	468.000,00	0,00
24	Beban Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> (BATAM)	420.000,00	0,00
25	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	121.558.937,00	25.683.838,08
26	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	1.650.255,00	0,00
27	Beban Penyusutan Komputer Unit	5.551.594.543,00	5.119.075.787,75
28	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	2.423.309.076,00	710.280.149,36
29	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	6.367.800,00	25.459.750,00
30	Beban Penyusutan Alat Bantu Produksi	17.500.000,00	0,00
31	Beban Penyusutan Alat Pelindung	22.699.833,00	64.296.898,40
32	Beban Penyusutan Alat SAR	73.629.169,00	22.413.993,87
33	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	438.030,00
34	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi	12.568.298,00	8.049.000,00
35	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	21.371.965,00	19.982.000,00
36	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	149.581.492,00	16.607.800,95
37	Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.493.440.150,00	11.966.389.447,92
38	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	1.275.431.504,00	798.820.907,22
39	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	229.954.692,00	196.739.679,62
40	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan	4.400.000,00	4.063.610,70
41	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	261.892.390,00	91.291.846,81
42	Beban Penyusutan Jalan	42.313.375.166,96	113.163.953.360,49
43	Beban Penyusutan Jembatan	1.216.366.242,00	606.814.419,17
44	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	2.112.504.272,00	13.991.564.643,49
45	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut	245.946.016,00	231.538.322,70
46	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman	0,00	462.415.104,64
47	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	160.884.920,00	0,00
48	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.291.756.903,00	0,00
49	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	154.378.741,00	2.408.213,33
50	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.376.426.590,00	1.147.734.709,41
51	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	264.873.387,00	7.913.060,77
52	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	116.898.047,00	101.099.268,02
53	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	237.191.078,00	169.139.368,61
54	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	33.175.341,67
55	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	328.241.452,00	599.946.523,85
56	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	254.745.912,00	372.131.556,57
57	Beban Penyusutan Instalasi Lain	2.316.666,00	6.042.675,00
58	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	1.445.076.536,00	1.381.117.988,13
59	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	1.472.653.883,00	1.002.734.691,56
60	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	23.586.250,00	



No	Uraian	2022	2021
61	Beban Penyusutan Jaringan Gas	17.082.435,00	
62	Beban Penyusutan Barang Bercorak penian	122.105.882,00	9.500.000,00
B	Beban Amortisasi		
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	186.219.523,34	245.866.755,84
JumlahBeban Penyusutan dan Amortisasi – LO		127.885.263.401,50	189.469.073.361,75

	TA 2022	TA 2021
5.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang – LO	67.630.827,92	283.569.476,77

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp67.630.827,92. Dengan rincian Beban Penyisihan Piutang – LO dapat dilihat pada tabel 5.242.

**Tabel 5.242 Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO
per 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
A	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1	Beban Penyisihan Pajak Restoran		
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	30.175,00	15.575,00
		30.175,00	15.575,00
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah		
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	62.775,00	7.345,00
		62.775,00	7.345,00
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	213.845,00	51.434,30
		213.845,00	51.434,30
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)		
	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	258.638.270,84	167.590.944,81
		258.638.270,84	167.590.944,81
	sub Jumlah	258.945.065,84	167.665.299,11
B	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum		
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	8.000.000,00	2.960.000,00
		8.000.000,00	2.960.000,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha		
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.105.000,00	780.000,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Pelelangan	1.000.000,00	
		2.105.000,00	780.000,00



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
3	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	6.799.900,00	
		6.799.900,00	0,00
	sub Jumlah	16.904.900,00	3.740.000,00
1	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	3.149.251,48	9.690.869,04
2	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		
	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	12,5	0,00
		12,50	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga		
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.577,73	614.246,54
		2.577,73	614.246,54
4	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		
	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	(644.246,54)	
		(644.246,54)	0,00
5	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD		
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	2.813.007,79	8.108.122,50
		2.813.007,79	8.108.122,50
6	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	977.900,00	968.500,00
		977.900,00	968.500,00
	sub Jumlah	3.149.251,48	9.690.869,04
C	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		
1	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak	7.372.725,60	62.865.058,84
	sub Jumlah	7.372.725,60	62.865.058,84
D	Beban Penyisihan Piutang Lainnya		
	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
1	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	(211.610.145,00)	0,00
2	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	(32.000.000,00)	0,00
		(243.610.145,00)	0,00
	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		
1	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0	12.603.207,60
		0,00	12.603.207,60
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	24.869.030,00	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	27.005.042,18



(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
		24.869.030,00	27.005.042,18
	sub Jumlah	(218.741.115,00)	39.608.249,78
	Jumlah	67.630.827,92	283.569.476,77

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.4.2.11 Beban Lain-lain – LO	75.497.191,00	1.077.385.652,28

Realisasi Beban Lain-lain periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp75.497.191,00. Merupakan belanja modal aset tetap namun tidak memenuhi kriteria asset tetap.

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.4.2.12 Beban Transfer – LO	135.725.725.488,00	69.458.777.171,00

Beban Transfer adalah Beban Transfer periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp135.725.725.488,00 dengan rincian Beban Transfer – LO dapat dilihat pada tabel 5.243.

Tabel 5.243 Rincian Beban Transfer – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.093.701.555,00	1.075.708.283,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	273.860.700,00	268.927.072,00
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	134.358.163.233,00	68.114.141.816,00
	Jumlah Beban Transfer – LO	135.725.725.488,00	69.458.777.171,00

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	143.260.697.876,87	(3.366.441.744,66)

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel 5.244.

Tabel 5.244 Perhitungan Surplus/Defisit Kegiatan Operasional – LO per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan	1.064.971.383.239,44	949.535.776.239,63
2	Beban	921.710.685.362,57	952.902.217.984,29
	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional – LO	143.260.697.876,87	(3.366.441.744,66)



5.4.4	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	TA 2022	TA 2021
		2.163.697.144,00	0,00
	Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2022 sebesar Rp2.163.697.144,00.		
5.4.5	Pos Luar Biasa	TA 2022	TA 2021
		(1.384.077.800,00)	(2.790.387.174,50)
	Pada Tahun 2022 terdapat realisasi Pos Luar Biasa berupa pendapatan luar biasa sebesar Rp0.00 dan beban luar biasa sebesar (Rp1.384.077.800,00) sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp2.790.387.174,50 yang bersumber dari beban tidak terduga.		
5.4.6	Surplus/Defisit LO	TA 2022	TA 2021
		139.712.922.932,87	(1.314.784.473,78)
	Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 surplus sebesar Rp139.712.922.932,87.		



5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi serta memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Rincian realisasi Arus Kas Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 5.245.

Tabel 5.245 Rincian Arus Kas per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Arus Kas Masuk		
	Aktivitas Operasi	1.021.771.355.235,53	1.024.336.383.734,84
	Aktivitas Investasi	0,00	32.000.000,00
	Aktivitas Pendanaan	211.610.145,00	112.417.632,00
	Aktivitas Transitoris	66.915.228.298,00	58.562.140.193,00
2	Arus Kas Keluar		
	Aktivitas Operasi	802.022.157.706,52	854.293.539.564,50
	Aktivitas Investasi	196.692.630.353,00	171.226.990.286,00
	Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
	Aktivitas Transitoris	66.915.228.298,00	58.572.475.266,00
	Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas	23.268.177.321,01	(1.050.063.556,66)

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	219.503.545.031,01	170.042.844.170,34

Merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari:

	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.5.1.1 Arus Kas Masuk	1.021.525.702.737,53	1.024.336.383.734,84

Arus Kas Masuk adalah jumlah realisasi penerimaan kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2022.

Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi terdiri dari:

Tabel 5.246 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Penerimaan Pajak Daerah	11.726.555.924,72	9.627.712.505,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	2.163.203.270,00	1.916.197.000,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.171.072.548,76	8.610.923.377,48
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	28.111.262.956,05	34.769.368.269,36



(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
5	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	10.823.615.195,00	13.781.162.857,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Hasil Sumber Daya Alam	13.399.844.473,00	7.524.029.859,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	559.925.703.281,00	560.147.323.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	246.115.435.446,00	193.402.353.925,00
10	Dana Insentif Daerah (DID)	2.950.221.000,00	21.085.165.000,00
11	Dana Desa	71.045.205.000,00	85.522.515.000,00
12	Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya	49.415.205.699,00	42.782.345.642,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
14	Penerimaan Hibah	0,00	7.340.400.000,00
15	Penerimaan Lainnya	13.678.377.944,00	37.826.887.300,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi		1.021.525.702.737,53	1.024.336.383.734,84

5.5.1.2 **Arus Kas Keluar** **TA 2022** **TA 2021**
802.022.157.706,52 **854.293.539.564,50**

Arus Kas Keluar adalah jumlah realisasi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2022. terdiri atas:

**Tabel 5.247 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi
per 31 Desember 2022 dan 2021**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Pembayaran Pegawai	354.916.349.730,52	388.642.494.866,00
2	Pembayaran Barang& Jasa	271.167.735.291,00	265.189.139.446,00
3	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
4	Pembayaran Hibah	30.327.841.932,00	35.351.199.489,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	8.457.711.300,00	7.333.129.000,00
6	Pembayaran Tak Terduga	1.444.530.800,00	2.799.387.174,50
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.095.442.800,00	1.075.708.283,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Restribusi	273.860.700,00	268.927.072,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
10	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	134.338.685.153,00	153.633.554.234,00
11	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi		802.022.157.706,52	854.293.539.564,50

5.5.1.3 **Arus Kas Bersih** **TA 2022** **TA 2021**
219.503.545.031,01 **170.042.844.170,34**

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2022. yaitu sebesar Rp219.503.545.031,01.

5.5.2 **Arus Kas dari Aktivitas Investasi** **TA 2022** **TA 2021**
(196.446.977.855,00) **(171.194.990.286,00)**

Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.



Arus Kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari:

	TA 2022	TA 2021
5.5.2.1 Arus Kas Masuk	245.652.498,00	32.000.000,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi adalah jumlah penerimaan kas atas realisasi penjualan aset tetap dalam TA 2022.
Arus Kas Masuk dari aktivitas investasi terdiri dari:

Tabel 5.248 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	245.652.498,00	32.000.000,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi		245.652.498,00	32.000.000,00

	TA 2022	TA 2021
5.5.2.2 Arus Kas Keluar	196.692.630.353,00	171.226.990.286,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi adalah jumlah pengeluaran kas atas realisasi belanja modal/pembangunan/investasi dalam TA 2022 dirinci menurut objek belanja sebagai berikut.

Tabel 5.249 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Perolehan Tanah	1.886.851.800,00	1.778.655.299,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	40.530.407.319,00	59.718.471.630,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	74.323.315.084,00	33.830.974.656,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.055.523.650,00	73.778.890.701,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.896.532.500,00	119.998.000,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi		196.692.630.353,00	171.226.990.286,00

	TA 2022	TA 2021
5.5.2.3 Arus Kas Bersih	(196.446.977.855,00)	(171.194.990.286,00)

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan investasi aset nonkeuangan dalam periode TA 2022, yaitu sebesar Rp (196.446.977.855,00).

	TA 2022	TA 2021
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	211.610.145,00	112.417.632,00

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang.
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari:



	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.5.3.1 Arus Kas Masuk	211.610.145,00	112.417.632,00
Dalam TA 2022 Penerimaan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan diperoleh dari Penerimaan Kembali Piutang dari dana pemberdayaan masyarakat dan pengembalian uang muka perumahan.		
	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.5.3.2 Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Pengeluaran kas untuk membiayai pengeluaran pendanaan terdiri atas pembayaran pokok utang pinjaman dalam negeri kepada rekanan dalam rangka pengadaan aset tetap sebesar Rp0,00.		
	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.5.3.3 Arus Kas Bersih	211.610.145,00	112.417.632,00
Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan pendanaan dalam periode TA 2022. yaitu sebesar Rp211.610.145,00.		
	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(331.364,00)	(10.335.073,00)
Arus kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar, kuitansi pembayaran atas beban pengeluaran atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran terdiri dari:		
	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.5.4.1 Arus Kas Masuk	66.915.228.298,00	58.562.140.193,00
Dalam TA 2022 tidak terdapat Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa pemotongan/pemungutan IWP.Taperum.dan PPh 21 yang terlambat disetor ke Kas Negara sampai tanggal neraca.		
	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.5.4.2 Arus Kas Keluar	66.915.559.662,00	58.572.475.266,00
Dalam TA 2022 tidak terdapat Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) atas pemotongan/pemungutan IWP. Taperum dan PPh 21 yang terlambat disetor ke Kas Negara sampai tanggal neraca.		
	<u>TA 2022</u>	<u>TA 2021</u>
5.5.4.3 Arus Kas Bersih	(331.364,00)	(10.335.073,00)
Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan transitoris dalam periode TA 2022. yaitu sebesar Rp0,00.		



Kenaikan (Penurunan)	TA 2022	TA 2021
5.5.5 Bersih Kas Selama Periode Tahun 2022	23.267.845.957,01	(1.050.063.556,66)

Penurunan Kas berasal dari:

Tabel 5.250 Rincian Kenaikan Kas per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	219.503.545.031,01	170.042.844.170,34
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(196.446.977.855,00)	(171.194.990.286,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	211.610.145,00	112.417.632,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	(10.335.073,00)
Kenaikan Bersih Kas Periode TA 2022		23.267.845.957,01	(1.050.063.556,66)

Saldo Akhir Kas terdiri dari:

Tabel 5.251 Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
Saldo Akhir Kas		89.717.404.829,42	66.449.558.872,41
	Terdiri dari:		
a.	Saldo Akhir Kas di BUD	80.213.551.864,57	34.613.323.803,31
b.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	40.881.700,00	69.574.600,00
c.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	6.364.600,00	24.000.195,73
d.	Saldo Akhir Kas di BLUD	9.001.238.042,67	12.470.455.577,19
e.	Saldo Akhir Kas di Bendahara JKN FKTP	930.150,00	1.795.502,00
f.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	430.693.672,18	1.270.077.830,18
g.	Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	23.744.800,00	331.364,00
g.	Setara Kas	0,00	18.000.000.000,00

Perbandingan saldo akhir kas di BUD antara Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut.

Saldo Akhir Kas BUD di Neraca	80.213.551.864,57
Saldo Akhir Kas BUD di LAK	80.213.551.864,57
Selisih	0,00

Perbandingan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Sisa Saldo Akhir Kas di LAK sebagai berikut.

SiLPA di LRA	89.717.404.829,42
Saldo Akhir Kas di LAK	89.717.404.829,42
Selisih	(0,00)

Dalam Tahun 2022 tidak terdapat selisih antara SiLPA di LRA dengan saldo Akhir Kas di LAK.



5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. LPE merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari LPE dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 5.6.1 Pada tahun 2022 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp2.097.175.798.400,97 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2021.
- 5.6.2 Surplus/defisit-LO tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp139.712.922.932,87 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
- 5.6.3 Penyesuaian ekuitas pada LPE terdapat sebesar Rp(274.132.907.214,90) adalah koreksi ekuitas lainnya yang merupakan penyesuaian atas transaksi sebelum TA 2022.

Tabel 5.252 Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Koreksi Penambahan nilai Utang Beban Barang Jasa	(545.540.240)
Koreksi Penambahan nilai Utang Jangka Pendek	(1.249.511)
Koreksi Pengurangan nilai Utang Beban Barang Jasa	11.149.510
Koreksi Pengurangan nilai Utang Jangka Pendek	34.788.755
Peningkatan/penurunan nilai Investasi Permanen	(259.863.284)
Obat Kedaluwarsa	(2.116.885.155)
Koreksi catat asset tetap	(721.898.329)
Koreksi Perubahan Kebijakan Akumulasi Penyusutan	(256.685.168.121)
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya (Hewan Sapi Tanamalala) Naik Kategori	291.540.000
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya (Hewan Sapi Tanamalala) Akibat Kelahiran	158.000.000
Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya (Hewan Sapi Tanamalala) Akibat Kematian	(504.900.000)
Penyisihan Pelunasan Piutang	1.131.598
Reklasifikasi barang Extracount	(6.749.376.896)
Koreksi Nilai Investasi	(9.102.757.906)
Koreksi Pelunasan Piutang	(32.000.000)
Koreksi Nilai Perediaan	2.090.122.365
JUMLAH	(274.132.907.214)

- 5.6.4 Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 adalah sebesar Rp1.962.755.814.118,94.



BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Data Umum Pemda

Nama Daerah	:	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Alamat	:	Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 01 Benteng
Bupati	:	H. Muh. Basli Ali
Wakil Bupati	:	H. Saiful Arif. S.H.
Jumlah Organisasi	:	45 Organisasi Perangkat Daerah berupa Sekretariat/Badan/Dinas/Kecamatan/Kelurahan

6.2 Gambaran Umum Pemda

a. Letak Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 5042'~70 35' Lintang Selatan dan 1200 15'~122' 30' Bujur Timur. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. dan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari Pulau Sulawesi. dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Perairan Teluk Bone;
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Perairan Selat Makassar;
- 4) Sebelah Selatan dengan Laut Flores.

b. Luas wilayah

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503.69 km² dimana luas daratan 1.357.03 km². sedangkan luas laut 9.146.66 km². dengan panjang garis pantai yaitu 670 km. secara administratif pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 Kecamatan. 88 Desa dan 7 Kelurahan. sebanyak lima kecamatan berada di kepulauan. yaitu Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate. Kecamatan Pasimasunggu dengan Ibukota Benteng Jampea. Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan Ibukota Ujung Jampea. Kecamatan Taka Bonerate dengan Ibukota Kayuadi. dan Kecamatan Pasilambena dengan Ibukota Kalaotoa. Sedangkan enam kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar. yaitu Kecamatan Benteng dengan Ibukota Benteng. Kecamatan Bontoharu dengan Ibukota Matalalang. Kecamatan Bontosikuyu dengan Ibukota Pariangan. Kecamatan Bontomanai dengan Ibukota Polebungin. Kecamatan Buki dengan Ibukota Buki dan Kecamatan Bontomatene dengan Ibukota Batangmata. Berikut adalah rincian luas wilayah per kecamatan:

Tabel 6.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Pasimarannu	176,35
2	Pasilambena	102,99
3	Pasimasunggu	114,5
4	Taka Bonerate	221,07
5	Pasimasunggu Timur	47,93
6	Bontosikuyu	199,11
7	Bontoharu	129,75
8	Benteng	7,12
9	Bontomanai	115,56
10	Bontomatene	159,92
11	Buki	82,73

Sumber: Selayar dalam angka Tahun 2022. BPS



Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 132 pulau baik pulau besar maupun pulau kecil. gugusan kepulauan tersebut sebagian dihuni penduduk. sebagian lagi adalah pulau yang tidak berpenghuni. pulau-pulau berpenghuni tersebut antara lain Pulau Pasi Tanete. Pulau Pasi Gusung. Bahuluan. Tambolongan. Polassi. Jampea. Lambego. Bonerate. Pasi Tallu. Kakabia. Jinato. Kayuadi. Rajuni. Rajuni Bakka. Rajuni Ki'di. Kalaotoa. Latondu Pulo Madu dan lain-lain. Jumlah keseluruhan pulau berpenghuni 26 buah.

c. Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Budaya

Misi :

- 1) Mewujudkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan basis nilai utama dalam pembangunan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui pendekatan aspiratif, partisipatif dan transparan;
- 3) Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
- 4) Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi swasta di sektor perikanan, kelautan dan pariwisata;
- 5) Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif daerah;
- 6) Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan;
- 7) Mewujudkan pelestarian tradisi dan kearifan lokal melalui strategi kebudayaan.

6.3 Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi: 1) Urusan Pemerintahan Absolut (Pemerintah Pusat); 2) Urusan Pemerintahan Konkuren (Pemerintahan Daerah); dan 3) Urusan Pemerintahan Umum (kewenangan Presiden). Pengaturan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren dibagi berdasarkan kriteria:

a. Pemerintah Pusat:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- 5) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

b. Pemerintahan Daerah Provinsi:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;



- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.
- c. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
 - 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
 - 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Atas perubahan pembagian urusan pemerintahan tersebut, maka terjadi pula perubahan dalam bidang urusan pemerintah daerah. antara lain:

- a. Pada Bidang Pendidikan sebelumnya untuk bidang pendidikan menengah adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kini kewenangan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi. Dalam Bidang Pendidikan. kewenangan dalam pengelolaan pendidikan terdiri dari enam komponen dan dari komponen tersebut hanya lima komponen yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, pemindahan pendidik, perizinan dan bahasa dan sastra. Namun kewenangan itupun dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. dimana Pemerintah Daerah Provinsi memiliki lima komponen kewenangan yang terkait pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki lima komponen kewenangan terkait pendidikan dasar dan nonformal.
- b. Pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya kewenangan dibagi antara Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. namun kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah membuat Peraturan Daerah terkait ESDM. pemberian izin (kecuali panas bumi), pembinaan, dan pengawasan.
- c. Pada Bidang Kelautan. sebelumnya juga membagi kewenangan antara Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah Provinsi. dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Namun kini kewenangan tersebut hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah pelaksanaan kebijakan. penataan ruang laut. pengawasan dan penegakan hukum. Koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan. dan perizinan (kecuali ijin usaha perikanan).
- d. Pada Bidang Kehutanan. yang semula kewenangan dibagi antara Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah inventarisasi hutan pengelolaan taman hutan. pertimbangan teknis. dan perizinan.

Dampak dari penarikan kewenangan sebagaimana tersebut di atas berimplikasi luas terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. antara lain:

- e. Aspek Kelembagaan;
Pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. perubahan struktur organisasi perangkat daerah merupakan hal yang tidak terelakan sebagai dampak dari penarikan kewenangan tersebut.



Meskipun tidak mengubah struktur organisasi perangkat daerah, penambahan kewenangan tersebut berdampak pada perubahan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dibawahnya.

f. Peraturan Perundang-undangan;

Dengan perubahan kewenangan tersebut maka otomatis akan berdampak pada peraturan perundang-undangan di daerah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang memuat kewenangan lama harus segera dicabut. Sedangkan Peraturan Daerah Provinsi yang belum mengakomodasi kewenangan baru harus dibuat dan/atau direvisi.

g. Rencana Pembangunan;

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentunya telah menyusun rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, diperlukan beberapa penyesuaian baik tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, maupun indikator kinerja disesuaikan dengan perubahan kewenangan tersebut.

BAB VII PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR.



[Handwritten Signature]
N. Muh. Basli Ali